



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 20, 2023 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa kegiatan pada jumlah, jenis, dan rincian yang berimplikasi terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0112);

13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 128);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 124);
16. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tangerang Selatan.

6. Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tangerang Selatan.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai landasan penyusunan perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil triwulan II tahun 2023;
 - c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan; dan
 - f. penutup.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 9 Agustus 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 11 Agustus 2023

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani



DRS. H. BENYAMIN DAVNIE
WALI KOTA TANGERANG SELATAN

H. PILAR SAGA ICHSAN, ST, MT
WAKIL WALI KOTA
TANGERANG SELATAN



Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

P-RKPD

Kota Tangerang Selatan



Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

**TAHUN
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR PERTIMBANGAN	2
1.3. DASAR HUKUM.....	2
1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	9
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN.....	10
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023	11
2.1. EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023	11
2.1.1. Hasil Evaluasi Indikator Makro Pembangunan.....	11
2.1.2. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama.....	26
2.1.3. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan	33
2.1.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam RKPD Tahun 2023 s.d Triwulan II	48
2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	53
2.2.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	53
2.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	55
2.6. ISU STRATEGIS	65
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	67
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	67
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	73
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan	73
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	77
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	119
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	121
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	121
4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023...	138

4.3. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023	145
4.4.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	145
4.4.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023.....	148
4.4.3 Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	149
4.4. SINKRONISASI PRIORITAS KOTA TANGERANG SELATAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI.....	151
4.5 PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	152
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	153
5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023	153
5.1.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Pencapaian Target RPJMD	153
5.1.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023	181
5.1.3. Rencana Kerja Penanganan Stunting Tahun 2023	196
5.1.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023	201
5.1.5. Rencana Kerja dan Pendanaan Upaya Pengendalian Harga Tahun 2023	206
5.1.6. Rencana Kerja Penurunan Pengangguran Tahun 2023.....	216
5.1.7. Rencana Kerja Pengurangan Kesenjangan Tahun 2023.....	221
5.1.8. Rencana Kerja Pengendalian Banjir Tahun 2023.....	229
5.1.9. Rencana Kerja Pengurangan Kemacetan Tahun 2023.....	234
BAB VI PENUTUP.....	239

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Tangerang Selatan s.d Triwulan II Tahun 2023.....	11
Tabel 2.2.	PDRB ADHK Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 s.d Triwulan II Tahun 2023	13
Tabel 2.3.	IHK dan Tingkat Inflasi Kota Tangerang Selatan Desember 2022, Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)	16
Tabel 2.4.	Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Tangerang Selatan dan Kab/Kota di Provinsi Banten Periode Minggu ke-3 Juni s.d Minggu ke-2 Juli Tahun 2023	16
Tabel 2.5.	Perkembangan Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 s.d Triwulan II Tahun 2023	19
Tabel 2.6.	Nilai RLS di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 s.d Triwulan II Tahun 2023	20
Tabel 2.7.	Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 s.d Triwulan II Tahun 2023	20
Tabel 2.8.	Kondisi Kemiskinan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 s.d Triwulan II Tahun 2023.....	22
Tabel 2.9.	Karakteristik IPM di Kota Tangerang Selatan tahun 2021 s.d Triwulan II Tahun 2023.....	25
Tabel 2.10.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel 2.11.	Capaian Indikator Kinerja Utama s.d Triwulan II Tahun 2023	28

Tabel 2.12.	Pencapaian Indikator Kinerja Utama s.d Triwulan II Tahun 2023	32
Tabel 2.13.	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan s.d Triwulan II Tahun 2023.....	34
Tabel 2.14.	Penilaian Realisasi Kinerja Indikator Penyelenggaraan Urusan s.d Triwulan II Tahun 2023	47
Tabel 2.15.	Realisasi Kinerja Anggaran dalam Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kota Tangerang Selatan.....	49
Tabel 2.16.	Rumusan Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	53
Tabel 2.17.	Isu Strategis Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	65
Tabel 3.1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia.....	68
Tabel 3.2.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023.....	69
Tabel 3.3.	Proyeksi LPE Provinsi Banten Tahun 2023	69
Tabel 3.4.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 (dalam Persen).....	70
Tabel 3.5.	Tipologi Sektor Lapangan Usaha di Kota Tangerang Selatan s.d Triwulan II Tahun 2023 (berdasarkan PDRB ADHK)	71
Tabel 3.6.	Indikator makro Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	73
Tabel 3.7.	Struktur Pendapatan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	75
Tabel 3.8.	Struktur Belanja dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023.....	82

Tabel 3.9.	Perhitungan Belanja Mandat dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023	83
Tabel 3.10.	Daftar Rincian Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023	86
Tabel 3.11.	Struktur Perubahan Pembiayaan Tahun 2023 Kota Tangerang Selatan.....	120
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	122
Tabel 4.2.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	126
Tabel 4.3.	Strategi Pembangunan Daerah RPJMD Tahun 2021-2026..	138
Tabel 4.4.	Dukungan Pendanaan terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	148
Tabel 4.5.	Dukungan Pendanaan terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Banten dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	149
Tabel 4.6.	Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 beserta Dukungan Pendanaan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	150
Tabel 4.7.	Sinkronisasi Prioritas Pemabangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional	151
Tabel 5.1.	Rencana Program Kerja dan Indikator Kinerja Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	153

Tabel 5.2.	Pendanaan Rencana Kerja dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Perangkat Daerah	178
Tabel 5.3	Target Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023	181
Tabel 5.4	Rencana Kerja dan Pendanaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	185
Tabel 5.5.	Rencana Kerja dan Pendanaan Penanganan Stunting dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	197
Tabel 5.6.	Rencana Kerja dan Pendanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023	201
Tabel 5.7.	Rencana Kerja dan Pendanaan Pengendalian Inflasi Daerah dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	206
Tabel 5.8.	Rencana Kerja dan Pendanaan Penurunan Pengangguran dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	216
Tabel 5.9.	Rencana Kerja dan Pendanaan Pengurangan Kesenjangan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	221
Tabel 5.10.	Rencana Kerja dan Pendanaan Pengendalian Banjir dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	229
Tabel 5.11.	Rencana Kerja dan Pendanaan Pengurangan Kemacetan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	234

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Kab/Kota dan Perangkat Daerah	9
Gambar 2.1.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2022	14
Gambar 2.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten	14
Gambar 2.3.	Perbandingan IPH antara Kota Tangerang Selatan dengan Kab/Kota di Provinsi Banten Periode Minggu ke-3 Juni s.d Minggu ke-2 Juli Tahun 2023.....	18
Gambar 2.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten	21
Gambar 2.5.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten	23
Gambar 2.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja IPM Kota Tangerang Selatan dengan Realisasi Nasional Tahun 2018-2022.....	24
Gambar 2.7.	Kinerja IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten s/d Triwulan II Tahun 2023	24
Gambar 2.8.	Perbandingan Indeks Gini Kota Tangerang Selatan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 s.d Triwulan II Tahun 2023	26
Gambar 4.1.	Tema RKP Tahun 2023	145
Gambar 4.2.	Arah Kebijakan RKP Tahun 2023	146
Gambar 4.3.	Target Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023	147

Gambar 4.4. Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023
.....149

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023. Seiring dengan proses pelaksanaan APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun 2023, terdapat perkembangan yang menyebabkan perubahan asumsi dalam kerangka keuangan daerah, rencana program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2023 serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya perkembangan keadaan yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan asumsi awal RKPD, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyusun Perubahan RKPD tahun 2023.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dilakukan dalam rangka menjamin sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, yang selanjutnya akan menjadi acuan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Pertimbangan

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengakomodir perubahan penjabaran APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 yang didalamnya terdapat pergeseran anggaran mengacu pada aturan yang berlaku.
- b. Penyesuaian kerangka pendanaan daerah dengan memperhatikan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023.
- c. Penyesuaian rencana kerja dan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023 dalam rangka percepatan pencapaian fokus pembangunan KDH/WKDH.
- d. Penyesuaian target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala BAPPENAS RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
27. Peraturan BKKBN RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB TA2023;
28. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 204/Pmk.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;

29. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 208/Pmk.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal;
30. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 211/Pmk.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/Pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus;
31. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana dan Besaran Alokasi Dana BOP PAUD, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2023
32. Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-52/PK/2023 tentang Pengalokasian Insentif Fiskal TA 2023 Kinerja Tahun Berjalan.
33. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
34. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten tahun 2023-2026.
35. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 124);
36. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

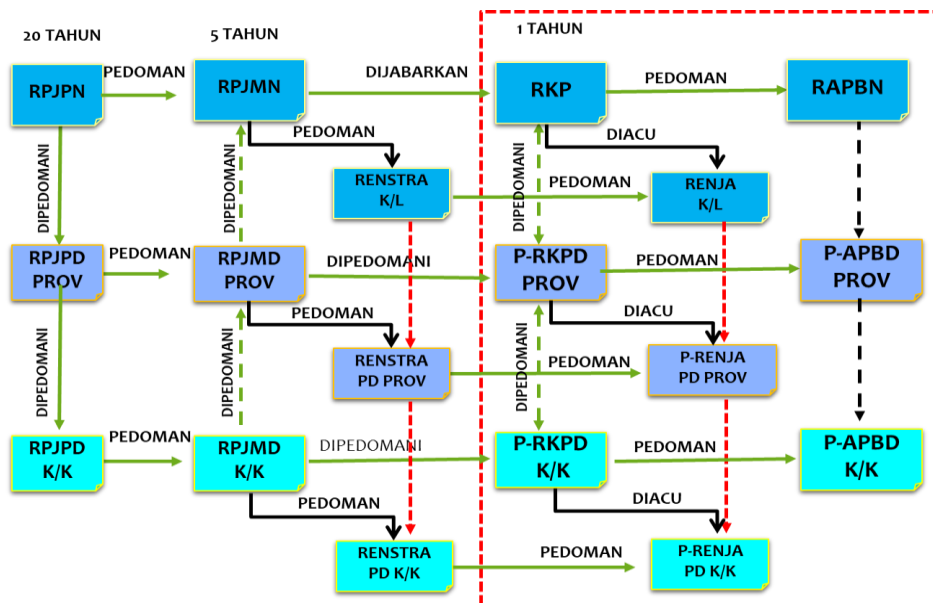
37. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
38. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 73);
39. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 26).
40. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 4)
41. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2023)
42. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2023)

43. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 900.1.1/Kep.75-Huk/2023 tentang Pergeseran Anggaran Antar Unit/Kegiatan/Jenis Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
44. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 900.1.1/Kep.135-Huk/2023 tentang Pergeseran Anggaran Antar Antar Organisasi/Unit Organisasi / Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Jenis/Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
45. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 900.1.1/Kep.216-Huk/2023 Tentang Pergeseran Anggaran Antar Antar Organisasi/Unit Organisasi / Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan/Kelompok Jenis/Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
46. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor. 900.1.1/1466/Bkad/2023 tentang Persetujuan Pergeseran Antar Objek Belanja Dalam Satu Jenis Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
47. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor. 900.1.1/2271/Bkad/2023 Tentang Persetujuan Pergeseran Antar Objek Belanja Dalam Satu Jenis Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
48. Keputusan Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor. 900.1.1/Kep.177/Bkad/2023 tentang Persetujuan Pergeseran Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Belanja Dalam Satu Objek Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
49. Keputusan Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor. 900.1.1/Kep.220/Bkad/2023 tentang Persetujuan Pergeseran Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Belanja Dalam Satu Objek Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
50. Keputusan Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor. 900.1.1.4/Kep.289/Bkad/2023 tentang Persetujuan Pergeseran Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Belanja Dalam Satu Objek Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran tahun kedua RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dan menjadi acuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023. Untuk mewujudkan sinkronisasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Banten, maka Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023.

Kebijakan pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Tangerang Selatan terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten dan dokumen perencanaan Kota Tangerang Selatan. Hubungan antar dokumen perencanaan disajikan dalam Gambar berikut.



Gambar 1.1. Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Kab/Kota dan Perangkat Daerah

Sumber: Undang-undang 25 Tahun 2004

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Tangerang Selatan adalah untuk menjaga sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Tangerang Selatan Tahun 2023:

- a. Menyesuaikan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 dengan perubahan-perubahan yang terjadi sampai dengan triwulan II tahun 2023.
- b. Sebagai acuan perubahan KUA PPAS tahun 2023
- c. Sebagai pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023.

1.6. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 349, sistematika Perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Tangerang Selatan, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2023

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sampai Triwulan II Tahun 2023

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat beberapa lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan yaitu:

- Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- Evaluasi terhadap hasil pembangunan daerah.

Pada bab ini akan menggambarkan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

2.1.1. Hasil Evaluasi Indikator Makro Pembangunan

Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah merupakan capaian tahunan yang hasilnya baru dapat tergambar paling cepat pada triwulan IV Tahun 2023 Kota Tangerang Selatan atau paling lambat pada bulan Januari tahun 2024, sehingga capaian indikator makro pembangunan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dievaluasi berdasarkan capaian pada tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Tangerang Selatan s.d Triwulan II Tahun 2023

No.	Indikator Makro	Satuan	Target RKPD 2023	Realisasi s.d TW II Tahun 2023	Capaian s.d TW II Tahun 2023 (%)	Kriteria Kinerja
1	LPE	Persen	6,25 - 7,06	5,82	93,12	Sangat Tinggi
2	Inflasi	Persen	3,19 - 3,37	6,62 *	3,56	Sangat Rendah
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,58	6,59	100	Sangat Tinggi

No.	Indikator Makro	Satuan	Target RKPD 2023	Realisasi s.d TW II Tahun 2023	Capaian s.d TW II Tahun 2023 (%)	Kriteria Kinerja
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	1,89	2,50	67,72	Sedang
5	IPM	Nilai	81,81	81,95	100	Sangat Tinggi
6	Indeks Gini	Indeks	0,350	0,359	97,43	Sangat Tinggi

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

*Mengacu inflasi Kota Depok Tahun 2022

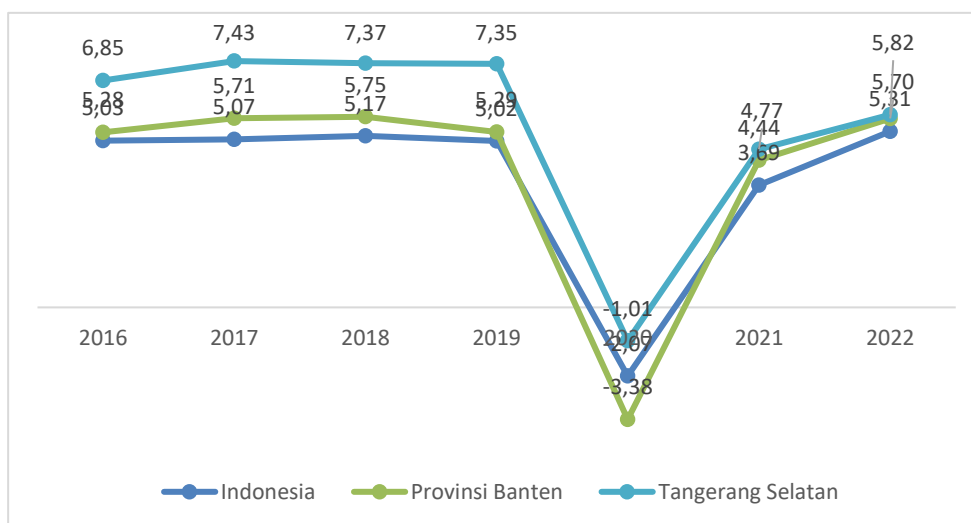
a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perekonomian Kota Tangerang Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,82%. Pertumbuhan positif tersebut disebabkan karena pertumbuhan yang cukup signifikan pada sebagian besar lapangan usaha yang merupakan sektor basis yang menopang perekonomian Kota Tangerang Selatan, sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.2. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa ekonomi Kota Tangerang Selatan mengalami pemulihan pasca dilanda pandemi covid 19 pada tahun 2020-2021. Faktor pendorong pemulihan ekonomi tersebut adalah dicabutnya status pembatasan kegiatan masyarakat dan mulai terbentuknya kekebalan komunitas terhadap virus covid-19 seiring dengan capaian pelaksanaan vaksin booster ke-2 di Kota Tangerang Selatan. Tiga sektor basis dengan pertumbuhan yang tertinggi yaitu sektor lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,78%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,25% dan sektor Jasa Perusahaan sebesar 7,03%. Jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Banten, pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Banten, sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.1. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, LPE Kota Tangerang Selatan mencatatkan posisi tertinggi kedua setelah LPE Kota Tangerang, sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.2.

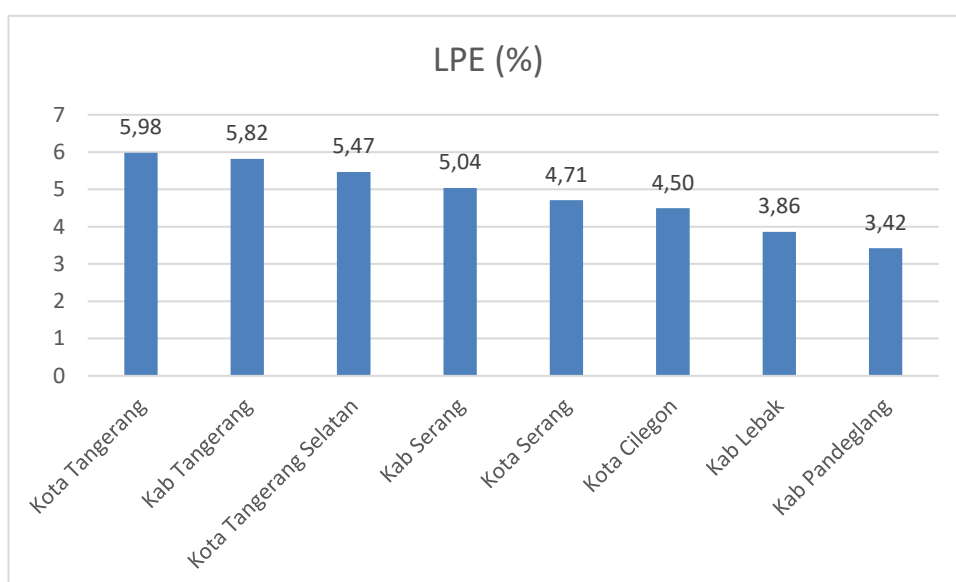
Tabel 2.2. PDRB ADHK Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 s.d Triwulan II Tahun 2023

Kategori	Uraian Lapangan Usaha	PDRB (miliar rupiah)	PDRB (miliar rupiah)	Pertumbuhan	LQ	Potensi Sektoral
		2021	2022			
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	115,72	117,78	1,78%	0,03	Non-Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0,00%	-	0
C	Industri Pengolahan	4649,36	5037,7	8,35%	0,23	Non Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	58,74	64,88	10,45%	0,10	Non-Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31,97	33,01	3,25%	0,48	Non Basis
F	Konstruksi	8847,75	9384,8	6,07%	1,32	Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9822,62	10535	7,25%	1,19	Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	1919,89	2039,5	6,23%	0,59	Non Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1782,65	1939,1	8,78%	1,16	Basis
J	Informasi dan Komunikasi	11288,91	12040	6,65%	2,66	Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	841,8	843,68	0,22%	0,43	Non Basis
L	Real Estate	11794,74	12504	6,01%	2,05	Basis
M,N	Jasa Perusahaan	1904,29	2038,2	7,03%	3,12	Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	579,93	622,55	7,35%	0,55	Non Basis
P	Jasa Pendidikan	4301,99	4250,8	-1,19%	2,24	Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2861,33	2888,5	0,95%	3,11	Basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	1591,42	1682,8	5,74%	1,72	Basis
	JUMLAH	62393,11	66022	5,82%		

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023



Gambar 2.1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2022
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2023



Gambar 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten s/d Triwulan II Tahun 2023
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

b. Inflasi

Sehubungan dengan Kota Tangerang Selatan bukan merupakan kota IHK di Provinsi Banten, tingkat inflasi di Kota Tangerang Selatan dihitung berbasis inflasi Kota Depok. Tingkat inflasi di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022 (YoY) adalah sebesar 6,62%. Salah satu penyebab peningkatan inflasi di Kota Tangerang Selatan yaitu adanya peningkatan permintaan barang dan jasa,

namun belum diimbangi dengan ketersediaan barang dan jasa untuk memenuhi seluruh permintaan. Peningkatan permintaan tersebut merupakan dampak dari menggeliatnya aktivitas perekonomian di Kota Tangerang Selatan pasca pandemi covid 19, yang dibuktikan dengan peningkatan LPE tahun 2022 menjadi sebesar 5,82%. Berdasarkan hukum ekonomi, pada saat permintaan tinggi namun ketersediaan terbatas maka akan berakibat pada kenaikan harga. Tantangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait kenaikan tingkat inflasi adalah menjaga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki daya beli dan mendorong agar peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan peningkatan tingkat inflasi.

Berdasarkan data BPS Kota Tangerang Selatan, terdapat 3 (tiga) kelompok dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi pada bulan Desember 2022 yaitu Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,14%, Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,06%, dan Kelompok kesehatan sebesar 0,03%. Andil terkait kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran serta kelompok makanan, minuman dan tembakau disebabkan karena dampak penyesuaian harga subsidi bahan bakar yang mempengaruhi biaya operasional produksi sehingga pelaku usaha menaikkan harga jual untuk menjaga margin keuntungan. Data andil kelompok pengeluaran terhadap tingkat inflasi di Kota Tangerang Selatan tahun 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.3. IHK dan Tingkat Inflasi Kota Tangerang Selatan Desember 2022, Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2021	IHK Desember 2021	IHK Desember 2022	Tingkat Inflasi ¹⁾ Desember 2022 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 ³⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ⁴⁾ (%)	Andil Inflasi Desember 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	107,61	107,61	114,73	0,15	6,62	6,62	0,15
Makanan, Minuman, dan Tembakau	112,64	112,64	117,35	0,24	4,19	4,19	0,06
Pakaian dan Alas Kaki	108,74	108,74	128,21	-0,41	17,91	17,91	-0,02
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,59	102,59	104,69	0,00	2,04	2,04	0,00
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	113,10	113,10	122,48	-0,40	8,29	8,29	-0,02
Kesehatan	104,05	104,05	122,00	0,92	17,25	17,25	0,03
Transportasi	102,99	102,99	109,40	0,00	6,22	6,22	0,00
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,15	99,15	106,79	0,07	7,70	7,70	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	106,51	106,51	116,09	0,00	8,99	8,99	0,00
Pendidikan	109,15	109,15	110,40	0,00	1,15	1,15	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	113,17	113,17	130,85	1,49	15,63	15,63	0,14
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	111,84	111,84	123,81	-0,61	10,71	10,71	-0,03

Keterangan: ¹⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK November 2022.
²⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK Desember 2021.
³⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK Desember 2021.

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Mulai tahun 2023 untuk pengendalian harga di Kota Tangerang Selatan tidak lagi menggunakan indikator inflasi karena Kota Tangerang Selatan bukan merupakan kota IHK. Sebagai pengganti indikator inflasi, digunakan Indeks Perkembangan Harga sebagaimana disajikan dalam tabel dan gambar dibawah ini.

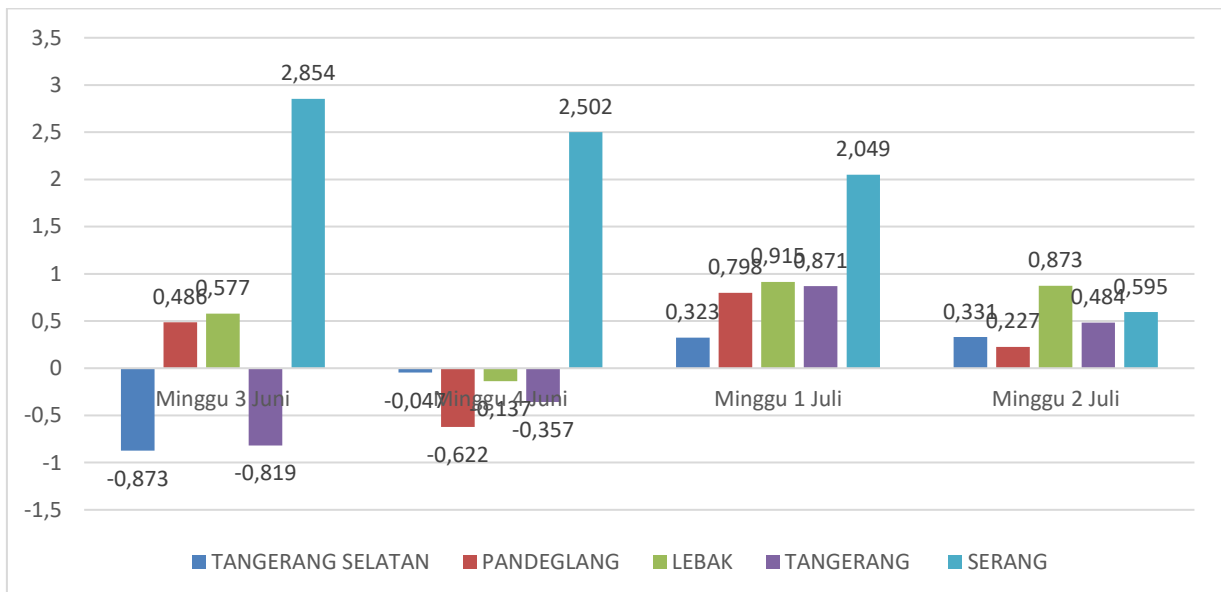
Tabel 2.4. Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Tangerang Selatan dan Kab/Kota di Provinsi Banten Periode Minggu ke-3 Juni s.d Minggu ke-2 Juli Tahun 2023

Kota/Kab	Bulan	Minggu	Perubahan indikator Perubahan Harga (%)	Komoditas Andil Perubahan Harga	Fluktuasi Harga Tertinggi	
TANGERANG SELATAN	Juni	3	-0,873	JERUK(-0.899);CABAI MERAH(-0.6);BAWANG MERAH(-0.19	PISANG	0,033269
PANDEGLANG	Juni	3	0,486	CABAI MERAH(0.394);CABAI RAWIT(0.239);BAWANG PUTIH(0.15	BAWANG PUTI	0,134568

Kota/Kab	Bulan	Minggu	Perubahan indikator Perubahan Harga (%)	Komoditas Andil Perubahan Harga	Fluktuasi Harga Tertinggi	
LEBAK	Juni	3	0,577	DAGING AYAM RAS(0.516);BERAS(0.358);BAWANG MERAH(0	CABAI RAWIT	0,07561
TANGERANG	Juni	3	-0,819	DAGING AYAM RAS(-0.478);BAWANG MERAH(-0.404);CABAI MERA	CABAI MERAH	0,101759
SERANG	Juni	3	2,854	DAGING AYAM RAS(1.047);JERUK(0.951);TELUR AYAM RAS(0.546)	TELUR AYAM RAS	0,09138
TANGERANG SELATAN	Juni	4	-0,047	JERUK(-0.753);CABAI MERAH(-0.085);BAWANG MERAH(-0.077)	JERUK	0,114666
PANDEGLANG	Juni	4	-0,622	DAGING SAPI(-0.933);TELUR AYAM RAS(-0.146);PISANG(-0.01	BAWANG PUTIH	0,131761
LEBAK	Juni	4	-0,137	UDANG BASAH(-0.873);MINYAK GORENG(-0.07);DAGING SAPI(-0.042)	CABAI RAWIT	0,082669
TANGERANG	Juni	4	-0,357	UDANG BASAH(-0.272);BAWANG MERAH(-0.16);DAGING AYAM RAS(-0.108	CABAI MERAH	0,123788
SERANG	Juni	4	2,502	DAGING AYAM RAS(0.679);JERUK(0.653);UDANG BASAH	CABAI MERAH	0,099945
TANGERANG SELATAN	Juli	1	0,323	DAGING AYAM RAS(0.266);CABAI MERAH(0.193);DAGING SAPI(0.1	CABAI MERAH	0.045634
PANDEGLANG	Juli	1	0,798	DAGING AYAM RAS(0.569);CABAI MERAH(0.193);BAWANG PUTIH	CABAI RAWIT	0.0556702
LEBAK	Juli	1	0,915	DAGING AYAM RAS(0.609);BAWANG PUTIH(0.217);BERAS(0.16)	CABAI RAWIT	0.1335909
TANGERANG	Juli	1	0,871	DAGING AYAM RAS(0.639);CABAI MERAH(0.305);MINYAK GORENG	CABAI RAWIT	0.062113
SERANG	Juli	1	2,049	DAGING AYAM RAS(0.764);UDANG BASAH(0.649);BERAS(0.551	CABAI MERAH	0.0270492

Kota/Kab	Bulan	Minggu	Perubahan indikator Perubahan Harga (%)	Komoditas Andil Perubahan Harga	Fluktuasi Harga Tertinggi	
TANGERANG SELATAN	Juli	2	0,331	DAGING AYAM RAS(0.266);DAGING SAPI(0.17);CABAI MERAH(0.168)	BAWANG MERAH	0.0537195
PANDEGLANG	Juli	2	0,227	DAGING AYAM RAS(0.509);BAWANG PUTIH(0.205);CABAI RAWIT(0.102)	CABAI MERAH	0.1970291
LEBAK	Juli	2	0,873	DAGING AYAM RAS(0.538);BERAS(0.275);BAWANG PUTIH(0.192)	CABAI RAWIT	0.0883866
TANGERANG	Juli	2	0,484	DAGING AYAM RAS(0.639);CABAI MERAH(0.227);MINYAK GORENG(0.025)	CABAI RAWIT	0.171461
SERANG	Juli	2	0,595	DAGING AYAM RAS(0.57);UDANG BASAH(0.314);BERAS(0.166)	CABAI MERAH	0.1087857

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2023



Gambar 2.3. Perbandingan IPH antara Kota Tangerang Selatan dengan Kab/Kota di Provinsi Banten Periode Minggu ke-3 Juni s.d Minggu ke-2 Juli Tahun 2023
 Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada bulan Juli sampai dengan minggu kedua terdapat kenaikan harga pada komoditas daging ayam ras, cabai merah dan daging sapi. Jika dilihat dari perbandingan IPH dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.2, kenaikan harga komoditas di Kota Tangerang Selatan relatif lebih kecil. Sebagai daerah konsumen diharapkan IPH mengalami tren penurunan sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat miskin dan MBR.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Tangerang Selatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 tercatat sebesar 6,59%. Berdasarkan data perkembangan ketenagakerjaan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.5 terdapat penurunan jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya penduduk usia kerja yang memilih melanjutkan jenjang pendidikan dibandingkan bekerja, yang tergambar dari kenaikan rata-rata lama sekolah tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.6.

Tabel 2.5. Perkembangan Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 s.d Triwulan II Tahun 2023

No.	Indikator Pembangunan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Jumlah Angkatan Kerja	832.423	852.435	817.237
2	Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga dan Lainnya)	499.568	510.056	575.698
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62.49	62.56	58,67
4	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	8.48	8.60	6,59
5	Rasio penduduk yang bekerja	91.52	91.40	93,41

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Tabel 2.6. Nilai RLS di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 s.d Triwulan II Tahun 2023

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RLS Kota	11.58	11.77	11.78	11.80	11.81	11.82	11,84

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan. 2023

Berdasarkan data perkembangan pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Tangerang Selatan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.7, terlihat bahwa persentase tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SMA umum. Hal ini dapat menggambarkan bahwa lulusan SMA Umum belum dapat bersaing dengan SMA Kejuruan. Selain itu, adanya pengangguran lulusan universitas sebesar 23,27%, dapat menggambarkan perlu adanya intervensi dari Pemerintah Provinsi Banten untuk mengadakan pendidikan vokasi yang sinkron dengan kebutuhan pasar kerja.

Tabel 2.7. Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 s.d Triwulan II Tahun 2023

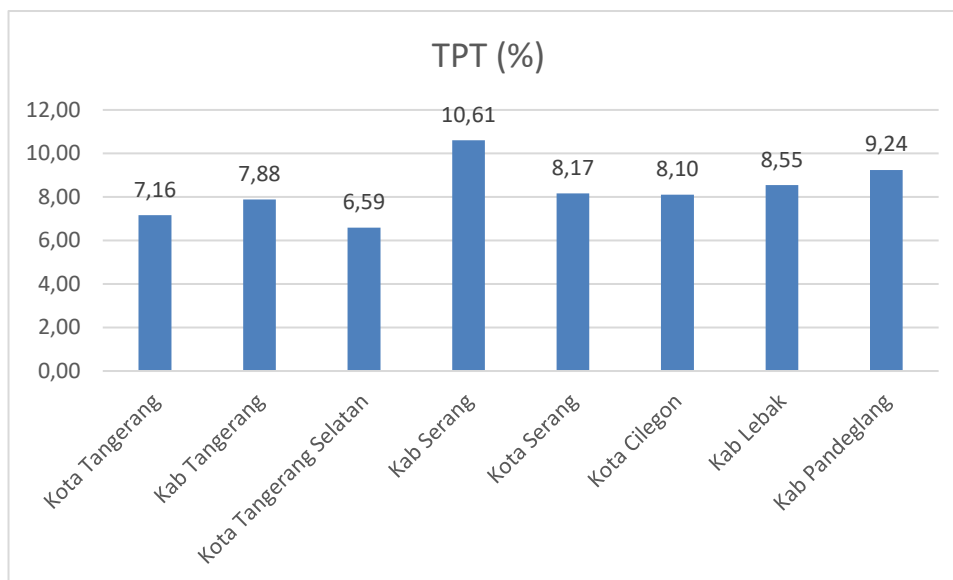
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	2020	2021	2022
<= Sekolah Dasar	4,84	5,05	0,83
SLTP	8,12	11,38	8,47
SMA Umum	29,01	45,58	36,61
SMA Kejuruan	29,88	22,21	29,48
Diploma I/II/III	7,96	1,99	1,34
Universitas	20,20	13,79	23,27
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Salah satu upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran, adalah dengan memfasilitasi para pencari kerja melalui program 3D, yaitu Dilatih, Disertifikasi dan Ditempatkan. Tantangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan program 3D tersebut adalah sinkronisasi antara kompetensi pelatihan yang diberikan

dengan kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja sehingga tenaga kerja hasil pelatihan dapat terserap optimal.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Tangerang Selatan paling rendah, sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten s/d Triwulan II Tahun 2023

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

d. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 2,5% atau 44,29 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Kota Tangerang Selatan dapat diturunkan sebesar 0,03% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 2,57%. Walaupun penurunan tingkat kemiskinan tahun 2022 kurang dari 1% namun Pemerintah Kota Tangerang Selatan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dari 2,29% menjadi 0,26%. Hal tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022

tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024, melalui program pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan perumahan bagi masyarakat miskin. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan melalui pelatihan keterampilan dan tenaga kerja dengan metode 3D (Dilatih, Disertifikasi, Disalurkan) dan pemberdayaan melalui UMKM serta usaha ekonomi kreatif. Dalam hal meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengupayakan program pembangunan/rehabilitasi kawasan kumuh dan bedah rumah tidak layak huni. Perkembangan kondisi kemiskinan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 s.d Triwulan II Tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.8. Kondisi Kemiskinan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 s.d Triwulan II Tahun 2023

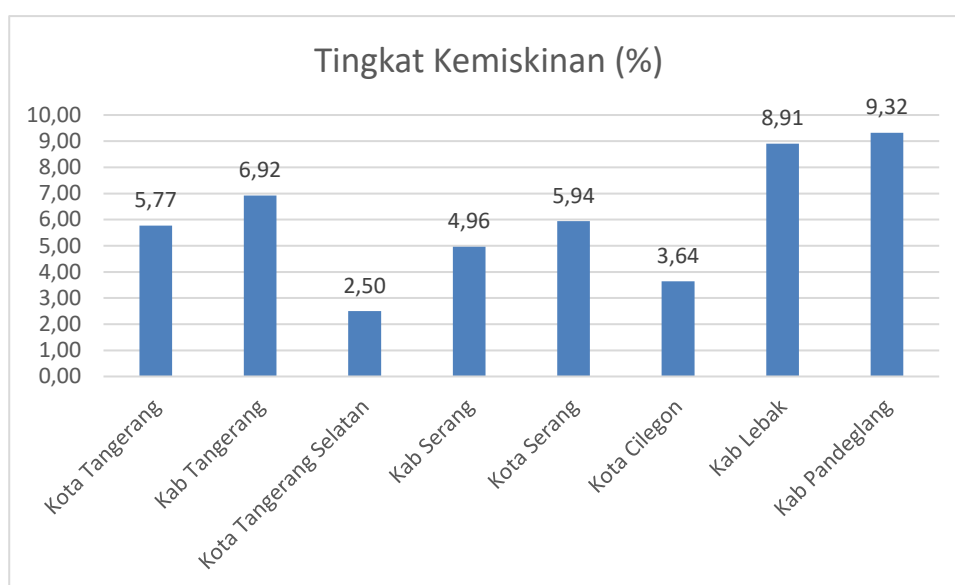
Kondisi Kemiskinan	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	643.083	665.610	712.717
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	97,71	97,43	97,50
Persentase Penduduk Miskin (P0)	2,29	2,57	2,50
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,31	0,34	0,32
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,08	0,07	0,07
40% penduduk berpengeluaran terbawah (pemerataan pendapatan versi Bank Dunia)	18,25	18,60	18,77

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Dari data dalam Tabel diatas, terlihat bahwa walaupun garis kemiskinan Kota Tangerang Selatan tahun 2022 mengalami kenaikan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat menjaga tingkat kemiskinan tidak mengalami kenaikan. Kondisi keparahan kemiskinan di Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang digambarkan oleh penurunan indeks kedalaman kemiskinan dari 0,34 menjadi 0,32. Berdasarkan indeks keparahan kemiskinan tahun 2022 sebesar 0,07, kondisi ketimpangan antar penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan tidak

signifikan. Jika dibandingkan dengan target tingkat kemiskinan tahun 2023, perlu adanya upaya percepatan penanganan kemiskinan dimulai dengan pemaduserasian data sasaran masyarakat miskin dan mengoptimalkan kerjasama lintas sektoral dalam pelaksanaan program-program yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.

Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan tercatat paling rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.5.

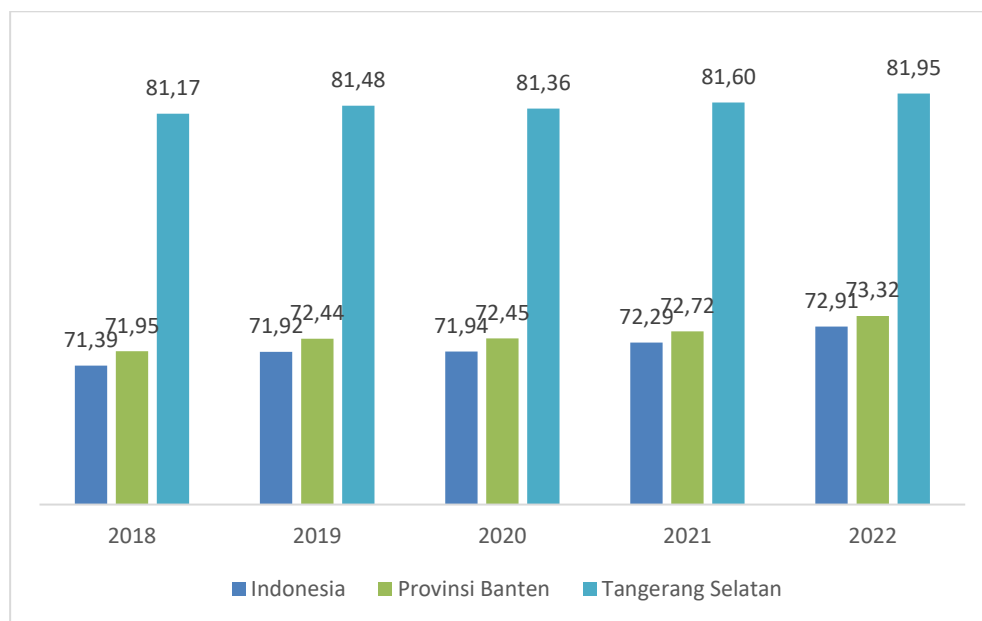


Gambar 2.5. Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten s/d Triwulan II Tahun 2023
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

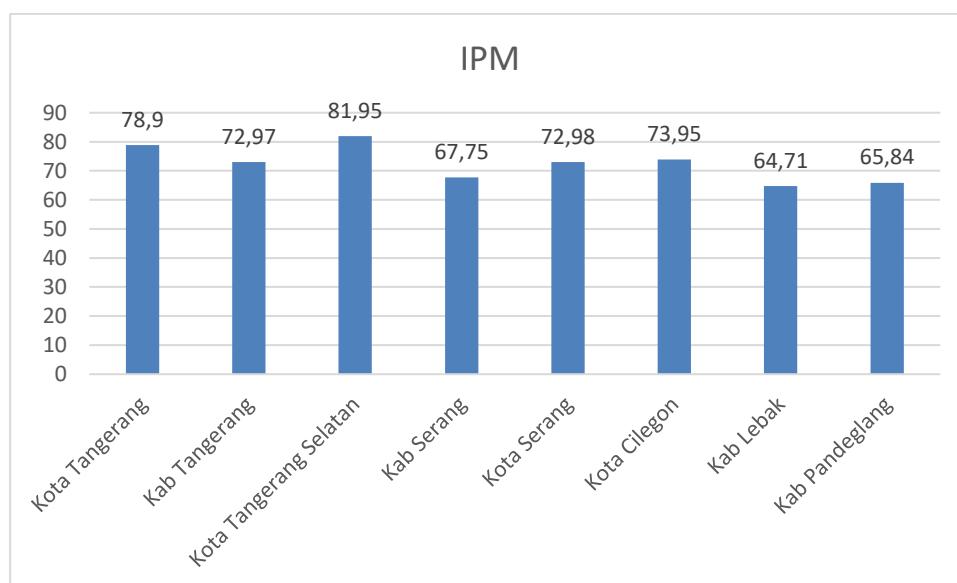
e. IPM

Indeks Pembangunan Manusia Kota Tangerang Selatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 tercatat sebesar 81,95 poin. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023, capaian IPM sudah melampaui target. Perkembangan IPM Kota Tangerang Selatan dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan, yaitu dari 81,17 menjadi 81,95 poin, dan mencatatkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten dan Nasional sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.6. Walaupun pertumbuhan kenaikan IPM Kota Tangerang Selatan tidak tinggi namun nilai IPM Kota

Tangerang Selatan merupakan nilai tertinggi di Provinsi Banten, sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.7. Laju pertumbuhan IPM yang kecil disebabkan karena IPM Kota Tangerang Selatan sudah termasuk dalam kategori sangat tinggi (IPM>80).



Gambar 2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja IPM Kota Tangerang Selatan dengan Realisasi Nasional Tahun 2018-2022
 Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2023



Gambar 2.7. Kinerja IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten s/d Triwulan II Tahun 2023
 Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Andil tertinggi terhadap kenaikan IPM Kota Tangerang Selatan adalah kenaikan pada komponen indeks pendidikan yang mencatatkan peningkatan sebesar 0,12%, disusul oleh kenaikan komponen indeks pengeluaran dan indeks kesehatan masing-masing sebesar 0,02% dan 0,01%. Peluang peningkatan IPM Kota Tangerang Selatan secara signifikan dapat dicapai melalui peningkatan indeks pengeluaran melalui peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat maka akan berdampak terhadap kemampuan masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas sehingga akan meningkatkan pertumbuhan indeks pendidikan dan kesehatan. Karakteristik komponen IPM di Kota Tangerang Selatan disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.9. Karakteristik IPM di Kota Tangerang Selatan tahun 2021 s.d Triwulan II Tahun 2023

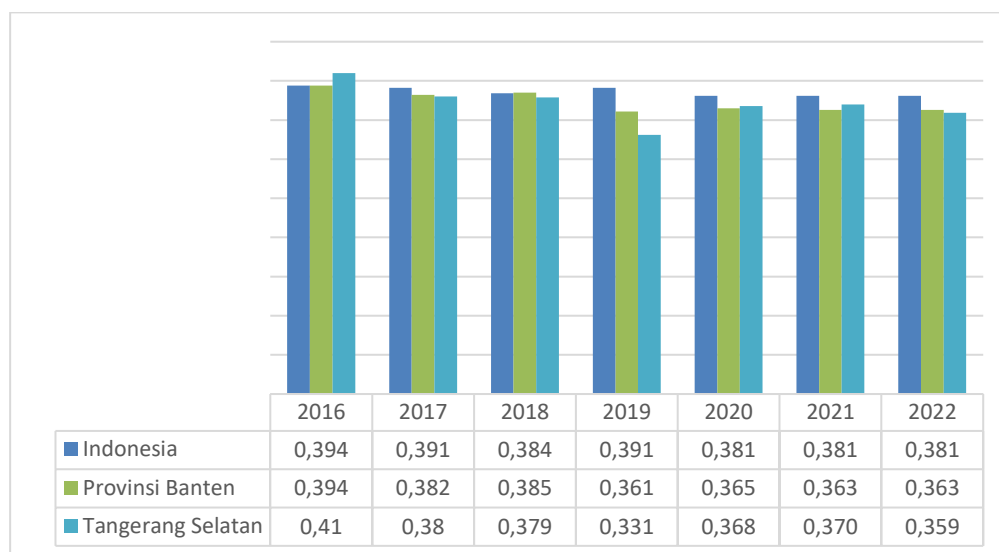
Komponen Pembentuk IPM	2021	2022	Pertumbuhan
Indeks Kesehatan	0,807	0,812	0,01%
Indeks Pendidikan	80,122	80,220	0,12%
Indeks Pengeluaran	0,577	0,586	0,02%

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

f. Indeks Gini

Sampai dengan triwulan II Tahun 2023, Indeks Gini Kota Tangerang Selatan sebesar 0,359. Angka ini menurun 0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2021 yang sebesar 0,370. Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menselaraskan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dengan penurunan tingkat ketimpangan sehingga peningkatan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat terutama masyarakat miskin dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Upaya penurunan tingkat ketimpangan tersebut akan dilakukan melalui upaya meningkatkan pendapatan masyarakat kelompok bawah dan menengah dengan rencana kerja berupa fasilitasi kesempatan berusaha, fasilitasi akses lapangan pekerjaan,

penciptaan lapangan pekerjaan melalui UMKM dan usaha ekonomi kreatif serta upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin antara lain melalui pemberian bantuan sosial, beasiswa pendidikan, akses kesehatan jemput bola dengan program ngider sehat dan bazaar sembako murah. Perkembangan Indeks Gini Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2022 dan perbandingannya dengan Provinsi Banten dan Nasional disajikan dalam Gambar berikut.



Gambar 2.8. Perbandingan Indeks Gini Kota Tangerang Selatan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 s.d Triwulan II Tahun 2023

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

2.1.2. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Mengacu pada RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, terdapat 5 (lima) indikator kinerja tujuan untuk mewujudkan misi dan terdapat 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sasaran untuk mewujudkan tujuan. Standar penilaian kriteria kinerja dianalisis berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.10. Capaian indikator kinerja utama merupakan capaian tahunan yang hasilnya baru dapat tergambar paling cepat pada triwulan IV tahun 2023 atau paling lambat pada bulan Januari tahun 2024, sehingga capaian indikator kinerja utama s.d triwulan II tahun 2023 dievaluasi berdasarkan capaian pada tahun 2022, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.11 dan tabel 2.12

Tabel 2.10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

Tabel 2.11. Capaian Indikator Kinerja Utama s.d Triwulan II Tahun 2023

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi			Target 2023 RKPD	Capaian (%)	Kriteria Kinerja	Keterangan
					2021	2022	s.d TW II 2023				
1	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG UNGGUL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan	Indek Pembangunan Manusia	81,95	81,95	81,95	81,81	100,17	Sangat Tinggi	Perlu reformulasi Target
				Indeks Pendidikan	80,22	80,22	80,22	80,44	99,73	Sangat Tinggi	
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	72,78	72,78	72,78	72,56	100,30	Sangat Tinggi	Perlu reformulasi Target
			Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Predikat)	Baik	Baik	Baik	Baik	100,00	Sangat Tinggi	
			Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	53,43	53,43	53,43	53,4	100,06	Sangat Tinggi	Perlu reformulasi Target
			Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender	93,96	93,96	93,96	93,58	100,41	Sangat Tinggi	Perlu reformulasi Target
				Indeks Pemberdayaan Gender	73,08	72,67	73,08	73,85	98,96	Sangat Tinggi	
2	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG SALING TERKONEKSI	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi	Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,75	5,75	5,75	5,4	106,48	Sangat Tinggi	
				Rasio konektivitas Kota	0,63	0,63	0,63	0,59	106,78	Sangat Tinggi	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi			Target 2023 RKPD	Capaian (%)	Kriteria Kinerja	Keterangan
					2021	2022	s.d TW II 2023				
				Kinerja Lalulintas/ Transportasi Kota (V/C Ratio)	0,54	0,54	0,54	0,52	96,15	Sangat Tinggi	
3	MEMBANGUN KOTA YANG LESTARI	Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks kota layak huni	68,84	68,84	68,84	65,5 - 66,3	100,00	Sangat Tinggi	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,66	56,66	56,66	51,9	100,00	Sangat Tinggi	
				Persentase permukiman layak huni (Persen)	99,25%	99,25%	99,25%	99,37%	99,88	Sangat Tinggi	
				Cakupan Pengelolaan Sampah (Persen)	90,73%	90,73%	90,73%	93,00%	97,56	Sangat Tinggi	
				Ruang Terbuka Hijau Publik (Persen)	4,30%	4,30%	4,30%	4,31%	99,77	Sangat Tinggi	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan	Indeks Rasa Aman (Predikat)	Aman (66,69)	Aman (66,69)	Aman (66,69)	Aman	100,00	Sangat Tinggi	
			Indeks Demokrasi (Predikat)	Baik (81)	Baik (81)	Baik (81)	Sedang	100,00	Sangat Tinggi	Perlu reformulasi Target	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi			Target 2023 RKPD	Capaian (%)	Kriteria Kinerja	Keterangan
					2021	2022	s.d TW II 2023				
			Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	Indeks resiko bencana (Predikat)	Sedang (79,86)	Sedang (79,86)	Sedang (79,86)	Rendah (70)	85,91	Tinggi	
4	MENINGKATKAN EKONOMI BERBASIS NILAI TAMBAH TINGGI DI SEKTOR EKONOMI KREATIF	Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	Indeks Daya Saing Daerah (Predikat)	Tinggi (3,71)	Tinggi (3,71)	Tinggi (3,71)	Sedang	100,00	Sangat Tinggi	Perlu reformulasi Target
				Nilai sektor ekonomi kreatif (Triliun Rupiah)	7,8	7,8	7,8	8,72	89,45	Tinggi	
			Meningkatnya Investasi	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	4,65	4,65	4,65	4,66	99,79	Sangat Tinggi	
			Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Produktifitas tenaga kerja per total output (Rupiah)	81692100	81.692.100	81.692.100	85.289.742	95,78	Sangat Tinggi	
				Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa (Rupiah)	70.982.071	70.982.071	70.982.071	87.022.906	81,57	Tinggi	
5	MEMBANGUN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	66	65,61	65,61	66	99,41	Sangat Tinggi	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (66,92)	B (66,92)	B (66,92)	BB (71)	94,25	Sangat Tinggi	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi			Target 2023 RKPD	Capaian (%)	Kriteria Kinerja	Keterangan
					2021	2022	s.d TW II 2023				
				Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	N/A	N/A	N/A	3,8	-	-	
				Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi	
				Indeks Persepsi Korupsi	73,32	73,32	73,32	83	88,34	Tinggi	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	83,5	83,5	84	99,40	Sangat Tinggi	

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

Tabel 2.12. Pencapaian Indikator Kinerja Utama s.d Triwulan II Tahun 2023

Interval Nilai	Jumlah Indikator	Kriteria Capaian Kinerja	Nilai Capaian Kinerja	Skala intensitas kinerja
91% ≤ 100%	24	Sangat tinggi	85,71%	telah memenuhi target
76% ≤ 90%	4	Tinggi	14,29%	telah memenuhi target
66% ≤ 75%	-	Sedang	0,00%	memenuhi persyaratan minimal
51% ≤ 65%	-	Rendah	0,00%	belum memenuhi
≤ 50%	-	Sangat Rendah	0,00%	belum memenuhi
Total Indikator	28	-	-	-
Rata-rata Capaian IKU				97,53% Kategori Sangat Tinggi

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

*) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Tim Daerah Provinsi untuk masing-masing kabupaten/kota dapat diketahui 9 (Sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (TA 2023). Hal ini berdasarkan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 29.

Berdasarkan hasil evaluasi dalam tabel diatas realisasi kinerja pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d triwulan II tahun 2023 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Terdapat 1 nilai IKU yang sudah tidak dilakukan penilaian, yaitu nilai evaluasi penyelenggaran pemerintah daerah, dikarenakan adanya perubahan aturan dari Kemenpan RB. Jika disandingkan dengan target IKU tahun 2023 terdapat 6 indikator kinerja utama yang perlu direformulasi, yaitu:

- a. Indek Pembangunan Manusia
- b. Angka Harapan Hidup
- c. Indeks Pembangunan Pemuda
- d. Indeks Pembangunan Gender
- e. Indeks Demokrasi
- f. Indeks Daya Saing Daerah

2.1.3. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan merupakan indikator keberhasilan masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai urusan penyelenggaraan pemerintahan yang diampunya. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan dapat menjadi indikator kinerja kunci untuk mencapai target indikator kinerja utama. Mengacu pada RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, terdapat 116 indikator kinerja urusan penyelenggaraan daerah, dengan gambaran hasil capaian sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.13. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan s.d Triwulan II Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria Kinerja
1	2	3	5	5	6	7	8
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
	Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga Tangerang Selatan usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM)	Persen	96,85%	96,85%	98,58%	98,25%	Sangat Tinggi
2	Tingkat partisipasi warga Tangerang Selatan usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (APM)	Persen	86,11%	86,11%	88,22%	97,61%	Sangat Tinggi
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	1,67%	1,67%	1,80%	92,78%	Sangat Tinggi
4	Persentase sekolah dengan hasil assesment nasional berbasis komputer di atas rata-rata Provinsi Banten	Persen	N/A	N/A	86,41%	N/A	
	Kesehatan						
5	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	92%	92%	100%	92,00%	Sangat Tinggi
6	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	92%	92%	100%	92,00%	Sangat Tinggi
7	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	94%	94%	100%	94,00%	Sangat Tinggi

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria Kinerja
1	2	3	5	5	6	7	8
8	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	93%	93%	100%	93,00%	Sangat Tinggi
9	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
10	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai dengan standar minimal 1 kali yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu satu tahun	Persen	92%	92%	100%	92,00%	Sangat Tinggi
11	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Nilai	36,7	36,7	31,88	84,88%	Tinggi
12	Angka Kematian Bayi per 1.000 Klahiran Hidup	Nilai	0,03	0,03	0,79	196,20%	Sangat Tinggi
13	Prevalensi Stunting Balita	Nilai	9	9	14,45	137,72%	Sangat Tinggi
14	Prevalensi Kurang Energi Kronis Pada Ibu Hamil	Nilai	3,8	3,8	3,92	103,06%	Sangat Tinggi
15	Prevalensi obesitas sentral	Nilai	40,5	40,5	37	90,54%	Tinggi
16	Prevalensi balita gizi buruk	Nilai	0,039	0,039	0,04	102,5%	Sangat Tinggi
17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Nilai	86,90%	86,90%	84%	103,45%	Sangat Tinggi
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
18	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	Persen	44,05%	44,05%	46,01%	95,74%	Sangat Tinggi
19	Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik	Persen	93,71%	93,71%	76,80%	122,02%	Sangat Tinggi

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria Kinerja
1	2	3	5	5	6	7	8
20	Persentase jalan (termasuk simpang dan jembatan) yang dilebarkan	Persen	52,04%	52,04%	82,23%	63,29%	Rendah
21	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	17,33%	17,33%	24%	72,21%	Sedang
22	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	36,60%	36,60%	44,55%	82,15%	Tinggi
23	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persen	86,49%	86,49%	100%	86,49%	Tinggi
24	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	Persen	95,82%	95,82%	100%	95,82%	Sangat Tinggi
25	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik	Persen	50,26%	50,26%	60,32%	83,32%	Tinggi
	Perumahan Rakyat						
26	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100%	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
27	Persentase jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani	Persen	0,76%	0,76%	0,70%	108,57%	Sangat Tinggi
28	Cakupan lingkungan perumahan yang PSU-nya diserahkan ke pemerintah daerah (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	59,44%	59,44%	73,90%	80,43%	Tinggi
	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria Kinerja
1	2	3	5	5	6	7	8
29	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100%	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
30	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100%	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
31	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)	100%	100,00%	Sangat Tinggi
32	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100,00% (318.449 jiwa)	100,00% (318.449 jiwa)	100%	100,00%	Sangat Tinggi
33	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		318.449	318.449	318.449	100,00%	Sangat Tinggi
34	Meningkatnya cakupan layanan penanganan Kebakaran kabupaten/kota	Persen	26,41%	26,41%	30,79%	85,77%	Tinggi
	Sosial						
35	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100%	100%	100,00%	100,00%	Sangat Tinggi

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria Kinerja
1	2	3	5	5	6	7	8
36	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100%	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
37	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	KK	5	5	5	100,00%	Sangat Tinggi
38	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar yang tertangani dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terverifikasi dan tervalidasi	Persen	100%	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
39	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100,00%	100,00%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
40	Cakupan TMP yang terkelola	TMP	1	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	Tenaga Kerja						
41	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100%	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
42	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	34%	34%	13%	261,54%	Sangat Tinggi
43	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	Persen	33%	33%	10%	330,00%	Sangat Tinggi
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria Kinerja
1	2	3	5	5	6	7	8
44	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk perempuan	Persen	29,36	29,36	12,7	-31,18%	Sangat Rendah
45	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Persen	30%	30%	32%	93,75%	Sangat Tinggi
46	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	91,40%	91,40%	91,69%	99,68%	Sangat Tinggi
47	Rasio kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 10.000 anak	Persen	0,04	0,04	4,18	199,04%	Sangat Tinggi
48	Peringkat Kota Layak Anak (KLA) Pangan	Kategori	Nindya	Nindya	Nindya	100,00%	Sangat Tinggi
49	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras sesuai kebutuhan)	Persen	27,40%	27,40%	41,34%	66,28%	Sedang
50	Rata-rata konsumsi energi per kapita (kkal/kapita/hari)		2031	2031	2200	92,32%	Sangat Tinggi
51	Rata-rata konsumsi protein per kapita (gr/kapita/hari)		64,6	64,6	57	113,33%	Sangat Tinggi
	Pertanahan						
52	Persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk	Persen	100,00%	100,00%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
	Lingkungan Hidup						
53	Cakupan Pengelolaan Sampah	Persen	90,73%	90,73%	93,00%	97,56%	Sangat Tinggi

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria Kinerja
1	2	3	5	5	6	7	8
54	Pengurangan ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota.	Persen	16%	16%	12%	66,67%	Sedang
55	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) / Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	36,62	36,62	45,39	80,68%	Tinggi
56	Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	66	66	47,2	139,83%	Sangat Tinggi
		Indeks	68,58	68,58	65,31	105,01%	Sangat Tinggi
57	Cakupan lembaga masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	Persen	100%	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
58	Kebijakan/Rencana/Program Strategis Kota yang terintegrasi dg RPPLH dan/atau KLHS	Persen	100%	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
59	Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persen	100%	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
60	Cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sampai dinyatakan selesai	Persen	100%	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
61	Persentase Penduduk Memiliki KTP	Persen	99,26%	99,26%	93,16%	106,55%	Sangat Tinggi
62	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	Persen	46,50%	46,50%	61,83%	75,21%	Tinggi

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria Kinerja
1	2	3	5	5	6	7	8
63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	11	11	12	91,67%	Sangat Tinggi
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
64	Angka Kelahiran Total (TFR)	Kelahiran	2,08	2,08	2,06	99,03%	Sangat Tinggi
65	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	6,10%	6,10%	6,10%	100,00%	Sangat Tinggi
	Perhubungan						
66	Rasio Trayek yang dilayani	Persen	0,63	0,63	0,71	88,73%	Tinggi
67	Pengurangan titik kemacetan	Titik	38	38	37	97,30%	Sangat Tinggi
	Komunikasi dan Informatika						
68	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100%	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
69	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	100%	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
70	Indeks SPBE	Indeks	2,54	2,54	3,4	74,71%	Tinggi
71	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Kategori	91,38 (Informatif)	91,38 (Informatif)	94,4	96,80%	Sangat Tinggi

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria Kinerja
1	2	3	5	5	6	7	8
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
72	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	8%	8%	9%	88,89%	Tinggi
73	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi usaha kecil	Persen	2,48%	2,48%	2,50%	99,20%	Sangat Tinggi
	Penanaman Modal						
74	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)	Indeks	88,59%	88,59%	89%	99,54%	Sangat Tinggi
	Kepemudaan dan Olahraga						
75	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	2,74%	2,74%	1,20%	228,33%	Sangat Tinggi
76	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	11	11	5	220,00%	Sangat Tinggi
	Statistik						
77	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan daerah	Persen	100%	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
	Kebudayaan						
78	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	5,25	N/A	
	Perpustakaan						
79	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Kategori	Tinggi	Tinggi	sedang	100,00%	Sangat Tinggi

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria Kinerja
1	2	3	5	5	6	7	8
80	Literasi membaca penduduk Tangsel	Kategori	Sedag	Sedang	Sedang	100,00%	Sangat Tinggi
81	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Persen	8%	8%	9%	88,89%	Tinggi
82	Jumlah perpustakaan yang terakreditasi	Perpustakaan	4	4	4	100,00%	Sangat Tinggi
83	Persentase kecukupan koleksi perpustakaan per jumlah penduduk Tangerang Selatan	Persen	57%	57%	28%	203,57%	Sangat Tinggi
	Kearsipan						
84	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	50%	50%	53%	94,34%	Sangat Tinggi
85	Nilai kualitas pengelolaan kearsipan	Nilai	60,07	60,07	67	89,66%	Tinggi
	Urusan Pilihan						
	Kelautan dan perikanan						
86	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton	296,1	296,1	298	99,36%	Sangat Tinggi
	Pariwisata						
87	Tingkat hunian akomodasi	Persen	20%	20%	17,50%	114,29%	Sangat Tinggi
88	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	2,5	2,5	2,71	92,25%	Sangat Tinggi

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria Kinerja
1	2	3	5	5	6	7	8
89	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Miliar Rupiah)	Miliar Rupiah	386,76	386,76	274,03	141,14%	Sangat Tinggi
90	Jumlah wisatawan mancanegara (Orang)	Orang	20.500	20.500	9.792	209,35%	Sangat Tinggi
91	Jumlah wisatawan nusantara (Orang)	Orang	1.758.924	1.758.924	767.312	229,23%	Sangat Tinggi
	Pertanian						
92	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	13%	13%	10%	70,00%	Sedang
93	Produktivitas Pertanian (ton/ha)	Ton/Ha	42	42	12,5	336,00%	Sangat Tinggi
	Perdagangan						
94	Jumlah peningkatan produk IKM yang diperdagangkan dalam negeri	Produk	53	53	50	106,00%	Sangat Tinggi
95	Persentase pertumbuhan perdagangan luar negeri	Persen	11%	11%	10%	110,00%	Sangat Tinggi
96	Persentase harga bahan pokok dan bahan penting lainnya yang terkendali	Persen	97%	97%	100%	97,00%	Sangat Tinggi
	Perindustrian						
97	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Persen	20%	20%	20%	100,00%	Sangat Tinggi
98	Persentase peningkatan produk Industri Kecil Menengah (IKM)	Persen	10%	10%	10%	100,00%	Sangat Tinggi
	Urusan Penunjang						
	Perencanaan dan Keuangan						
99	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	100,00%	Sangat Tinggi

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria Kinerja
1	2	3	5	5	6	7	8
100	Nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota	Nilai	21,97	21,97	26	84,50%	Tinggi
101	Nilai Pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota	Nilai	16,51	16,51	20	82,55%	Tinggi
102	Nilai capaian Kinerja pada LHE SAKIP Kota	Nilai	12,19	12,19	16	76,19%	Tinggi
	Kepegawaian						
103	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	55,29	55,29	60	92,15%	Sangat Tinggi
	Transparansi dan Partisipasi Publik						
104	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100%	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
	Sekretariat Daerah						
105	Persentase Pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci	Persen	55%	55%	65%	84,62%	Tinggi
106	Presentase Kualitas Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persen	100%	100%	90%	111,11%	Sangat Tinggi
107	Terkendalinya inflasi daerah	Persen	6,72%	6,72%	2%-4%		
108	Capaian Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Persen	91,56%	91,56%	86,50%	105,85%	Sangat Tinggi
109	Predikat Kematangan Perangkat Daerah	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi
	Sekretariat DPRD						
110	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Persen	100%	100%	100%	100,00%	Sangat Tinggi

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria Kinerja
1	2	3	5	5	6	7	8
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						
	Inspektorat Daerah						
111	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,11	3,11	3	103,67%	Sangat Tinggi
	Unsur Kewilayahan						
	KECAMATAN						
112	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	83	83	84,57	98,14%	Sangat Tinggi
113	Persentase individu sampai tingkat kesejahteraan 40% (DTKS)	Persen	12%	12%	11,60%	103,45%	Sangat Tinggi
	Unsur Pemerintahan Umum						
	Kesatuan Bangsa dan Politik						
114	Jumlah kejadian/peristiwa konflik di masyarakat	Kejadian	8	8	10	100,00%	Sangat Tinggi
115	Jumlah Aspirasi Publik yang di sampaikan Oleh Masyarakat/Kelompok Masyarakat sesuai ketentuan	Aspirasi	N/A	N/A	385	N/A	
116	Rata Rata Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres		-	-	-	-	

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

Tabel 2.14. Penilaian Realisasi Kinerja Indikator Penyelenggaraan Urusan s.d Triwulan II Tahun 2023

Interval Nilai	Jumlah Indikator	Kriteria Realisasi Kinerja	Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Kinerja Realisasi
91% ≤ 100%	88	Sangat tinggi	75,86%	<i>telah memenuhi target</i>
76% ≤ 90%	18	Tinggi	15,52%	<i>telah memenuhi target</i>
66% ≤ 75%	4	Sedang	3,45%	<i>memenuhi persyaratan minimal</i>
51% ≤ 65%	1	Rendah	0,86%	<i>belum memenuhi</i>
≤ 50%	1	Sangat Rendah	0,86%	<i>belum memenuhi</i>
N/A	4	-	3,45%	
	116		100,00%	

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja penyelenggaraan urusan s.d triwulan II tahun 2023, sebanyak 88 indikator dengan kinerja sangat tinggi atau 75,86%, 18 indikator dengan kinerja tinggi atau 15,52%, 4 indikator dengan kinerja sedang atau 3,45%, 1 indikator dengan kinerja rendah atau 0,86%, 1 indikator dengan kinerja sangat rendah dan 4 indikator yang tidak dapat dinilai karena tidak tersedia data. Indikator dengan kinerja rendah dan sangat rendah yaitu Persentase jalan (termasuk simpang dan jembatan) yang dilebarkan dan Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk perempuan. Kinerja pelebaran jalan (termasuk simpang dan jembatan) tercatat rendah disebabkan karena harga lahan yang sangat tinggi sehingga proses pembebasan lahan terkendala ketersediaan anggaran. Upaya yang dilakukan terkait kendala tersebut adalah melakukan pembebasan secara bertahap, memprioritaskan pelebaran pada simpang dan segmen jalan yang masih memiliki lahan badan jalan yang bisa dioptimalkan. Sementara itu, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang tercatat merupakan fenomena gunung es, dimana selama ini kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan lebih sedikit daripada kasus yang terjadi. Dengan makin tingginya kesadaran perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kasus

kekerasan yang dialaminya, menyebabkan banyaknya kasus-kasus yang dilaporkan untuk mendapatkan penanganan. Upaya yang dilakukan untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kasus perdagangan manusia, yaitu pelayanan korban kasus kekerasan di UPTD PPA, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi perempuan secara ekonomi, dan meningkatkan upaya KIE untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun Indikator kinerja yang tidak tersedia datanya pada saat evaluasi yaitu 1) Persentase sekolah dengan hasil assesment nasional berbasis komputer di atas rata-rata Provinsi Banten, 2) Indeks pembangunan kebudayaan, 3) Jumlah Aspirasi Publik yang di sampaikan Oleh Masyarakat/Kelompok Masyarakat sesuai ketentuan. Indikator Rata Rata Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres pada tahun 2023 tidak dievaluasi karena belum memasuki tahapan pelaksanaan pilkada, pileg dan pilpres.

2.1.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam RKPD Tahun 2023 s.d Triwulan II

Rincian hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 s.d Triwulan II disajikan dalam Buku II Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 s.d triwulan II sebesar 32,37 %.

Evaluasi atas realisasi kinerja anggaran dalam kerangka pendanaan, belanja dan pembiayaan dari tahun 2020 s/d triwulan ke II tahun 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.15. Realisasi Kinerja Anggaran dalam Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s/d Triwulan II Tahun 2023

No	Uraian	ANGGARAN 2020		ANGGARAN 2021		ANGGARAN 2022		ANGGARAN 2023		CAPAIAN 2023 (%)	PERTUMBUHAN 2020-2021	PERTUMBUHAN 2021-2022	PERTUMBUHAN 2022-2023	PERTUMBUHAN 2021-2023
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI					
1	2	3	4	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18
4	PENDAPATAN DAERAH													
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.647.056.859.549	1.538.705.693.438	1.545.235.459.943	1.713.722.415.531	1.775.312.216.519	2.017.364.068.366	1.955.222.973.284	996.275.294.315	50,95	11,37%	17,72%	3,08%	41,86%
4.1.01	Pajak Daerah	1.416.114.600.000	1.345.141.128.042	1.322.570.820.355	1.523.112.291.755	1.538.240.466.671	1.794.849.627.807	1.680.800.000.000	894.732.430.813					
4.1.02	Retribusi Daerah	96.776.465.500	62.630.682.276	51.168.883.498	50.433.166.050	46.867.016.500	29.551.491.739	61.594.358.827	19.345.989.406					
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	731.439.035	731.439.035	735.000.000	771.586.632					
4.1.04	Lain - lain PAD yang Sah	134.165.794.049	130.933.883.120	171.495.756.090	140.176.957.726	189.473.294.313	192.231.509.785	212.093.614.457	81.425.287.464					
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	937.078.442.530	907.142.937.242	1.727.451.927.927	1.718.406.629.340	1.791.670.655.251	1.733.288.225.579	1.822.109.137.507	866.470.146.162	47,55	89,43%	0,87%	5,12%	49,58%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	937.078.442.530	907.142.937.242	1.006.174.834.394	1.017.221.382.692	1.106.889.918.393	1.049.765.930.091	1.199.607.936.445	497.007.316.539					
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	721.277.093.533	701.185.246.648	684.780.736.858	683.522.295.488	622.501.201.062	369.462.829.623					
4.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	709.373.652.053	558.667.834.798	124.672.261.080	124.677.218.360	-	-	-	-	0,00	-77,68%			

No	Uraian	ANGGARAN 2020		ANGGARAN 2021		ANGGARAN 2022		ANGGARAN 2023		CAPAIAN 2023 (%)	PERTUMBUHAN 2020-2021	PERTUMBUHAN 2021-2022	PERTUMBUHAN 2022-2023	PERTUMBUHAN 2021-2023
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI					
1	2	3	4	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18
4.3.01	Pendapatan Hibah	210.521.774.250	158.843.949.435	11.032.055.500	11.032.055.500	-	-	-	-					
4.3.03	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	498.851.877.803	399.823.885.363	113.640.205.580	113.645.162.860	-	-	-	-					
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.293.508.954.132	3.004.516.465.478	3.397.359.648.950	3.556.806.263.231	3.566.982.871.770	3.750.652.293.945	3.777.332.110.791	1.862.745.440.477	49,31	18,38%	5,45%	0,71%	-47,63%
5	BELANJA DAERAH													
5.1	BELANJA OPERASI	2.488.834.975.291	2.244.938.991.305	2.590.907.681.981	2.349.626.059.070	2.957.130.910.143	2.713.826.400.703	3.178.451.935.124	1.194.094.114.951	37,57	4,66%	15,50%	17,12%	-49,18%
5.1.01	Belanja Pegawai			890.130.097.865	847.542.209.097	1.017.811.113.311	911.516.133.943	1.125.639.407.084	501.797.881.918					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			1.514.306.868.429	1.322.343.650.713	1.822.204.912.887	1.689.017.973.676	1.894.165.654.040	669.985.421.933					
5.1.05	Belanja Hibah			171.761.060.687	165.225.302.260	112.409.533.945	109.305.893.084	158.316.874.000	21.980.811.100					
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial			14.709.655.000	14.514.897.000	4.705.350.000	3.986.400.000	330.000.000	330.000.000					
5.2	BELANJA MODAL	971.965.602.249	825.683.819.294	805.354.112.653	748.795.986.827	1.052.103.300.780	965.682.851.455	1.156.661.354.609	164.330.281.355	14,21	-9,31%	28,96%	19,78%	-78,05%
5.2.01	Belanja Modal Tanah			4.000.000.000	3.952.470.497	71.363.813.593	34.501.855.032	25.869.373.580	1.500.000					

No	Uraian	ANGGARAN 2020		ANGGARAN 2021		ANGGARAN 2022		ANGGARAN 2023		CAPAIAN 2023 (%)	PERTUMBUHAN 2020-2021	PERTUMBUHAN 2021-2022	PERTUMBUHAN 2022-2023	PERTUMBUHAN 2021-2023
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI					
1	2	3	4	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			168.298.352.665	124.706.242.505	184.541.611.358	167.348.230.950	181.135.801.204	45.456.816.158					
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			325.900.952.426	322.377.261.289	377.081.066.151	364.113.765.192	409.214.096.597	69.796.947.809					
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			305.957.789.648	296.724.003.436	390.980.007.173	372.295.971.079	524.040.410.528	46.542.703.138					
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			1.197.017.914	1.036.009.100	28.136.802.505	27.423.029.202	16.401.672.700	2.532.314.250					
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	82.058.647.695	72.774.406.372	89.852.017.927	73.372.090.052	16.514.951.740	6.108.268.239	11.566.956.069	1.317.830.895	11,39	0,82%	-91,67%	89,37%	-98,20%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	82.058.647.695	72.774.406.372	89.852.017.927	73.372.090.052	16.514.951.740	6.108.268.239	11.566.956.069	1.317.830.895					
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	21.715.356.000	21.715.356.000	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00	0,00%	-76,97%	100,00%	-53,95%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	21.715.356.000	21.715.356.000	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000					
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.542.859.225.235	3.143.397.216.971	3.507.829.168.561	3.193.509.491.949	4.030.749.162.663	3.690.617.520.397	4.356.680.245.802	1.369.742.227.201	31,44	1,59%	15,57%	18,05%	-57,11%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(249.350.271.103)	(138.880.751.493)	(110.469.519.611)	363.296.771.282	(463.766.290.893)	60.034.773.548	(579.348.135.011)	493.003.213.276					
6	PEMBIAYAAN DAERAH													
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	249.350.271.104	249.350.271.104	110.469.519.611	110.469.519.611	473.766.290.893	473.766.290.893	589.348.135.011	-	0,00	-55,70%	328,87%	24,40%	100,00%

No	Uraian	ANGGARAN 2020		ANGGARAN 2021		ANGGARAN 2022		ANGGARAN 2023		CAPAIAN 2023 (%)	PERTUMBUHAN 2020-2021	PERTUMBUHAN 2021-2022	PERTUMBUHAN 2022-2023	PERTUMBUHAN 2021-2023
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI					
1	2	3	4	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	249.350.271.104	249.350.271.104	110.469.519.611	110.469.519.611	473.766.290.893	473.766.290.893	589.348.135.011	0,00					
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	10.000.000.000	9.999.998.915	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	10.000.000.000	9.999.998.915	10.000.000.000	10.000.000.000					
	PEMBIAYAAN NETTO	249.350.271.104	249.350.271.104	110.469.519.611	110.469.519.611	463.766.290.893	463.766.291.978	579.348.135.011	(10.000.000.000)		-55,70%	319,81%	24,92%	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		110.469.519.611		473.766.290.893	0,00	523.801.065.526	0,00	483.003.213.276					

Sumber: Simral Kota Tangerang Selatan, diolah tahun 2023

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.2.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan dirumuskan mengacu pada kesenjangan (gap) antara prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dengan pencapaian kinerja s.d triwulan II tahun 2023, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.16. Rumusan Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas SDM belum berdaya saing	Kinerja peningkatan kualitas SDM belum optimal	Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, sesuai Standar Pelayanan Minimal terutama untuk masyarakat miskin/MBR
		Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal, terutama untuk masyarakat miskin/MBR
		Belum optimalnya daya saing pemuda
		Belum optimalnya pemberdayaan gender
Belum optimalnya layanan infrastruktur transportasi	Belum optimalnya konektivitas dan kinerja jaringan infrastruktur transportasi	Belum optimalnya konektivitas dan kualitas layanan transportasi publik
		Belum optimalnya kinerja lalu lintas, terutama upaya peningkatan kapasitas jalan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		(termasuk simpang dan jembatan)
Belum optimalnya kualitas kota sebagai kota layak huni	Belum optimalnya kualitas lingkungan perkotaan	Belum optimalnya cakupan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni.
		Belum optimalnya cakupan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan
		Belum optimalnya pemenuhan RTH publik sesuai standar
		Belum optimalnya upaya pencegahan, mitigasi bencana dan penanganan bencana secara terintegrasi
Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah.	Belum optimalnya kontribusi investasi daerah yang memiliki nilai tambah tinggi	Belum optimalnya peningkatan kontribusi sektor ekonomi kreatif dan UMKM yang dapat bersaing ekspor dan memberi nilai tambah ekonomi tinggi
		Belum optimalnya pengembangan investasi daerah yang memiliki nilai tambah.
		Belum optimalnya daya saing produktivitas tenaga kerja pada sektor perdagangan dan jasa
Belum optimalnya perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien	Belum optimalnya upaya reformasi birokrasi	Belum optimalnya manajemen kinerja instansi pemerintah
		Belum optimalnya upaya pencegahan korupsi dan pengendalian resiko secara berkesinambungan dalam pelayanan publik dan pemerintahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya integrasi pelayanan publik yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan layanan masyarakat

Sumber: Diolah Bappelitbangda, Tahun 2023

2.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

A. Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a. Belum optimalnya sistem pendidikan di Kota Tangerang Selatan dalam menyerap partisipasi penduduk dan memperluas akses penduduk dapat bersekolah sesuai dengan usianya, baik pada jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan;
- b. Belum optimalnya akses pelayanan pendidikan anak usia dini sesuai standar pelayanan minimal;
- c. Belum meratanya ketersediaan prasarana sekolah, terutama prasarana SMP;
- d. Belum idealnya kompetensi guru;
- e. Belum optimalnya pemberian kemudahan akses terhadap prasarana sekolah swasta yang ditujukan bagi penduduk usia sekolah dari kelompok Masyarakat Miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak tertampung pada prasarana sekolah negeri;
- f. Kualitas pendidikan pada SD Negeri dan SMP Negeri yang belum dapat bersaing secara nasional.

2. Kesehatan

- a. Belum optimalnya pengelolaan sistem kesehatan kota, terutama integrasi antar komponen penyelenggara sektor kesehatan, baik pada faskes tingkat pertama dan faskes layanan rujukan, untuk pelayanan jaminan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. Belum optimalnya sistem pengawasan terhadap pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga;
- c. Belum optimalnya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar;
- d. Belum optimalnya upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar untuk menurunkan angka kesakitan, pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Sulitnya pembebasan lahan untuk peningkatan kapasitas jalan dan simpang karena harga lahan yang sangat tinggi;
- b. Belum optimalnya upaya pengendalian banjir pada wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota;
- c. Belum optimalnya upaya pembinaan kompetensi tenaga operator/teknisi/analisis konstruksi;
- d. Belum optimalnya penyediaan akses jaringan perpipaan SPAM;
- e. Belum optimalnya penyediaan pengelolaan SPAL skala kota yang terintegrasi, termasuk belum tersedianya IPLT skala kota;
- f. Sulitnya penyediaan RTH publik sesuai standar karena harga lahan yang sangat tinggi;
- g. Masih rendahnya rasio bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ PBG dan Laik Fungsi;
- h. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

- a. Belum optimalnya penyediaan PSU kawasan permukiman sesuai standar;
- b. belum optimalnya penyediaan lahan pemakaman umum;
- c. Belum optimalnya fasilitasi dan penyediaan rumah bagi korban bencana;
- d. Masih terdapat kawasan kumuh perkotaan dan Rumah Tidak Layak Huni;
- e. Belum optimalnya penatagunaan tanah untuk pembangunan.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Belum adanya rencana penanggulangan bencana dan sistem komando penanggulangan bencana yang responsif dan terintegrasi;
- b. Penanggulangan bencana belum mengadopsi konsep mitigasi bencana dan *Early Warning System* (EWS);
- c. Belum optimalnya penegakan Perda/Perwal dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Belum optimalnya cakupan penanganan bencana kebakaran karena belum semua wilayah di Kota Tangerang Selatan terlayani oleh Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
- e. Response time penanganan bencana kebakaran belum sesuai standar;
- f. Belum idealnya jumlah SDM Satpol PP, Satlinmas dan PPNS yang bersertifikasi.

6. Sosial

- a. Belum optimalnya pelayanan dan pemberdayaan Pemerlu Program Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- b. Belum tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terverifikasi dan tervalidasi;
- c. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- d. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS;
- e. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial.

B. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal karena belum optimalnya kualitas kompetensi tenaga kerja yang sinkron dengan kebutuhan pasar kerja;
- b. Belum optimalnya peningkatan produktifitas tenaga kerja;
- c. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pelatihan tenaga kerja dalam hal peningkatan kompetensi tenaga kerja;

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya upaya pemberdayaan kemandirian ekonomi perempuan terutama pada kelompok rentan;
- b. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi perempuan sebagai tenaga profesional;
- c. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran Responsif Gender;
- d. Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga terutama untuk penanganan Stunting.

3. Pangan

- a. Belum optimalnya upaya kerjasama penyediaan pangan dengan daerah-daerah penghasil pangan;
- b. Belum optimalnya peningkatan diversifikasi pangan yang mendukung ketahanan pangan kota;
- c. Belum optimalnya upaya peningkatan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta berorientasi pada peningkatan pendapatan rumah tangga terutama bagi masyarakat miskin dan MBR.

4. Lingkungan Hidup

- a. Belum optimalnya upaya pengurangan produksi sampah melalui proses daur ulang (3R);

- b. Belum optimalnya pengelolaan timbulan sampah karena TPST Cipeucang *overload*;
- c. Belum optimalnya perbaikan kualitas lingkungan hidup terutama terkait kualitas tutupan lahan karena persentase RTH publik belum sesuai standar;
- d. Belum optimalnya kerjasama regional penanganan sampah;
- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah;
- f. Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Masih rendahnya cakupan kepemilikan KIA dan Akta Kelahiran;
- b. Masih kurangnya pemanfaatan data kependudukan termasuk data proyeksi kependudukan untuk perencanaan pembangunan;
- c. Masih rendahnya cakupan penerbitan akta kematian;
- d. Belum optimalnya pendataan penduduk pendatang.

6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Masih adanya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*);
- b. Masih rendahnya cakupan kepesertaan KB jangka panjang untuk laki-laki.

7. Perhubungan

- a. Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi;
- b. Belum terwujudnya sistem transportasi massal LRT/MRT;
- c. Belum optimalnya perwujudan TOD;
- d. Belum optimalnya upaya pengurangan titik kemacetan;
- e. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan;
- f. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana terminal sesuai standar;
- g. Belum tersusunnya rencana aksi keselamatan lalu lintas;
- h. Belum tersedianya rencana induk transportasi perkotaan.

8. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya penerapan SPBE;
- b. Belum terintegrasinya Layanan Publik yang diselenggarakan secara *online*;
- c. Belum optimalnya pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai potensi untuk meningkatkan cakupan Keterbukaan Informasi Publik.

9. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a. Masih rendahnya jumlah koperasi yang berkualitas;
- b. Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru;
- c. Masih rendahnya dukungan fasilitasi pembiayaan, pemasaran, pendampingan kelembagaan dan usaha serta fasilitasi kemitraan bagi UMKM;
- d. Masih rendahnya persentase usaha mikro yang menjadi usaha kecil.

10. Penanaman Modal

- a. Belum optimalnya upaya ekstentifikasi potensi-potensi investasi yang bernilai tambah tinggi dan menarik bagi investor;
- b. Peningkatan nilai investasi dan jumlah investor baik PMDN ataupun PMA masih perlu diupayakan;
- c. Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan perizinan sesuai SOP.

11. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;
- b. Masih rendahnya dukungan fasilitasi pembiayaan, pemasaran, pendampingan kelembagaan dan usaha serta fasilitasi kemitraan bagi wirausaha muda;
- c. Masih rendahnya prestasi olah raga baik tingkat provinsi dan nasional;
- d. Belum optimalnya upaya kerjasama dengan pihak swasta untuk penyediaan sarana dan prasarana olah raga yang berstandar kompetisi.

12. Statistik

- a. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral daerah yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan data sektoral daerah untuk perencanaan pembangunan dikarenakan ketersediaannya yang tidak tepat waktu dan tidak termutakhirkan;
- c. Belum terwujudnya satu data daerah yang terintegrasi dan termutakhirkan;
- d. Belum terwujudnya integrasi data sektoral dengan perencanaan pembangunan secara elektronik (e-data);
- e. Belum terbangunnya kesadaran perangkat daerah dalam penyediaan data sektoral.

13. Persandian

- a. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi pemerintah daerah.

14. Kebudayaan

- a. Masih rendahnya pembinaan seni dan budaya lokal serta pelestarian cagar budaya;
- b. Belum optimalnya upaya kerjasama dengan komunitas seni dan budaya untuk penguatan identitas budaya lokal;
- c. Masih rendahnya persentase paguyuban warga etnis yang dibina.

15. Perpustakaan

- a. Masih rendahnya budaya literasi masyarakat;
- b. Masih rendahnya pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.

16. Kearsipan

- a. Masih rendahnya persentase alih media arsip;
- b. Masih rendahnya kesesuaian pemusnahan arsip dengan NSPK;
- c. Masih rendahnya persentase kesesuaian autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media sesuai NSPK.

C. Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Masih rendahnya peningkatan pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN);
- b. Masih rendahnya penerapan cara pembudidayaan ikan yang baik;
- c. Masih rendahnya persentase unit pengolah hasil perikanan yang memenuhi standar mutu;
- d. Masih diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan terutama masyarakat miskin/MBR.

2. Pariwisata

- a. Masih kurangnya pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif;
- b. Masih rendahnya tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi;
- c. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja ekonomi kreatif.

3. Pertanian

- a. Masih rendahnya persentase penerapan budidaya pertanian yang baik; terutama untuk mendukung ketahanan pangan keluarga;
- b. Masih rendahnya jumlah kelompok tani yang termasuk kelas lanjut.

4. Perdagangan

- a. Belum optimalnya upaya pengendalian harga bahan pokok dan bahan penting lainnya;
- b. Masih rendahnya persentase pertumbuhan perdagangan luar negeri.

5. Perindustrian

- a. Masih diperlukan upaya peningkatan jumlah produk IKM yang diperdagangkan dalam negeri dan luar negeri;
- b. Masih rendahnya dukungan fasilitasi pembiayaan, pemasaran, pendampingan kelembagaan dan usaha serta fasilitasi kemitraan bagi IKM;
- c. Belum optimalnya ketersediaan informasi industri;
- d. Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan izin usaha industri IKM.

D. Penunjang Urusan

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya;
- c. belum optimalnya kualitas asistensi dan monev penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- d. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- e. Masih banyaknya kendala penggunaan aplikasi SIPD.

2. Keuangan

- a. Belum optimalnya ekstensifikasi potensi pajak daerah non- PBB;
- b. Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak;
- c. Belum optimalnya manajemen aset daerah dan pemanfaatan aset daerah terhadap peningkatan PAD;
- d. Masih banyaknya kendala penggunaan aplikasi SIPD;
- e. Belum optimalnya penatausahaan keuangan pada perangkat daerah;
- f. Masih rendahnya persentase sertifikasi aset tanah;
- g. Belum optimalnya pengendalian penyerapan anggaran dan penatausahaan keuangan.

3. Kepegawaian

- a. Masih rendahnya profesionalisme ASN;
- b. Belum optimalnya penerapan regulasi daerah dalam penghargaan kinerja ASN;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan hasil assesment pagawai dalam proses promosi dan mutasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Masih rendahnya penyelenggaraan diklat teknis dan diklat jabatan fungsional;
- b. Masih rendahnya kompetensi ASN sesuai dengan pemenuhan standar kompetensi dan kualifikasi jabatan.

5. Penelitian dan Pengembangan

- a. Masih rendahnya implementasi rencana induk kelitbang;
- b. Masih rendahnya inovasi daerah yang dapat menyelesaikan permasalahan daerah;
- c. Masih rendahnya hasil-hasil penelitian yang mendukung perencanaan pembangunan.

6. Kesatuan Bangsa Dan Politik

- a. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan lembaga organisasi kemasyarakatan;
- b. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi pemilih dalam Plkada/Pileg/Pilpres;
- c. Belum optimalnya pengendalian konflik masyarakat.

7. Kecamatan

- a. Masih rendahnya kompetensi SDM kecamatan dan kelurahan;
- b. Belum optimalnya pelayanan publik;
- c. Masih rendahnya ketersediaan data kewilayahan untuk perencanaan pembangunan kewilayahan.

E. Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

- a. Masih rendahnya kualitas kebijakan publik yang ditetapkan;
- b. Belum optimalnya upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
- c. Belum optimalnya upaya perwujudan reformasi birokrasi pada perangkat daerah;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan perjanjian kerjasama daerah;

- e. Belum adanya pendampingan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2. Sekretariat DPRD

- a. Belum berkualitasnya penyusunan rencana kerja sekretariat DPRD;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi DPRD sesuai aturan.

Unsur Pengawasan

Inspektorat.

- a. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah.

2.6. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa mendatang. Isu strategis juga dapat berupa potensi daerah, yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis pembangunan Kota Tangerang Selatan dalam perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 yang berkaitan dengan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.17. Isu Strategis Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Tahun 2023
Kualitas SDM belum berdaya saing	Daya Saing SDM
Belum optimalnya layanan infrastruktur transportasi	Konektivitas infrastruktur dan perwujudan kota yang lestari
Belum optimalnya kualitas kota sebagai kota layak huni	
Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah.	Daya saing ekonomi terutama Sektor Ekonomi Kreatif
Belum optimalnya perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien	Birokrasi Efektif dan Efisien

Sumber: Bappelitbang Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

Isu strategis Kota Tangerang Selatan tahun 2023 yang berkaitan dengan prioritas nasional dan agenda provinsi tahun 2023 yaitu:

1. Penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Penurunan stunting;
3. Persiapan penyelenggaraan Pemilu Raya Tahun 2024;
4. Penyesuaian status kepegawaian dari honorer menjadi P3K sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi Provinsi Banten. Arah kebijakan ekonomi nasional sesuai dengan RKP Tahun 2023 yang mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, adalah mendorong pemulihan dunia usaha pasca pandemi Covid 19 untuk melanjutkan penguatan ketahanan ekonomi dengan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi percepatan revitalisasi pariwisata dan memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional. Arah kebijakan ekonomi Provinsi Banten Tahun 2023 sesuai dengan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah dalam rangka pemantapan daya saing perekonomian dengan terus meningkatkan kualitas penunjang infrastruktur perekonomian dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis. Untuk itu, arah kebijakan ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 adalah peningkatan kembali kinerja ekonomi daerah pasca pandemi Covid 19, terutama pada sektor basis yang menopang perekonomian daerah, yang didukung dengan peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur ekonomi. Peningkatan kontribusi UMKM dan ekonomi kreatif dalam perekonomian Kota Tangerang Selatan menjadi prioritas pembangunan sektor ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2023.

Proyeksi perekonomian daerah dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Tangerang Selatan didasarkan atas perkembangan perekonomian nasional dan Provinsi Banten sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Berdasarkan rilis IMF April 2023, proyeksi ekonomi dunia pada tahun

2023 melambat dibandingkan tahun 2022, yaitu semula 3,4%,yoy diproyeksi menjadi 2,80%yoy. Melambatnya proyeksi kinerja ekonomi global pada tahun 2023 dipengaruhi oleh masih adanya ketidakpastian global akibat berlanjutnya konflik geopolitik Rusia-Ukraina, gangguan rantai pasok global akibat dampak perang Rusia-Ukraina dan perubahan iklim ekstrem, kebijakan proteksionisme, masih tingginya inflasi global, potensi resesi di sejumlah negara (terutama Amerika Serikat dan Kawasan Eropa), dan kebijakan moneter ketat secara global. Kenaikan suku bunga acuan bank sentral diperkirakan turut menekan kinerja sektor riil. Data proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Negara	2022	Proyeksi IMF WEO Apr'23
Dunia	3,40	2,80
Negara Maju	2,70	1,30
Amerika Serikat	2,00	1,60
Kawasan Eropa	3,50	0,80
Jepang	1,40	1,30
Negara Berkembang	4,00	3,90
Tiongkok	3,00	5,20
India	6,80	5,90
ASEAN-5	5,50	4,50
Amerika Latin	4,00	1,60
Negara Berkembang Eropa	0,80	1,20
Timur Tengah & Asia Tengah	5,30	2,90

Sumber: World Economic Outlook (WEO) - IMF April 2023, diolah

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 dengan kecenderungan bias tengah di kisaran 4,5-5,3% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 (5,3%, yoy). Perkiraan tersebut dipengaruhi oleh masih berlanjutnya konflik geopolitik yang dapat mempengaruhi risiko penurunan ekspor, depresiasi nilai tukar, dan *capital outflows* yang meningkat. Sementara itu, proyeksi ekonomi nasional berdasarkan Kementerian Keuangan RI sedikit lebih optimis dibandingkan proyeksi oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar 5,3% dan 5,9%. Optimisme tersebut dikarenakan mulai membaiknya aktivitas ekonomi dan terlaksananya program pemulihan pasca pandemi Covid-19. Proyeksi

pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2023 dari berbagai sumber sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023

Organisasi/Lembaga	Proyeksi 2023
Kementerian Keuangan RI	5,3% - 5,9%
Bank Indonesia	4,5%-5,3%
INDEF	4,8%
OECD	4,7%
World Bank	4,8%
Asian Development Bank (ADB)	4,8%
IMF	5,0%

Sumber: Berbagai sumber, Diolah Tahun 2023

Berdasarkan data realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten triwulan II tahun 2023 sebagaimana dirilis oleh BPS Provinsi Banten, tercatat bahwa laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Banten sebesar 4,68%, lebih rendah 0,35 point dibandingkan LPE Provinsi Banten Tahun 2022 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,03%. Dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023, terdapat koreksi proyeksi target indikator makro sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Proyeksi LPE Provinsi Banten Tahun 2023

Indikator	Satuan	RKPD 2023		P-RKPD 2023	
		2022	2023	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,0-5,6**	5,02 - 5,15	5,03	4,70-5,20

Sumber: Dokumen P-RKPD Provinsi Banten Tahun 2023

Dengan mempertimbangkan proyeksi perkembangan kondisi ekonomi nasional dan Provinsi Banten sebagaimana tersebut di atas, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam tabel 3.4. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Banten. Data pertumbuhan PDRB ADHK Kota Tangerang Selatan berdasarkan lapangan usaha s/d triwulan II Tahun 2023, sebagaimana

tertuang dalam tabel 3.5, mengacu pada data tahun 2022 karena data PDRB Kabupaten/Kota dirilis oleh BPS dalam periode 1 (satu tahun) sekali. Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan tahun 2023 diproyeksi masih ditopang oleh sektor basis yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2022 yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor jasa perusahaan. Berdasarkan data Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 yang dirilis BPS Kota Tangerang Selatan, tiga komoditas dengan urutan pengeluaran per kapita terbesar adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga, bahan makanan, serta makanan/minuman jadi. Data tersebut dapat menjadi proyeksi bahwa sektor Real Estate dan sektor Kontruksi masih dapat tumbuh sebagai sektor prima pada tahun 2023. Selain itu, dengan adaptasi gaya hidup masyarakat Kota Tangerang Selatan pasca pandemi Covid 19 yang membutuhkan internet dalam aktivitas sehari-hari diproyeksikan sektor Informasi dan Komunikasi juga masih dapat tumbuh sebagai sektor prima pada tahun 2023.

Tabel 3.4. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 (dalam Persen)

Uraian	Realisasi			Proyeksi RKPD	Proyeksi P-RKPD
	2020	2021	2022	2023	2023
Nasional	-2.07	3.69	5,31	5,3-5,9	5,3-5,9*
Banten	-3.38	4.44	5,03	5,02-5,15	4,7-5,2
Tangerang Selatan	-1.01	4.77	5,82	6,25 - 7,06**	6,01-7,06***

Sumber : *) Kemenkeu RI, **) RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026, ***) Proyeksi Tahun 2023

Tabel 3.5. Tipologi Sektor Lapangan Usaha di Kota Tangerang Selatan s.d Triwulan II Tahun 2023 (berdasarkan PDRB ADHK)

Kategori	Uraian Lapangan Usaha	PDRB (miliar rupiah)	PDRB (miliar rupiah)	Pertumbuhan (rSEKTOR)	Kontrib usi	Rerata kontribusi sektoral terhadap PDRB	Rerata laju pertumbu han sektoral	Tipologi Klassen	Potensi Sektor
		2021	2022						
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	115,72	117,78	1,78%	0,18%	<	<	Sektor Terbelakang	Non-Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4649,36	5.037,65	8,35%	7,63%	>	>	Sektor Prima	Non-Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	58,74	64,88	10,45%	0,10%	<	>	Sektor Berkembang	Non Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31,97	33,01	3,25%	0,05%	<	<	Sektor Terbelakang	Non Basis
F	Konstruksi	8847,75	9.384,80	6,07%	14,21%	>	>	Sektor Prima	Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9822,62	10.535,02	7,25%	15,96%	>	>	Sektor Prima	Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	1919,89	2.039,46	6,23%	3,09%	<	>	Sektor Berkembang	Non-Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1782,65	1.939,11	8,78%	2,94%	<	>	Sektor Berkembang	Basis
J	Informasi dan Komunikasi	11288,91	12.040,08	6,65%	18,24%	>	>	Sektor Prima	Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	841,8	843,68	0,22%	1,28%	<	<	Sektor Terbelakang	Non Basis
L	Real Estate	11794,74	12.503,61	6,01%	18,94%	>	>	Sektor Prima	Basis
M,N	Jasa Perusahaan	1904,29	2.038,17	7,03%	3,09%	<	>	Sektor Berkembang	Basis

Kategori	Uraian Lapangan Usaha	PDRB (miliar rupiah)	PDRB (miliar rupiah)	Pertumbuhan (rSEKTOR)	Kontribusi	Rerata kontribusi sektoral terhadap PDRB	Rerata laju pertumbuhan sektoral	Tipologi Klassen	Potensi Sektor
		2021	2022						
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	579,93	622,55	7,35%	0,94%	<	>	Sektor Berkembang	Non Basis
P	Jasa Pendidikan	4301,99	4.250,79	-1,19%	6,44%	>	<	Sektor Potensial	Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2861,33	2.888,52	0,95%	4,38%	<	<	Sektor Terbelakang	Basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	1591,42	1.682,77	5,74%	2,55%	<	<	Sektor Terbelakang	Basis
	JUMLAH	62393,11	66.021,88	5,82%					
	Rerata PDRB	3670,1829	3.883,64						

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan dapat mendorong pencapaian kinerja makro pembangunan lainnya. Proyeksi kinerja indikator makro pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan pada Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6. Indikator makro Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No.	Indikator Makro	Satuan	Target RKPD 2023	Realisasi s.d TW II Tahun 2023	Reformulasi Target P-RKPD 2023	Keterangan
1	LPE	Persen	6,25 - 7,06	5,82	6,01-7,06tk%	reformulasi
2	Inflasi	Persen	3,19 - 3,37	6,62	-	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,58	6,59	5,87	reformulasi
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	1,89	2,5	1,89	tetap
5	IPM	Nilai	81,81	81,95	81,97	reformulasi
6	Indeks Gini	Indeks	0,35	0,359	0,35	tetap

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kerangka pendanaan keuangan daerah mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 memuat penyesuaian-penyesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD s.d triwulan II tahun 2023. Selain itu, juga memuat pergeseran anggaran dalam perubahan penjabaran APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2023.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Tangerang Selatan diarahkan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyesuaian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan realisasi pendapatan selama semester 1 Tahun 2023;

- b. Melakukan penyesuaian pendapatan transfer berdasarkan peraturan yang berlaku;
- c. Melakukan penyesuaian belanja transfer Pemerintah Pusat.

Adapun rincian perubahan target pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan dalam perubahan RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.7. Struktur Pendapatan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No	Struktur	TAHUN 2023					Perubahan RKPD Tahun 2023	Penambahan/ Pengurangan (RKPD - RKPD Perubahan	Keterangan
		RKPD	APBD	APBD Pergeseran Tahap 1	APBD Pergeseran Tahap 2	APBD Pergeseran Tahap 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8-7)	10
1	PENDAPATAN								
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.900.014.815.446	1.945.389.765.446	1.945.389.765.446	1.945.389.765.446	1.955.222.973.284	2.032.626.419.635		
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.650.800.000.000	1.680.800.000.000	1.680.800.000.000	1.680.800.000.000	1.680.800.000.000	1.796.849.627.807	146.049.627.807	
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	58.994.358.827	61.594.358.827	61.594.358.827	61.594.358.827	61.594.358.827	43.048.177.371	(15.546.181.456)	Penyesuaian proyeksi Retribusi PBG
4.1.3	Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	700.000.000	735.000.000	735.000.000	735.000.000	735.000.000	735.000.000	35.000.000	
4.1.4	Lain - lain - PAD yang Sah	189.520.456.619	202.260.406.619	202.260.406.619	202.260.406.619	202.260.406.619	191.993.614.457	2.473.157.838	Penyesuaian proyeksi pendapatan BLUD, Penambahan Jasa Giro dan Deposito dan denda pajak
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.506.102.203.934	1.792.220.180.062	1.797.220.180.062	1.822.109.137.507	1.822.109.137.507	1.994.037.103.603	487.934.899.669	
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	895.283.523.000	1.174.718.979.000	1.174.718.979.000	1.199.607.936.445	1.199.607.936.445	1.199.607.936.445	304.324.413.445	

No	Struktur	TAHUN 2023					Perubahan RKPD Tahun 2023	Penambahan/ Pengurangan (RKPD - RKPD Perubahan	Keterangan
		RKPD	APBD	APBD Pergeseran Tahap 1	APBD Pergeseran Tahap 2	APBD Pergeseran Tahap 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8-7)	10
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	172.069.934.000	209.077.671.000	209.077.671.000	233.966.628.445	233.966.628.445	233.966.628.445	61.896.694.445	
4.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	552.258.319.000	590.580.647.000	590.580.647.000	590.580.647.000	590.580.647.000	590.580.647.000	38.322.328.000	
4.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus Fisik	-	31.750.651.000	31.750.651.000	31.750.651.000	31.750.651.000	31.750.651.000	31.750.651.000	
4.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	170.955.270.000	331.305.718.000	331.305.718.000	331.305.718.000	331.305.718.000	331.305.718.000	160.350.448.000	
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah		12.004.292.000	12.004.292.000	12.004.292.000	12.004.292.000	12.004.292.000	12.004.292.000	
4.2.2	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	610.818.680.934	617.501.201.062	622.501.201.062	622.501.201.062	622.501.201.062	794.429.167.158	183.610.486.224	
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	610.818.680.934	617.501.201.062	617.501.201.062	617.501.201.062	617.501.201.062	789.429.167.158	178.610.486.224	SK Gubernur Banten No.973/Kep.28-Huk/2023 SK Gubernur Banten No.973/Kep.22-Huk/2023
4.2.2.2	Bantuan Keuangan			5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.406.117.019.380	3.737.609.945.508	3.742.609.945.508	3.767.498.902.953	3.777.332.110.791	4.026.663.523.238	620.546.503.858	

Sumber: Bapenda dan BKAD Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

a. Arah Kebijakan Umum Belanja Daerah

- 1) Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran;
- 2) Belanja untuk kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal;
- 3) Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik;
- 4) Belanja daerah dialokasikan untuk mendukung percepatan pencapaian target prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah serta fokus pembangunan KDH-WKDH yang sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 pada periode tahun 2023. Selain itu, belanja daerah juga dialokasikan untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu Raya tahun 2024;
- 5) Belanja daerah yang berasal dari pendapatan transfer yang telah ditentukan penggunaannya, dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian target dan fokus pembangunan KDH-WKDH sesuai visi dan misi pembangunan daerah yang dijabarkan sesuai RPJMD Kota

Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dirinci pada program, kegiatan dan sub-kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah sebagai belanja non hibah/non bantuan sosial;

- 7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada partai Politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 8) Belanja Tidak Terduga dianggarkan secara memadai mengantisipasi kejadian luar biasa di luar kewenangan daerah atau kondisi darurat/ mendesak di luar perencanaan, tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat atau diamanatkan peraturan perundang-undangan.

b. Arah Kebijakan Belanja Mandat

Perhitungan belanja mandat dilakukan berdasarkan pendekatan fungsi dan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait dengan amanat mandat sesuai aturan yang berlaku. Kebijakan Belanja mandat dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 masih sesuai dengan kebijakan dalam RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- 1) Belanja pendidikan paling sedikit 20% dari kapasitas riil
- 2) Belanja kesehatan paling sedikit 15% dari kapasitas riil
- 3) Belanja Infrastruktur paling sedikit 25% dari kapasitas riil
- 4) Belanja Peningkatan SDM ASN paling sedikit 0,5% dari kapasitas riil.
- 5) Belanja layanan pengawasan paling sedikit 0,5% dari kapasitas riil.
- 6) Belanja urusan kebencanaan paling sedikit 1% dari kapasitas riil.
- 7) Belanja Pemberdayaan masyarakat dianggarkan paling sedikit Rp27.000.000.000 setiap tahun, atau Rp500.000.000 per kelurahan.

- 8) Belanja aspirasi mengacu pada kebijakan belanja dalam RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023.
- 9) Belanja urusan pelayanan umum sisa dari kapasitas riil sebesar sisanya.

c. Arah Kebijakan Khusus

- 1) Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2023;
- 2) Menampung kegiatan-kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran pasca penetapan APBD tahun 2023, yaitu:
 - a. Penyesuaian Pergeseran Tahap I, meliputi:
 - Penyesuaian Belanja Pegawai sesuai dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 841.8/Kep.35-Huk/2023 tentang Besaran Nilai TPP ASN
 - Penyesuaian belanja akibat Perubahan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan
 - Penyesuaian Dana Transfer Pusat (DBH/DAU/DAK/DID)
 - Penyesuaian Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi Sebesar Rp5.000.000.000
 - Penyesuaian Sumber Dana pada SIPD yang bersumber dari DAU untuk Kelurahan dan P3K
 - Perubahan Uraian pada sub rincian objek.
 - b. Penyesuaian Pergeseran Tahap II, Meliputi:
 - Pemenuhan Belanja atas Kekurangan Belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Dan Aset Daerah Dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.
 - Pemenuhan belanja obat, bahan medis habis pakai dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (UHC)
 - Penyesuaian belanja DAK untuk Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD.
 - Penganggaran Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen DPPT Pengadaan Tanah TPU Jombang Zona II (Belanja Modal Tanah).

- Penyesuaian Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Penyesuaian Belanja Perjalanan Dinas pada DP3AP2KB yang bersumber dari DAK
 - Pendanaan untuk persiapan Pilkada TA 2024 kepada KPU Kota Tangerang Selatan
 - Penghargaan kepada Atlit yang berprestasi dalam event PORPROV ke VI Tahun 2022 yang diselenggarakan di Kota Tangerang.
 - Pemenuhan Belanja untuk Tim Pemandu Haji Daerah pada Sekretariat Daerah.
- c. Penyesuaian Pergeseran Tahap III, meliputi:
- Penyesuaian belanja untuk pemenuhan 11 Bulan Belanja Gaji Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - Pemenuhan 11 Bulan Belanja Universal Health Coverage (UHC) pada Dinas Kesehatan
 - Penyesuaian DAK pada dinas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2023
 - Perluasan lahan TPU Jombang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
- 3) Pendanaan Belanja Program dan Kegiatan melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Diprioritaskan untuk pendanaan program dan kegiatan percepatan pencapaian target kinerja RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026 untuk periode 2023. Dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 direncanakan pembentukan BUMD sebagai amanat Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan

Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan;

- Diprioritaskan untuk upaya percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 050/Kep.174-Huk/2022 tentang Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2022;
- Diprioritaskan untuk upaya percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
- Diprioritaskan untuk pendanaan belanja pegawai ASN dan non PNS, operasional kantor seperti listrik, air, komunikasi dan belanja wajib mengikat lainnya yang belum tercukupi;

Struktur belanja Perubahan RKPD sebagaimana tertuang pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.8. Struktur Belanja dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No	Struktur	TAHUN 2023					Perubahan RKPD Tahun 2023	Penambahan/ Pengurangan (RKPD - RKPD Perubahan)	Keterangan
		RKPD	APBD	APBD Pergeseran Tahap 1	APBD Pergeseran Tahap 2	APBD Pergeseran Tahap 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8-7)	10
5	BELANJA								
5.1	BELANJA OPERASI	2.681.959.573.900	3.102.122.005.345	3.118.790.298.316	3.168.618.727.286	3.178.451.935.124	3.290.827.875.794	608.868.301.894	
5.1.1	Belanja Pegawai	856.125.009.041	1.144.394.625.458	1.144.833.528.558	1.130.749.349.160	1.125.639.407.084	1.108.945.708.270	252.820.699.229	
5.1.1	Belanja Barang dan Jasa	1.716.494.394.859	1.816.746.414.887	1.840.309.895.758	1.879.222.504.126	1.894.165.654.040	2.023.940.793.653	307.446.398.794	
5.1.5	Hibah	109.010.170.000	140.650.965.000	133.316.874.000	158.316.874.000	158.316.874.000	157.171.373.871	48.161.203.871	
5.1.6	Bantuan Sosial	330.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	770.000.000	440.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	888.008.996.028	1.151.950.595.214	1.156.610.216.609	1.156.661.354.609	1.156.661.354.609	1.221.968.016.901	333.959.020.873	
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	36.148.449.452	32.885.479.960	36.557.565.594	11.566.956.069	11.566.956.069	10.196.956.069	(25.951.493.383)	
5.3.1	Belanja tak Terduga	36.148.449.452	32.885.479.960	11.566.956.069	11.566.956.069	11.566.956.069	10.196.956.069	-(25.951.493.383)	
5.4	BELANJA TRANSFER	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	17.500.000.000	7.500.000.000	
5.4.2	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	17.500.000.000	7.500.000.000	
5.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	17.500.000.000	7.500.000.000	
	JUMLAH BELANJA	3.616.117.019.380	4.296.958.080.519	4.321.958.080.519	4.346.847.037.964	4.356.680.245.802	4.540.492.848.764	924.375.829.384	

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 202

3.2.2.1. Belanja Mandat

Perhitungan belanja mandat dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.9. Perhitungan Belanja Mandat dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023

Belanja Mandat	Urusan	Perangkat Daerah	Perubahan RKPD 2023	
			Rp	%
Total APBD dalam Perubahan RKPD 2023			4.550.492.848.764	
Belanja Pegawai (maks 30% dari kapasitas riil)			1.108.893.508.181	24,37%
Belanja Pendidikan (min. 20% dari kapasitas riil)			981.148.127.215	21,56%
	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	828.047.713.796	
	Kebudayaan			
	Pemuda dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	16.002.795.496	
	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.627.545.970	
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesbangpol	1.967.854.580	
Belanja Kesehatan (min. 15% dari kapasitas riil)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Bangunan Fasilitas Sekolah)	133.502.217.373	
			810.535.415.538	23,55%
	Kesehatan	Dinas Kesehatan	806.583.366.538	
	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas P3AP2KB (Bidang KB)	3.952.049.000	
Belanja layanan pengawasan (min. 0,5% dari kapasitas riil)	Unsur pengawasan	Inspektorat	32.857.557.559	0,72%
Belanja Infrastruktur (min. 25% dari kapasitas riil)			1.719.736.067.327	37,79%
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas SDA,Bina Marga dan Bina Konstruksi	465.893.740.777	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	481.797.710.985	
	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	365.673.845.045	
	Lingkungan Hidup	DLH	201.562.853.988	
	Perhubungan	Dishub	125.901.751.766	
	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo (Infrastruktur TI)	58.907.683.981	
	Penyediaan Sarana Prasarana Perangkat Daerah Lainnya		19.998.480.785	
Belanja urusan kebencanaan (min. 1% dari kapasitas riil)			268.993.825.722	5,91%

Belanja Mandat	Urusan	Perangkat Daerah	Perubahan RKPD 2023	
			Rp	%
	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	BPBD	14.190.135.745	
		Damkar	25.089.393.659	
	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.608.453.750	
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinas Sosial	4.300.638.120	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas SDA,Bina Marga dan Bina Konstruksi	221.805.204.448	
Belanja Peningkatan SDM ASN (min. 0,5% dari kapasitas riil)			49.198.574.212	1,08%
	- Kepegawaian - Pendidikan dan pelatihan	BKPSDM	37.816.738.895	
	Pendidikan	Dindik	703.049.300	
	Kesehatan	Dinkes	219.176.147	
	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas P3AP2KB	98.366.600	
	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
	Perindustrian dan Perdagangan	Disperindag	10.000.000	
	Pemerintahan	Sekretariat DPRD	3.133.339.676	
		Sekretariat Daerah	1.325.185.200	
	Perencanaan dan Penelitian Pengembangan	Bappelitbangda	376.319.800	
	Keuangan	BKAD	265.840.000	
		Bapenda	740.470.000	
	Sosial	Dinas Sosial	15.590.200	
	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	DSDABMBK	223.605.100	
	Lingkungan Hidup	DLH	280.739.694	
	Administrasi Kecamatan	Kecamatan	274.345.000	
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol	85.000.000	
		Satpol PP	442.258.000	
		Dinas Damkartan	125.500.000	
	Trantibumlinmas	BPBD	229.604.000	
		Disdukcapil		
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Diskominfo	2.593.446.600	
	Komunikasi dan Informatika			
	Pariwisata	Dispar		
	Penanaman Modal	DPMPPTSP	40.000.000	
	Perhubungan	Dishub		
	Perumahan dan Pertanahan	Disperkimta	200.000.000	
Belanja Pemberdayaan Masyarakat			127.293.330.139	2,80%
	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas P3AP2KB	10.880.883.000	

Belanja Mandat	Urusan	Perangkat Daerah	Perubahan RKPD 2023	
			Rp	%
	Kepemudaan, Kepramukaan dan Olahraga	Dispora	14.526.131.510	
	Kesehatan	Dinkes	13.098.580.305	
	Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan	DKP3	1.349.775.890	
	Pendidikan dan Kebudayaan	Dindik	541.096.800	
	Sosial	Dinsos	1.782.474.140	
	Tenaga Kerja	Disnaker	1.412.956.198	
	Koperasi dan UKM	Dinkop UKM	600.661.240	
	Pariwisata	Dispar	1.032.360.680	
	Perpustakaan dan Kearsipan	DPKD	87.548.000	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DSDABMBK	459.892.760	
	Trantibumlinmas	Satpol PP	294.678.000	
		Dinas Damkartan	2.532.001.875	
	Perindustrian dan Perdagangan	Disperindag	819.685.800	
	Pemerintahan	Badan Kesbangpol	374.563.180	
	Perumahan	Disperkimta	28.928.020.150	
	Administrasi Kecamatan	Kecamatan	48.572.020.611	
Belanja Perlindungan Sosial			127.642.972.940	2,81%
	Kesehatan	Dinkes	120.181.907.200	
	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas P3AP2KB	2.697.552.520	
	Sosial	Dinsos	4.763.513.220	

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

3.2.2.2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Daftar rincian penerima hibah dan bansos dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut

Tabel 3.10. Daftar Rincian Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023						PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
A. HIBAH UANG						A. HIBAH UANG					
1	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Jl. Raya Serpong No.01, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19 Mei 2022	25.000.000.000	1	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Jl. Raya Serpong No.01, Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25.000.000.000	
2	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	Jl. Raya Puspitek No. 1 Kec. Setu	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19 Mei 2022	600.000.000	2	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	Jl. Raya Puspitek No. 1 Kec. Setu	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	600.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
3	PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA TANGERANG SELATAN	JALAN CENDIKIA SEKTOR 11, CIATER, SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN. 15310	DINAS KESEHATAN		475.000.000
4	KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT Indonesia (KORMI)	JALAN RAYA RAWA BUNTU NO. 19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		400.000.000
5	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG TANGERANG SELATAN	JL. MARUGA RAYA RUKO GOLDEN MARUGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		350.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
3	PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA TANGERANG SELATAN	JALAN CENDIKIA SEKTOR 11, CIATER, SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN. 15310	DINAS KESEHATAN	475.000.000	
4	KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT Indonesia (KORMI)	JALAN RAYA RAWA BUNTU NO. 19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	400.000.000	
5	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG TANGERANG SELATAN	JL. MARUGA RAYA RUKO GOLDEN MARUGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	350.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
6	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	Sekretariat Koni Kota Tangerang Selatan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		10.250.000.000
7	National Paralympic Committe Indonesia (NPCI)	Jl kavling Keuangan RT 01 RW 02 No 30 kelurahan Kedaung, Pamulang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		350.000.000
8	TP PKK Kota Tangerang Selatan	Gd II. Lantai 3A Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		760.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
6	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	Sekretariat Koni Kota Tangerang Selatan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.250.000.000	
7	National Paralympic Committe Indonesia (NPCI)	Jl kavling Keuangan RT 01 RW 02 No 30 kelurahan Kedaung, Pamulang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	350.000.000	
8	TP PKK Kota Tangerang Selatan	Gd II. Lantai 3A Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	760.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDASI OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
9	PEPI (PENGEMBANGAN EKONOMI PEREMPUAN INDONESIA)	JL. REGENCY VILA MELATI MAS NO. 66 A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		150.000.000
10	DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA TANGERANG SELATAN	PUSAT PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN GD. II LT 3.A JL. RAYA MARUGA RAYA NO. 1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		545.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
9	PEPI (PENGEMBANGAN EKONOMI PEREMPUAN INDONESIA)	JL. REGENCY VILA MELATI MAS NO. 66 A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	150.000.000	
10	DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA TANGERANG SELATAN	PUSAT PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN GD. II LT 3.A JL. RAYA MARUGA RAYA NO. 1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	545.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
11	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)	JL. SILIWANGI NO. 03	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19 Mei 2022	350.000.000
12	FORUM PEMBAURAN KABANGSAAN KOTA TANGERANG SELATAN	Jl Masjid Ikhsan No. 12 Kel. Sawah Kec. Ciputat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19 Mei 2022	150.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
11	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)	JL. SILIWANGI NO. 03	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	350.000.000	
12	FORUM PEMBAURAN KABANGSAAN KOTA TANGERANG SELATAN	Jl Masjid Ikhsan No. 12 Kel. Sawah Kec. Ciputat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	150.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
13	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Puspitek Muncul Gg. Anggrek No. 50 Kp Baru Asih Kel. Muncul Kec. Setu	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19 Mei 2022	175.000.000
14	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN	JL. BENDA BARAT IV NO. 8 PAMULANG PERMAI II PAMULANG	BAGIAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	12 MEI 2022	1.900.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
13	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Puspitek Muncul Gg. Anggrek No. 50 Kp Baru Asih Kel. Muncul Kec. Setu	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	175.000.000	
14	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN	JL. BENDA BARAT IV NO. 8 PAMULANG PERMAI II PAMULANG	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	1.900.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDASI OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
15	LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KOTA TANGERANG SELATAN	JL. SILIWANGI NO.3 GEDUNG KELEMBAGAAN KOTA TANGERANG SELATAN	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12 MEI 2022	8.000.000.000
16	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)	JL. SILIWANGI NO. 2 PAMULANG	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12 MEI 2022	750.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
15	LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KOTA TANGERANG SELATAN	JL. SILIWANGI NO.3 GEDUNG KELEMBAGAAN KOTA TANGERANG SELATAN	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.000.000.000	
16	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)	JL. SILIWANGI NO. 2 PAMULANG	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	750.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
17	DEWAN PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN	JL. CIATER RAYA NO.5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		200.000.000
18	PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) KOTA TANGERANG SELATAN	JL. PENDIDIKAN No. 30 CIPUTAT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	30 Mei 2022	250.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
17	DEWAN PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN	JL. CIATER RAYA NO.5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	200.000.000	
18	PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) KOTA TANGERANG SELATAN	JL. PENDIDIKAN No. 30 CIPUTAT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	250.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
19	MI NURUL HIDAYAH	JL. CEMARA II RT. 001/002	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000
20	MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL IMAN	JL. CIKINI DALAM RT.003/001	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000
21	MI HADIQOTUNNASYIIN	KEBON KOPI RT. 008/004 NO 94	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000
22	MI SAADATUL MAHABBAH	JL. KEMIRI RAYA IX NO. 24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
19	MI NURUL HIDAYAH	JL. CEMARA II RT. 001/002	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	
20	MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL IMAN	JL. CIKINI DALAM RT.003/001	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	
21	MI HADIQOTUNNASYIIN	KEBON KOPI RT. 008/004 NO 94	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	
22	MI SAADATUL MAHABBAH	JL. KEMIRI RAYA IX NO. 24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
23	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TANGERANG	JL. RAYA SERPONG KM. 8 NO. 22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000
24	MI NURUL HIKMAH	JL. DR. SETIA BUDI KEBON MANGGIS RT. 002/004	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000
25	MI MIFTAH ASSA'ADAH	JL. TAMAN MAKAM BAHAGIA TNI RT. 004/004	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000
26	SMP ISLAM ALMUJAHIDIN PAMULANG	JL. SILIWANGI NO 2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
23	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TANGERANG	JL. RAYA SERPONG KM. 8 NO. 22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	
24	MI NURUL HIKMAH	JL. DR. SETIA BUDI KEBON MANGGIS RT. 002/004	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	
25	MI MIFTAH ASSA'ADAH	JL. TAMAN MAKAM BAHAGIA TNI RT. 004/004	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	
26	SMP ISLAM ALMUJAHIDIN PAMULANG	JL. SILIWANGI NO 2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
27	MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA PONDOK JAYA	JL. RAYA PONDOK JAYA RT 004/003	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000
28	MADRASAH TSANAWIYAH UNWAANUN NAJAH	JL. KOMPLEK PPI TAHAP II RT 06/02 NO.45	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000
29	MI NURUL FALAH RMJ	JL. CIATER RAYA NO. 5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000
30	MI MIFTAHUL ULUM	JL. RAYA SERPONG KM. 8 KP. BARU UTARA RT. 001/001	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
27	MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA PONDOK JAYA	JL. RAYA PONDOK JAYA RT 004/003	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	
28	MADRASAH TSANAWIYAH UNWAANUN NAJAH	JL. KOMPLEK PPI TAHAP II RT 06/02 NO.45	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	
29	MI NURUL FALAH RMJ	JL. CIATER RAYA NO. 5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	
30	MI MIFTAHUL ULUM	JL. RAYA SERPONG KM. 8 KP. BARU UTARA RT. 001/001	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
31	MI DARUSSALAM	JL. H. RASAM RT. 003/002	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000
32	MI MATHLA'UL ANWAR KADEMANGAN	JL. MASJID JAMI AL-LATIF KADEMANGAN RT. 005/002	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000
33	MI RAUDHATUL ATHFAL	JL. SMAPAL KP. BABAKAN RT. 001/002	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000
34	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-UMUMIYAH	JL. HK KP. SENGKOL RT. 003/001	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		500.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
31	MI DARUSSALAM	JL. H. RASAM RT. 003/002	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	
32	MI MATHLA'UL ANWAR KADEMANGAN	JL. MASJID JAMI AL-LATIF KADEMANGAN RT. 005/002	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	
33	MI RAUDHATUL ATHFAL	JL. SMAPAL KP. BABAKAN RT. 001/002	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	
34	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-UMUMIYAH	JL. HK KP. SENGKOL RT. 003/001	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	500.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
35	YPI NURUL FIKRI ALMUSYAFA'	JL. PESANTREN KP. CEGER RT.001/003	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000
36	YAYASAN AN-NASHIHIN	GG. MASJID JAMI AL LATIF KADEMANGAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		50.000.000
37	YAYASAN KERUKUNAN KESADARAN UMAT	JL. H. REAN RT. 002/001	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		50.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
35	YPI NURUL FIKRI ALMUSYAFA'	JL. PESANTREN KP. CEGER RT.001/003	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	
36	YAYASAN AN-NASHIHIN	GG. MASJID JAMI AL LATIF KADEMANGAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	
37	YAYASAN KERUKUNAN KESADARAN UMAT	JL. H. REAN RT. 002/001	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	BATAL

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
38	YAYASAN CITA INSANI NEGRI	JL. BUKIT NUSA INDAH NO.22 KEL. SERUA KEC. CIPUTAT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		50.000.000
39	YAYASAN BADAN PENELITI INDEPENDEN	JL. RAYA BSD GANG MAWAR NO. 21 RT. 005/01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19 Mei 2022	41.100.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
38	YAYASAN CITA INSANI NEGRI	JL. BUKIT NUSA INDAH NO.22 KEL. SERUA KEC. CIPUTAT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	BATAL
39	YAYASAN BADAN PENELITI INDEPENDEN	JL. RAYA BSD GANG MAWAR NO. 21 RT. 005/01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	41.100.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDASI OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
40	YAYASAN AL KAROMAH AS SYAFI'I JAILANI	JL. SUKA MULYA GG. H. SIMAN NO. 125 RT. 001/007	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12 MEI 2022	50.000.000
41	YAYASAN NURUS SYIFA QOLBU	JL. OSCAR RAYA NO. 99 RT. 002/002	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12 MEI 2022	50.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
40	YAYASAN AL KAROMAH AS SYAFI'I JAILANI	JL. SUKA MULYA GG. H. SIMAN NO. 125 RT. 001/007	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.000.000	
41	YAYASAN NURUS SYIFA QOLBU	JL. OSCAR RAYA NO. 99 RT. 002/002	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDASI OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
42	YAYASAN MASJID RAYA BINTARO JAYA	JL. MALEO RAYA BINTARO JAYA SEKTOR IX	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12 MEI 2022	250.000.000
43	YAYASAN AR RAHMAN KURICANG BINTARO	JL. KURICANG XVII NO. 15	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12 MEI 2022	50.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
42	YAYASAN MASJID RAYA BINTARO JAYA	JL. MALEO RAYA BINTARO JAYA SEKTOR IX	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	250.000.000	
43	YAYASAN AR RAHMAN KURICANG BINTARO	JL. KURICANG XVII NO. 15	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDASI OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
44	YAYASAN PONDOK PESANTREN AZZAHRA ALIF	JL. LINGKAR SELATAN RT 05/02 KP. SENGKOL KEL. MUNCUL	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12 MEI 2022	50.000.000
45	DKM MASJID JAMI DARURROHMAN CIPAYUNG	JL. CIMANDIRI RAYA RT 002/007	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12 MEI 2022	50.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
44	YAYASAN PONDOK PESANTREN AZZAHRA ALIF	JL. LINGKAR SELATAN RT 05/02 KP. SENGKOL KEL. MUNCUL	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.000.000	
45	DKM MASJID JAMI DARURROHMAN CIPAYUNG	JL. CIMANDIRI RAYA RT 002/007	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDASI OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
46	YAYASAN PANTI ASUHAN AR-RIDHO NU	JL. PANTI ASUHAN NO. 25 RT. 004/001	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12 MEI 2022	50.000.000
47	IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA	JL. AMPERA HANKAM KODIKLAT NO. 7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19 Mei 2022	50.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
46	YAYASAN PANTI ASUHAN AR-RIDHO NU	JL. PANTI ASUHAN NO. 25 RT. 004/001	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.000.000	
47	IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA	JL. AMPERA HANKAM KODIKLAT NO. 7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	50.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDASI OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
48	RUMAH KESADARAN INDONESIA	JL. AMPERA KODIKLAT TNI NO. 007	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	19 MEI 2022	50.000.000
49	PROPOSAL PEMBANGUNAN MASJID YAYASAN NURUL QOMAR AL-AZIIZ	JL. MASJID NURUL QOMAR NO. 31 RT.002/005	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	19 MEI 2022	50.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
48	RUMAH KESADARAN INDONESIA	JL. AMPERA KODIKLAT TNI NO. 007	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.000.000	
49	PROPOSAL PEMBANGUNAN MASJID YAYASAN NURUL QOMAR AL-AZIIZ	JL. MASJID NURUL QOMAR NO. 31 RT.002/005	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDASI OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
50	YAYASAN AL HIDAYAH GRAHA MAS SERPONG	JL. KASTURI RT. 003/012	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	19 MEI 2022	400.000.000
51	YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AL QUR'AN AL HIDAYAH	JL. WADASARI III RT. 005/002	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	19 MEI 2022	50.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
50	YAYASAN AL HIDAYAH GRAHA MAS SERPONG	JL. KASTURI RT. 003/012	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	400.000.000	
51	YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AL QUR'AN AL HIDAYAH	JL. WADASARI III RT. 005/002	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDASI OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
52	YAYASAN ISLAM BANI MURIDA	JL. MUSHOLA ARRAHMAN RT. 001/003	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	19 MEI 2022	50.000.000
53	YPI JALSATUL MUSTHOFA	JL. MASJD AL ABROR RT. 013/001	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	19 MEI 2022	50.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
52	YAYASAN ISLAM BANI MURIDA	JL. MUSHOLA ARRAHMAN RT. 001/003	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.000.000	
53	YPI JALSATUL MUSTHOFA	JL. MASJD AL ABROR RT. 013/001	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDASI OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
54	YAYASAN BAHRUL ULUM	KP. BULAK INDAH RT. 006/003	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	19 MEI 2022	50.000.000
55	IKATAN MUBALLIGH MUBALLIGHOH NUSANTARA	JL. H. SARMAH NO. 100 RT. 004/02	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	24 MEI 2022	50.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
54	YAYASAN BAHRUL ULUM	KP. BULAK INDAH RT. 006/003	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.000.000	
55	IKATAN MUBALLIGH MUBALLIGHOH NUSANTARA	JL. H. SARMAH NO. 100 RT. 004/02	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDASI OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
56	YAYASAN AL IHSAN PAMULANG	JL BAMBUS APUS RAYA	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	24 MEI 2022	50.000.000
57	YAYASAN ABDUSSHOMAD PONPES AL BARKAH AL ISLAMIAH	JL PONDOK AREN RAYA No. 55	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	24 MEI 2022	100.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
56	YAYASAN AL IHSAN PAMULANG	JL BAMBUS APUS RAYA	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.000.000	
57	YAYASAN ABDUSSHOMAD PONPES AL BARKAH AL ISLAMIAH	JL PONDOK AREN RAYA No. 55	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDASI OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
58	DKM MASJID AL BARKAH	JL RAYA CILEDUG JOMBANG No. 1	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	24 MEI 2022	100.000.000
59	PONDOK PESANTREN YATIM AL HANIF	JL. RAYA BUKIT INDAH No. 5 RT 003/002	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	24 MEI 2022	250.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
58	DKM MASJID AL BARKAH	JL RAYA CILEDUG JOMBANG No. 1	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100.000.000	
59	PONDOK PESANTREN YATIM AL HANIF	JL. RAYA BUKIT INDAH No. 5 RT 003/002	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	250.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDASI OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
60	FORUM PERSATUAN MAJELIS TA'LIM	JL. LOBAK I GG. LOBAK VI RT 003/007 No. 5	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	24 MEI 2022	50.000.000
61	YAYASAN MASJID AGUNG DISCOVERY	JL DISCOVERY ELOA II	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	30 MEI 2022	3.000.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
60	FORUM PERSATUAN MAJELIS TA'LIM	JL. LOBAK I GG. LOBAK VI RT 003/007 No. 5	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	BATAL
61	YAYASAN MASJID AGUNG DISCOVERY	JL DISCOVERY ELOA II	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.000.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDASI OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
62	YAYASAN AMIN SYARBINI PONDOK PESANTREN JAM'IIYAH ISLAMIYYAH	JL. PESANTREN KP. CEGER	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	30 MEI 2022	1.500.000.000
63	PWRI/PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA KOTA TANGERANG SELATAN	JL. RAYA SILIWANGI NO. 2	DINAS SOSIAL		200.000.000
64	PESATUAN TUNA NETRA INDONESIA (PERTUNI)	JL. CENDRAWASIH VILLA CENDRAWASIH I BLOK. A NO. 2 RT. 001/05	DINAS SOSIAL		160.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
62	YAYASAN AMIN SYARBINI PONDOK PESANTREN JAM'IIYAH ISLAMIYYAH	JL. PESANTREN KP. CEGER	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.500.000.000	
63	PWRI/PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA KOTA TANGERANG SELATAN	JL. RAYA SILIWANGI NO. 2	DINAS SOSIAL	200.000.000	
64	PESATUAN TUNA NETRA INDONESIA (PERTUNI)	JL. CENDRAWASIH VILLA CENDRAWASIH I BLOK. A NO. 2 RT. 001/05	DINAS SOSIAL	160.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
65	BADAN WAKAF INDONESIA KOTA TANGERANG SELATAN	JL. BENDA TIMUR 10 BLOK. F3 NO. 8	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	200.000.000	BARU
66	MASJID JABAL NUR	PERUMAHAN VILLA PAMULANG CLUSTER HARMONIA CH2 NO. 15 RT. 003/017	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	100.000.000	BARU
67	DEWAN PIMPINAN DAERAH PENGAJIAN AL-HIDAYAH KOTA TANGERANG SELATAN	JL. PINANG NO. 5 RT.01/02	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	200.000.000	BARU
68	PENGURUS DAERAH IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA KOTA TANGERANG SELATAN	GEDUNG KELEMBAGAAN JL. SILIWANGI NO. 3 PAMULANG	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	150.000.000	BARU

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
69	SD LABSCHOOL FIP UMJ	JL. KH.AHMAD DAHLAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100.000.000	BARU
70	YAYASAN AL IKHLAS PANORAMA SERPONG	KOMPLEK PERUMAHAN PANORAMA SERPONG BLOK D6/6 RT. 06/ 06	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	150.000.000	BARU
71	YAYASAN AL QAAF	JL. PONDK AREN III NO.8 RT 01/03	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	100.000.000	BARU
72	YAYASAN AMAL KEKAYAAN INDONESIA	JL. H. BASIR II NO. 192 RT. 01/03	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50.000.000	BARU
73	YAYASAN AR ROBBANI	KOMPLEK PUSPITA LOKA EXT. III BLOK AC NO. 35 BSD	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	100.000.000	BARU
74	YAYASAN ASRAMA YATIM DHUAFa	JL.H. BASIR RT 002/003 NO.56	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	100.000.000	BARU

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
75	YAYASAN BAITURRAHIM CIATER TENGAH	KP. CIATER TENGAH RT. 003/ 007	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	150.000.000	BARU
76	YAYASAN CAHAYA WARU	JL. WARU 1 NO. 90A	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	100.000.000	BARU
77	YAYASAN DARUL IZZAH	JL. SUMATRA NO. 125 RT. 002/006	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	100.000.000	BARU
78	YAYASAN JAMI AL BAROKAH	JL. AMPERA PONCOL RT 007/002	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	50.000.000	BARU
79	YAYASAN MASJID AL MUHAJIRIN PELITA	PERUMAHAN BUMI PELITA KENCANA BLOK A 8 NO. 13 RT. 002/009	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	100.000.000	BARU
80	YAYASAN NURUL JAMI BAKTI JAYA	JL. PESONA UTAMA RT. 08/ 07	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	50.000.000	BARU
81	YAYASAN PONDOK BINA INSANI AL QOMARIYAH	JL. KH DEWANTARA GG. SUKA	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	100.000.000	BARU

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
JUMLAH HIBAH UANG					58.906.100.000
B	HIBAH BARANG				

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
		DAMAI NO. 170 RT. 003/004			
82	YAYASAN RAHMAT SEMESTA	JL. SEMANGGI 2 NO 78 RT. 004/005	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	100.000.000	BARU
83	YAYASAN TAHFIDZUL QUR'AN DARURROZAK AL HAROMAIEN	BULAK WANGI NO. 3 RT. 006/013	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	100.000.000	BARU
84	YAYASAN TRITUNGGAL TARUNA BANGSA	JL. KAYU MANIS, BUKIT NUSA INDAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	200.000.000	BARU
JUMLAH HIBAH UANG				61.056.100.000	
B	HIBAH BARANG				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023						PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET	
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD		
1	National Paralympic Committe Indonesia (NPCI)	Jl kavling Keuangan RT 01 RW 02 No 30 kelurahan Kedaung, Pamulang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	28 April 2022	150.000.000	1	National Paralympic Committe Indonesia (NPCI)	Jl kavling Keuangan RT 01 RW 02 No 30 kelurahan Kedaung, Pamulang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	150.000.000		
2	PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA TANGERANG SELATAN	JALAN CENDIKIA SEKTOR 11, CIATER, SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN. 15310	DINAS KESEHATAN		7.600.000.000	2	PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA TANGERANG SELATAN	JALAN CENDIKIA SEKTOR 11, CIATER, SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN. 15310	DINAS KESEHATAN	7.600.000.000		
JUMLAH HIBAH BARANG						JUMLAH HIBAH BARANG					7.750.000.000	
C	BANTUAN SOSIAL					C	BANTUAN SOSIAL					
1	YAYASAN MUAWWANAH DASOMAT	JL. MASJID AL HIDAYAH RT. 006/002	DINAS SOSIAL		50.000.000	1	YAYASAN MUAWWANAH DASOMAT	JL. MASJID AL HIDAYAH RT. 006/002	DINAS SOSIAL	50.000.000		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDASI OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
	RAUDHATUL JANNAH				
2	YAYASAN AL MATIIN	JL. H. NASA SYAMSUDIN RT. 011/017	DINAS SOSIAL		50.000.000
3	YAYASAN DESA HIJAU	Jl. Masjid At Tauhid Gg.H.Kuming 2 No 123	DINAS SOSIAL		50.000.000
4	YAYASAN AINURROHMAH CIATER	Jl. Ciater Barat No.11 RT 005/002	DINAS SOSIAL		50.000.000
5	YAYASAN NURUL IHSAN	Jl. Momonggor Rt 001/001	DINAS SOSIAL		50.000.000
6	LKSA HAYATUS SAKINAH	JL. AL-HIDAYAH KP. PARAKAN RT.02 RW. 09	DINAS SOSIAL		30.000.000
7	YAYASAN AL ABQO AMANAH	Jl. Raya Jombang No.24 Rt 002/07	DINAS SOSIAL		50.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
	RAUDHATUL JANNAH				
2	YAYASAN AL MATIIN	JL. H. NASA SYAMSUDIN RT. 011/017	DINAS SOSIAL	50.000.000	
3	YAYASAN DESA HIJAU	Jl. Masjid At Tauhid Gg.H.Kuming 2 No 123	DINAS SOSIAL	50.000.000	
4	YAYASAN AINURROHMAH CIATER	Jl. Ciater Barat No.11 RT 005/002	DINAS SOSIAL	50.000.000	
5	YAYASAN NURUL IHSAN	Jl. Momonggor Rt 001/001	DINAS SOSIAL	50.000.000	
6	LKSA HAYATUS SAKINAH	JL. AL-HIDAYAH KP. PARAKAN RT.02 RW. 09	DINAS SOSIAL	30.000.000	
7	YAYASAN AL ABQO AMANAH	Jl. Raya Jombang No.24 Rt 002/07	DINAS SOSIAL	50.000.000	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	TANGGAL SURAT REKOMENDAS I OPD	PAGU PERTIMBANGAN TAPD
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
JUMLAH BANTUAN SOSIAL					330.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023					KET
No	NAMA CALON PENERIMA	ALAMAT CALON PENERIMA	OPD PEMBINA	PAGU PERTIMBANGAN TAPD	
8	LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA	JL. H, USMAN NO. 1 RT. 001/006	DINAS SOSIAL	75.000.000	BARU
9	AL FALAH ISLAMIC CENTRE INDONESIA	JL. BETAWI RT. 03/ 09 KP. GUNUNG KALIMATI	DINAS SOSIAL	75.000.000	BARU
10	YAYASAN DARUL ALIYAH AL ANWAR	JL. PONDOK JAYA NO. 11 RT. 005/002	DINAS SOSIAL	65.000.000	BARU
11	YAYASAN PUTRA PANCA WIYATA	JL. NANGKA NO 14 RT 004/010	DINAS SOSIAL	75.000.000	BARU
12	YAYASAN SAHABAT YATIM INDONESIA	JL. GRAHA RAYA BLOK M. 7 NO. 17	DINAS SOSIAL	75.000.000	BARU
13	YAYASAN SAHABAT YATIM MANDIRI	JL. KETAPANG 3 NO. 1 B RT. 006/ 006	DINAS SOSIAL	75.000.000	BARU
JUMLAH BANTUAN SOSIAL				770.000.000	

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyesuaian pembiayaan daerah dalam perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 memuat hasil audit BPK-RI terhadap Penggunaan SILPA tahun 2022, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.11. Struktur Perubahan Pembiayaan Tahun 2023 Kota Tangerang Selatan

No	Struktur	TAHUN 2023					Perubahan RKPD Tahun 2023	Penambahan/ Pengurangan (RKPD - RKPD Perubahan)	Keterangan
		RKPD	APBD Murni	APBD Pergeseran Tahap 1	APBD Pergeseran Tahap 2	APBD Pergeseran Tahap 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8-7)	10
6	PEMBIAYAAN								
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	250.000.000.000	589.348.135.011	589.348.135.011	589.348.135.011	589.348.135.011	523.829.325.526	273.829.325.526	
6.1.1	Penggunaan SILPA	250.000.000.000	589.348.135.011	589.348.135.011	589.348.135.011	589.348.135.011	523.829.325.526	273.829.325.526	Audited BPK
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	(30.000.000.000)	
6.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	40.000.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	(30.000.000.000)	
	PEMBIAYAAN NETTO	210.000.000.000	559.348.135.011	579.348.135.011	579.348.135.011	579.348.135.011	513.829.325.526	303.829.325.526	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerah, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 tetap mengacu sesuai RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023, yaitu tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 periode ke-2 untuk mewujudkan visi Kota Tangerang Selatan pada tahun 2026 yaitu:

“Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien”

Terdapat 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

- 1 Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul
- 2 Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi
- 3 Membangun Kota yang Lestari
- 4 Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif
- 5 Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Adapun tujuan, sasaran dan indikator pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 disajikan dalam tabel 4.1. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam bab II, terdapat indikator sasaran pembangunan daerah yang dilakukan reformulasi dikarenakan capaiannya sudah melampaui target yang ditetapkan dalam RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi			Target 2023	Target Akhir RPJMD 2026	Target P-RKPD 2023	Keterangan
					2021	2022	s.d TW II 2023				
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm) Yang Unggul	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indek Pembangunan Manusia	81,95	81,95	81,95	81,81	82,4	81,96	Reformulasi Target
				Indeks Pendidikan	80,22	80,22	80,22	80,44	81,67	80,44	Tetap
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	72,78	72,78	72,78	72,56	72,67	72,93	Reformulasi Target
			Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Predikat)	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Tetap
			Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	53,43	53,43	53,43	53,4	55	53,70	Reformulasi Target
			Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender	93,96	93,96	93,96	93,58	93,6	93,97	Reformulasi Target
				Indeks Pemberdayaan Gender	73,08	72,67	73,08	73,85	73,87	73,85	Tetap
2	Pembangunan Infrastruktur Yang Saling Terkoneksi	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi	Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5,75	5,75	5,75	5,4	7	5,4	Tetap
				Rasio konektivitas Kota	0,63	0,63	0,63	0,59	1	0,59	Tetap
				Kinerja Lalulintas/ Transportasi Kota (V/C Ratio)	0,54	0,54	0,54	0,52	0,46	0,52	Tetap
3				Indeks kota layak huni	68,84	68,84	68,84	65,5 - 66,3	67	65,5 - 66,3	Tetap

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi			Target 2023	Target Akhir RPJMD 2026	Target P-RKPD 2023	Keterangan
					2021	2022	s.d TW II 2023				
	Membangun Kota Yang Lestari	Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,66	56,66	56,66	51,9	52,2	51,9	Tetap
				Persentase permukiman layak huni (Persen)	99,25%	99,25%	99,25%	99,37%	100,00%	99,37%	Tetap
				Cakupan Pengelolaan Sampah (Persen)	90,73%	90,73%	90,73%	93,00%	100%	93,00%	Tetap
				Ruang Terbuka Hijau Publik (Persen)	4,30%	4,30%	4,30%	4,31%	5,00%	4,31%	Tetap
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan	Indeks Rasa Aman (Predikat)	Aman (66,69)	Aman (66,69)	Aman (66,69)	Aman	Aman	Aman	Tetap
				Indeks Demokrasi (Predikat)	Baik (81)	Baik (81)	Baik (81)	Sedang	Sedang	Baik	Reformulasi Target
				Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non-Alam	Indeks resiko bencana (Predikat)	Sedang (79,86)	Sedang (79,86)	Sedang (79,86)	Rendah (70)	Rendah	Rendah (70)
4	Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi Di Sektor Ekonomi Kreatif	Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	Indeks Daya Saing Daerah (Predikat)	Tinggi (3,71)	Tinggi (3,71)	Tinggi (3,71)	Sedang	Tinggi	Tinggi	Reformulasi Target
				Nilai sektor ekonomi kreatif (Triliun Rupiah)	7,8	7,8	7,8	8,72	10,77	8,72	Tetap
			Meningkatnya Investasi	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	4,65	4,65	4,65	4,66	5,39	4,66	Tetap
			Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Produktifitas tenaga kerja per total output (Rupiah)	81692100	81.692.100	81.692.100	85.289.742	95.512.855	85.289.742	Tetap

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi			Target 2023	Target Akhir RPJMD 2026	Target P-RKPD 2023	Keterangan
					2021	2022	s.d TW II 2023				
				Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa (Rupiah)	70.982.071	70.982.071	70.982.071	87.022.906	98.166.098	87.022.906	Tetap
5	MEMBANGUN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	66	65,61	65,61	66	70	66	Tetap
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (66,92)	B (66,92)	B (66,92)	BB (71)	BB (70)	BB (71)	Tetap
				Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	N/A	N/A	N/A	3,8	4,2	3,8	Tetap
				Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tetap
				Indeks Persepsi Korupsi	73,32	73,32	73,32	83	85	83	Tetap
				Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	83,5	83,5	84	88,3	84	Tetap

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

Target indikator sasaran pembangunan daerah yang tertuang pada tabel 4.1. merupakan indikator utama daerah yang perwujudannya dilaksanakan melalui pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan daerah sebagaimana disajikan pada tabel 4.2. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam bab II, terdapat indikator kinerja penyelenggaraan urusan daerah yang dilakukan reformulasi karena capaiannya sudah melampaui target yang ditetapkan dalam RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023, secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 2023	Target 2023	Target Akhir RPJMD 2026	Reformulasi Target P-RKPD 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
	Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga Tangerang Selatan usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM)	Persen	96,85%	96,85%	98,58%	100%	98,58%	Tetap
2	Tingkat partisipasi warga Tangerang Selatan usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (APM)	Persen	86,11%	86,11%	88,22%	89,45%	88,22%	Tetap
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	1,67%	1,67%	1,80%	1,81%	100,00%	Reformulasi Target
4	Persentase sekolah dengan hasil assesment nasional berbasis komputer di atas rata-rata Provinsi Banten	Persen	N/A	N/A	86,41%	86,56%	86,41%	Tetap
	Kesehatan							
5	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	92%	92%	100%	100%	100%	Tetap
6	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	92%	92%	100%	100%	100%	Tetap
7	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	94%	94%	100%	100%	100%	Tetap
8	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	93%	93%	100%	100%	100%	Tetap

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 2023	Target 2023	Target Akhir RPJMD 2026	Reformulasi Target P-RKPD 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
10	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai dengan standar minimal 1 kali yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu satu tahun	Persen	92%	92%	100%	100%	100%	Tetap
11	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup		36,7	36,7	31,88	31,82	31,88	Tetap
12	Angka Kematian Bayi per 1.000 Klahiran Hidup		0,03	0,03	0,79	0,76	0,03	Reformulasi Target
13	Prevalensi Stunting Balita		9	9	14,45	13,69	8,00	Reformulasi Target
14	Prevalensi Kurang Energi Kronis Pada Ibu Hamil		3,8	3,8	3,92	3,89	3,61	Reformulasi Target
15	Prevalensi obesitas sentral		40,5	40,5	37	30	37	Tetap
16	Prevalensi balita gizi buruk		0,039	0,039	0,04	0,04	0,037	Reformulasi Target
17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan		86,90%	86,90%	84%	90	95,59%	Reformulasi Target
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
18	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	Persen	44,05%	44,05%	46,01%	52,61%	46,01%	Tetap
19	Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik	Persen	93,71%	93,71%	76,80%	92,00%	94,65%	Reformulasi Target

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 2023	Target 2023	Target Akhir RPJMD 2026	Reformulasi Target P-RKPD 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Persentase jalan (termasuk simpang dan jembatan) yang dilebarkan	Persen	52,04%	52,04%	82,23%	96,77%	82,23%	Tetap
21	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	17,33%	17,33%	24%	60%	24%	Tetap
22	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	36,60%	36,60%	44,55%	69,48%	44,55%	Tetap
23	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persen	86,49%	86,49%	100%	100%	100%	Tetap
24	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	Persen	95,82%	95,82%	100%	100%	100%	Tetap
25	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik	Persen	50,26%	50,26%	60,32%	100,00%	60,32%	Tetap
	Perumahan Rakyat							
26	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	
27	Persentase jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani	Persen	0,76%	0,76%	0,70%	0,52%	0,77%	Reformulasi Target
28	Cakupan lingkungan perumahan yang PSU-nya diserahkan ke pemerintah daerah (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	59,44%	59,44%	73,90%	100%	73,90%	Tetap
	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 2023	Target 2023	Target Akhir RPJMD 2026	Reformulasi Target P-RKPD 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
30	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
31	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
			(318.449 jiwa)	(318.449 jiwa)		(318.449 jiwa)		
32	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	Tetap
			(318.449 jiwa)	(318.449 jiwa)		(318.449 jiwa)		
33	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		74.812	74.812	318.449	318.449	318.449	Tetap
34	Meningkatnya cakupan layanan penanganan Kebakaran kabupaten/kota	Persen	100%	100%	30,79%	39,59%	30,79%	Tetap
	Sosial							
35	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Tetap
36	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 2023	Target 2023	Target Akhir RPJMD 2026	Reformulasi Target P-RKPD 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	KK	5	5	5	25 KK	5	Tetap
38	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar yang tertangani dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terverifikasi dan tervalidasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
39	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	Tetap
40	Cakupan TMP yang terkelola	TMP	1	1	1	1 TMP	1	Tetap
	Tenaga Kerja							
41	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	
42	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	34%	34%	13%	20%	34,34%	Reformulasi Target
43	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	Persen	33%	33%	10%	50%	33,33%	Reformulasi Target
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
44	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk perempuan	Persen	29,36	29,36	12,7	12,7	12,7	Tetap
45	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Persen	30%	30%	32%	32%	32%	Tetap
46	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	91,40%	91,40%	91,69%	91,72%	91,69%	Tetap

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 2023	Target 2023	Target Akhir RPJMD 2026	Reformulasi Target P-RKPD 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Rasio kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 10.000 anak	Persen	0,04	0,04	4,18	4,18	4,04%	Reformulasi Target
48	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Nindya	Tetap
	Pangan							
49	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras sesuai kebutuhan)	Persen	27,40%	27,40%	41,34%	100,00%	41,34%	Tetap
50	Rata-rata konsumsi energi per kapita (kkal/kapita/hari)		2031	2031	2200	2200	2200	Tetap
51	Rata-rata konsumsi protein per kapita (gr/kapita/hari)		64,6	64,6	57	57	65,25	Reformulasi Target
	Pertanahan							
52	Persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk	Persen	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	Tetap
	Lingkungan Hidup							
53	Cakupan Pengelolaan Sampah	Persen	90,73%	90,73%	93,00%	100%	93,00%	Tetap
54	Pengurangan ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota.	Persen	16%	16%	12%	0%	12%	Tetap
55	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) / Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	36,62	36,62	45,39	45,69	45,39	Tetap
56	Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	66	66	47,2	47,5	66	Reformulasi Target
		Indeks	68,58	68,58	65,31	65,61	68,58	Reformulasi Target

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 2023	Target 2023	Target Akhir RPJMD 2026	Reformulasi Target P-RKPD 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Cakupan lembaga masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
58	Kebijakan/Rencana/Program Strategis Kota yang terintegrasi dg RPPLH dan/atau KLHS	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
59	Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
60	Cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sampai dinyatakan selesai	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
61	Persentase Penduduk Memiliki KTP	Persen	99,26%	99,26%	93,16%	98,00%	100%	Reformulasi Target
62	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	Persen	46,50%	46,50%	61,83%	91,95%	61,83%	Tetap
63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	11	11	12	15 OPD	12	Tetap
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
64	Angka Kelahiran Total (TFR)	Kelahiran	2,08	2,08	2,06	2,03 Kelahiran	2,06	Tetap
65	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	6,10%	6,10%	6,10%	6,00%	6,10%	Tetap
Perhubungan								
66	Rasio Trayek yang dilayani	Persen	0,63	0,63	0,71	100% (27 dari 27 trayek)	0,71	Tetap
67	Pengurangan titik kemacetan	Titik	38	38	37	34	37	Tetap

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 2023	Target 2023	Target Akhir RPJMD 2026	Reformulasi Target P-RKPD 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Komunikasi dan Informatika							
68	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
69	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
70	Indeks SPBE	Indeks	2,54	2,54	3,4	3,7 (Sangat Baik)	3,4	Tetap
71	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Kategori	91,38 (Informatif)	91,38 (Informatif)	94,4	94,55 (Informatif)	94,4	Tetap
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
72	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	8%	8%	9%	15%	9%	Tetap
73	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi usaha kecil	Persen	2,48%	2,48%	2,50%	3%	2,50%	Tetap
	Penanaman Modal							
74	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)	Indeks	88,59%	88,59%	89%	90,5	89%	Tetap
	Kepemudaan dan Olahraga							
75	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	2,74%	2,74%	1,20%	2,40%	2,77%	Reformulasi Target
76	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	11	11	5	25 Medali	11	Reformulasi Target

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 2023	Target 2023	Target Akhir RPJMD 2026	Reformulasi Target P-RKPD 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Statistik							
77	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
	Kebudayaan							
78	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	5,25	5,26	5,25	Tetap
	Perpustakaan							
79	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Kategori	Tinggi	Tinggi	sedang	Tinggi	sedang	Tetap
80	Literasi membaca penduduk Tangsel	Kategori	Sedag	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tetap
81	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Persen	8%	8%	9%	12%	9%	Tetap
82	Jumlah perpustakaan yang terakreditasi	perpustakaan	4	4	4	4	4	Tetap
83	Persentase kecukupan koleksi perpustakaan per jumlah penduduk Tangerang Selatan	Persen	57%	57%	28%	31%	58%	Reformulasi Target
	Kearsipan							
84	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	50%	50%	53%	60%	53%	Tetap
85	Nilai kualitas pengelolaan kearsipan	Nilai	60,07	60,07	67	82	67	Tetap
	Urusan Pilihan							
	Kelautan dan perikanan							
86	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton	296,1	296,1	298	345	298	Tetap

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 2023	Target 2023	Target Akhir RPJMD 2026	Reformulasi Target P-RKPD 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pariwisata							
87	Tingkat hunian akomodasi	Persen	20%	20%	17,50%	25%	21%	Reformulasi Target
88	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	2,5	2,5	2,71	3,05	2,71	Tetap
89	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Miliar Rupiah)	Miliar Rupiah	386,76	386,76	274,03	317,23	390,63	Reformulasi Target
90	Jumlah wisatawan mancanegara (Orang)	Orang	20.500	20.500	9.792	11.336	20.500	Reformulasi Target
91	Jumlah wisatawan nusantara (Orang)	Orang	1.758.924	1.758.924	767.312	888.260	1.762.442	Reformulasi Target
	Pertanian							
92	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	13%	13%	10%	10%	10%	Tetap
93	Produktivitas Pertanian (ton/ha)	Ton/Ha	42	42	12,5	20	42	Reformulasi Target
	Perdagangan							
94	Jumlah peningkatan produk IKM yang diperdagangkan dalam negeri	Produk	53	53	50	250	54	Reformulasi Target
95	Persentase pertumbuhan perdagangan luar negeri	Persen	11%	11%	10%	10%	11%	Reformulasi Target
96	Persentase harga bahan pokok dan bahan penting lainnya yang terkendali	Persen	97%	97%	100%	100%	100%	Tetap
	Perindustrian							
97	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Persen	20%	20%	20%	20%	20%	Tetap

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 2023	Target 2023	Target Akhir RPJMD 2026	Reformulasi Target P-RKPD 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	Persentase peningkatan produk Industri Kecil Menengah (IKM)	Persen	10%	10%	10%	10%	10%	Tetap
	Urusan Penunjang							
	Perencanaan dan Keuangan							
99	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tetap
100	Nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota	Nilai	21,97	21,97	26	28	26	Tetap
101	Nilai Pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota	Nilai	16,51	16,51	20	22	20	Tetap
102	Nilai capaian Kinerja pada LHE SAKIP Kota	Nilai	12,19	12,19	16	18	16	Tetap
	Kepegawaian							
103	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	55,29	55,29	60	72	60	Tetap
	Transparansi dan Partisipasi Publik							
104	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
	Sekretariat Daerah							
105	Persentase Pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci	Persen	55%	55%	65%	80%	65%	Tetap
106	Presentase Kualitas Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persen	100%	100%	90%	90%	100%	Reformulasi Target
107	Terkendalnya inflasi daerah	Persen	6,72%	6,72%	2%-4%	2%-4%	2%-4%	Tetap
108	Capaian Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Persen	91,56%	91,56%	86,50%	91,00%	92%	Reformulasi Target
109	Predikat Kematangan Perangkat Daerah	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tetap
	Sekretariat DPRD							

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi s.d TW2 2023	Target 2023	Target Akhir RPJMD 2026	Reformulasi Target P-RKPD 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
	Inspektorat Daerah							
111	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,11	3,11	3	3	3	Reformulasi Target
	Unsur Kewilayahan							
	KECAMATAN							
112	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	83	83	84,57	88,43	84,57	Tetap
113	Persentase individu sampai tingkat kesejahteraan 40% (DTKS)	Persen	12%	12%	11,60%	11,30%	12,12%	Reformulasi Target
	Unsur Pemerintahan Umum							
	Kesatuan Bangsa dan Politik							
114	Jumlah kejadian/peristiwa konflik di masyarakat	Kejadian	8	8	10	7 Kejadian	8	Reformulasi Target
115	Jumlah Aspirasi Publik yang di sampaikan Oleh Masyarakat/Kelompok Masyarakat sesuai ketentuan	Aspirasi	N/A	N/A	385	380 Aspirasi	385	Tetap
116	Rata Rata Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres		-	-	-	-	-	Tetap

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Dalam menentukan prioritas pembangunan untuk periode berkenaan, penyusunan RKPD berpedoman pada Strategi RPJMD, yang merupakan prioritas pembangunan Daerah lima tahunan, yang dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, tetap mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023, sebagaimana dituangkan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Strategi Pembangunan Daerah RPJMD Tahun 2021-2026

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023
1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG UNGGUL	1.1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1.1.1. Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan	1.1.1.1. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dasar bagi semua penduduk	Pemerataan akses masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan
			1.1.1.2. Meningkatkan kualitas pendidikan berbasis agama, teknologi, dan budaya	
			1.1.1.3. Meningkatkan literasi dan budaya membaca	
			1.1.1.4. Meningkatkan pengembangan seni, budaya, dan olahraga	
		1.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1.2.1. Memperluas cakupan pelayanan kesehatan universal bagi masyarakat.	
			1.1.2.2. Mengoptimalkan kualitas layanan Kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang memadai	
			1.1.2.3. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.	

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023
			1.1.2.4. Menurunkan prevalensi stunting	
		1.1.3 Meningkatnya kesejahteraan keluarga	1.1.3.1. Mengendalikan angka kelahiran	
			1.1.3.2. Memenuhi kebutuhan dasar PPKS	
			1.1.3.3. Meningkatkan konsumsi pangan keluarga dalam jumlah cukup dan berkualitas	
		1.1.4. Meningkatkan daya saing pemuda	1.1.4.1. Meningkatkan kapasitas organisasi pemuda dan kepramukaan	
		1.1.5. Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	1.1.5.1. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.	
2. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG SALING TERKONEKSI	2.1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi	2.1.1. Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	2.1.1.1. Meningkatkan penggunaan layanan angkutan umum	Peningkatan konektivitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.
			2.1.1.2. Meningkatkan kinerja lalu lintas dan kualitas sistem jaringan jalan sesuai standar teknis	
3. MEMBANGUN KOTA YANG LESTARI	3.1. Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni	3.1.1. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	3.1.1.1. Meningkatkan penyediaan ruang publik yang aman dan nyaman	
			3.1.1.2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023
			3.1.1.3. Meningkatkan pengelolaan sistem persampahan yang terintegrasi berbasis teknologi dan ramah lingkungan	
			3.1.1.4. Meningkatkan pencegahan dan penanganan kawasan kumuh perkotaan	
			3.1.1.5. Meningkatkan akses masyarakat memperoleh kebutuhan pokok air minum perpipaan sehari-hari dan layanan pengolahan air limbah domestik	
			3.1.1.6. Meningkatkan penataan bangunan, lingkungan, dan penataan ruang	
			3.1.1.7. Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan umum dan pemerintahan	
		3.1.2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan	3.1.2.1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	
			3.1.2.2. Meningkatkan Kerukunan Hidup Berbangsa dan Bernegara	
			3.1.2.3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023
		3.1.3. Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	3.1.3.1. Meningkatkan pencegahan, layanan kesiapsiagaan, dan penanganan bencana yang terintegrasi	
			3.1.3.2. Memenuhi standar waktu tanggap/ <i>response time rate</i> penanganan kebakaran dan penyelamatan	
4. MENINGKATKAN EKONOMI BERBASIS NILAI TAMBAH TINGGI DI SEKTOR EKONOMI KREATIF	4.1. Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah	4.1.1. Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	4.1.1.1. Menumbuhkembangkan koperasi dan UMKM yang berkualitas menuju ekonomi kreatif.	Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa termasuk ekonomi kreatif
			4.1.1.2. Menyediakan stimulus dan insentif permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha UMKM dan ekonomi kreatif	
			4.1.1.3. Mengembangkan ekonomi digital bagi pelaku usaha UMKM dan ekonomi kreatif.	
			4.1.1.4. Mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi pada kelompok masyarakat	
			4.1.1.5. Meningkatkan tingkat okupansi hotel, restoran, festival, dan MICE.	
			4.1.1.6. meningkatkan produktifitas sektor perindustrian dan perdagangan	

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023
		4.1.2. Meningkatnya Investasi	4.1.2.1. Meningkatkan nilai investasi yang masuk dengan mengoptimalkan promosi berbasis potensi dan memberikan insentif investasi.	
			4.1.2.2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan.	
		4.1.3. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	4.1.3.1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja	
			4.1.3.2. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan	
5. MEMBANGUN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	5.1. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	5.1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	5.1.1.1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dengan konsep <i>corporate university</i>	Penguatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan.
			5.1.1.2. Memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah	
			5.1.1.3. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di daerah.	
			5.1.1.4. Mewujudkan unit kerja perangkat daerah bebas korupsi	
			5.1.1.5. Melakukan <i>open bidding</i> untuk lurah dan camat	
			5.1.1.6. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan penyediaan data	
			5.1.1.7. Meningkatnya kualitas system	

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023
			pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	
			5.1.1.8. Meningkatkan kerjasama pembiayaan pembangunan daerah	
			5.1.1.9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	
			5.1.1.10. Menata organisasi birokrasi yang efektif dan efisien	
			5.1.1.11. Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan	
			5.1.1.12. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah	
			5.1.1.13. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	
			5.1.1.14. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah	
			5.1.1.15. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	
			5.1.1.16. Meningkatkan rasio PAD terhadap APBD	
			5.1.1.17. Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil	
			5.1.1.18. Meningkatkan kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	
			5.1.1.19. Meningkatkan kualitas kelembagaan	

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023
			5.1.1.20. Fasilitasi penyediaan tanah untuk kepentingan publik	

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Perencanaan pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2023 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2023 juga disusun dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

4.4.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

RKP Tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, sebagaimana tersaji pada Gambar berikut.



Gambar 4.1. Tema RKP Tahun 2023

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini.



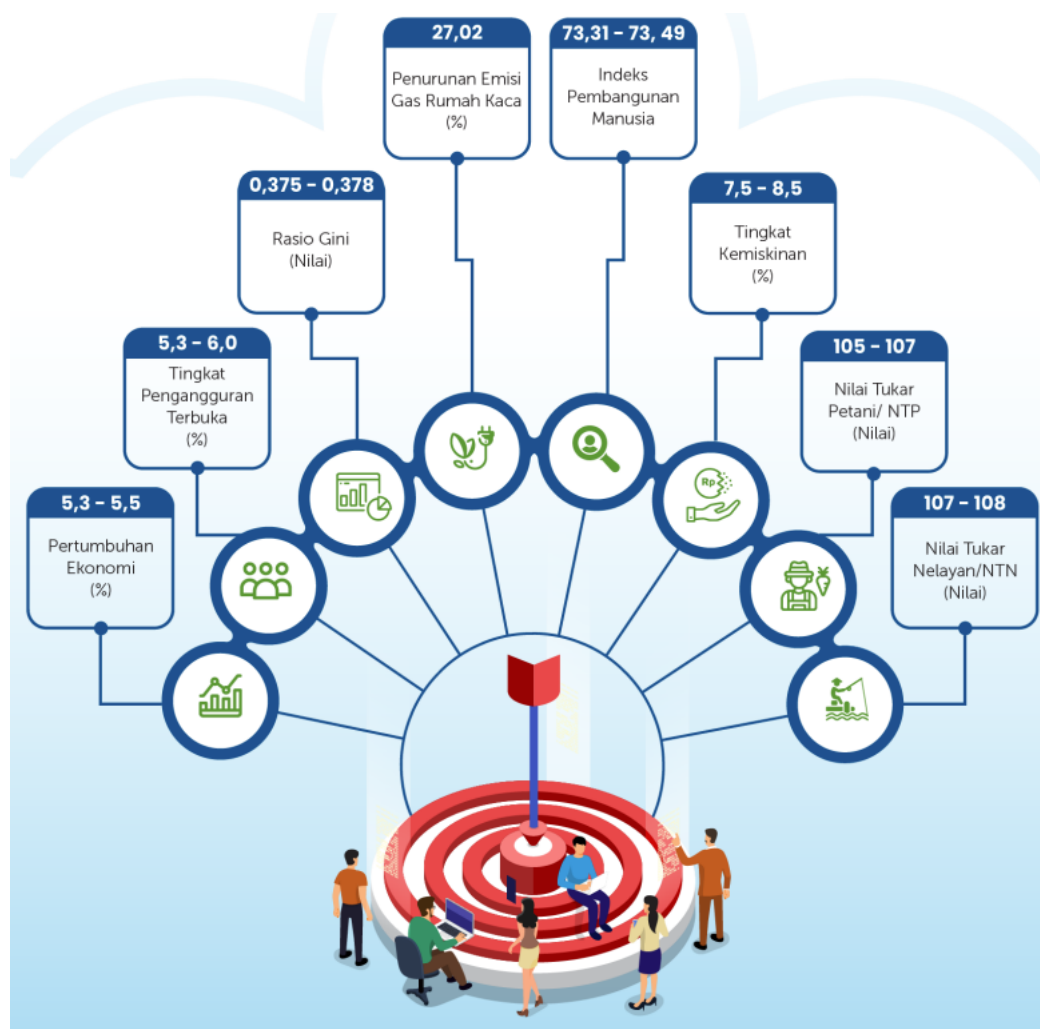
Gambar 4.2. Arah Kebijakan RKP Tahun 2023

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sedangkan target indikator pembangunan dalam RKP tahun 2023 sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini.



Gambar 4.3. Target Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023

Dukungan pendanaan rencana kerja pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai kewenangan dan kemampuan daerah dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.4. Dukungan Pendanaan terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Prioritas Nasional	Pagu
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	245.543.202.512
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1.073.593.203.528
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	99.627.593.537
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	945.804.965.508
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	436.937.790.848
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	1.693.500.436.239
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	45.485.656.592
Total	4.540.492.848.764

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

4.4.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023

Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 adalah “Memperkuat Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Fondasi Tahap”. untuk mencapai sasaran pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023 dirumuskan prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
4. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Dukungan pendanaan rencana kerja pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan yang selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Banten tahun

2023 sesuai kewenangan dan kemampuan daerah dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

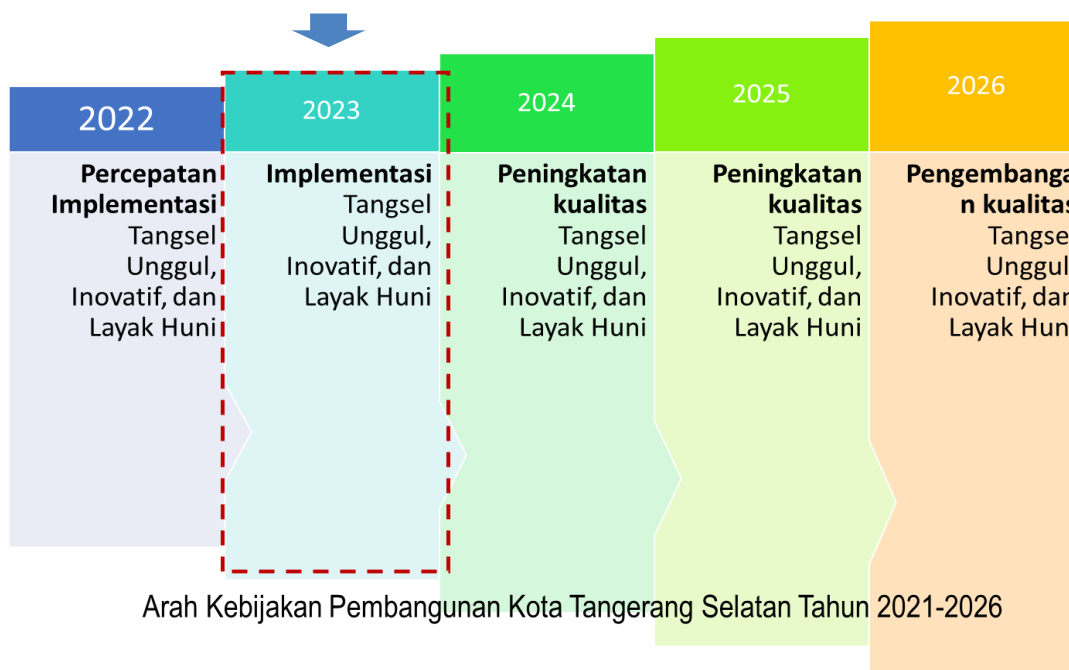
Tabel 4.5. Dukungan Pendanaan terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Banten dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Prioritas Provinsi	Pagu
Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM;	1.738.986.092.831
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;	1.755.354.577.248
Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan	946.524.585.148
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan	99.627.593.537
Total	4.540.492.848.764

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

4.4.3 Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan tahun 2023 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, sebagaimana dituangkan dalam diagram berikut.



Gambar 4.4. Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026

Prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan dalam perubahan RKPD tahun 2023 tetap difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Tangerang Selatan tahun 2023. Keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6. Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 beserta Dukungan Pendanaan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Tahun 2023	Prioritas Pembangunan P-RKPD 2023	Dukungan Pendanaan (Rp)
Kualitas SDM belum berdaya saing	Daya Saing SDM	Peningkatan SDM Unggul	1.738.986.092.831
Belum optimalnya layanan infrastruktur transportasi	Konektivitas infrastruktur dan perwujudan kota yang lestari	Peningkatan Infrastruktur yang Terkoneksi dan Kota Lestari	1.755.535.840.448
Belum optimalnya kualitas kota sebagai kota layak huni			
Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah.	Daya saing ekonomi terutama Sektor Ekonomi Kreatif	Peningkatan Ekonomi Sektor Ekonomi Kreatif	99.627.593.537
Belum optimalnya perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien	Birokrasi Efektif dan Efisien	Peningkatan Birokrasi Efektif dan Efisien	946.343.321.948
Total			4.540.492.848.764

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

Tema pembangunan Kota Tangerang Selatan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 masih mengacu pada tema dalam RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 yaitu **“Implementasi Tangsel Unggul, Inovatif dan Layak Huni”**.

4.4. Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi

Prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 tersebut harus selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Banten dan Nasional, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis Kota Tangerang Selatan. Keterkaitan prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.7. Sinkronisasi Prioritas Pemabangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional

No	Prioritas Nasional	No	Prioritas Provinsi Banten	No	Prioritas Kota Tangerang Selatan
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;	2	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	1	Peningkatan SDM Unggul
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan				
6	Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	2	Peningkatan Infrastruktur yang Terkoneksi dan Kota Lestari
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar				
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	1	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	3	Peningkatan Ekonomi Sektor Ekonomi Kreatif
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan				
7	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam)	4	Meningkatkan kualitas Reformasi birokrasi dan	4	Peningkatan Birokrasi Efektif dan Efisien

No	Prioritas Nasional	No	Prioritas Provinsi Banten	No	Prioritas Kota Tangerang Selatan
	dan transformasi pelayanan publik		tata kelola pemerintahan		

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah tahun 2023

4.5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Tangerang Selatan masih mengacu pada pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 Kota Tangerang Selatan. Perubahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 berupa penyesuaian lokasi dan volume berdasarkan hasil pelaksanaan s.d triwulan II tahun 2023 yang rinciannya dijabarkan dalam rencana tindak pada Renja Perangkat Daerah.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023

5.1.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Pencapaian Target RPJMD

Rencana kerja dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 mengacu pada upaya percepatan pencapaian target RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja s.d triwulan II tahun 2023 yang tertuang dalam bab II. Rincian rencana kerja dan pendanaan tersebut dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1. Rencana Program Kerja dan Indikator Kinerja Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RKPD 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RKPD 2023	Keterangan
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	52,15	52,67	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Penduduk Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	105,62%	106,83%	100,00%	Reformulasi Target mengacu SPM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Penduduk Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	96,05%	100,00%	100,00%	Reformulasi Target mengacu SPM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Penduduk Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	37,55%	69,54%	100,00%	Reformulasi Target mengacu SPM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)	1,80%	2,51%	100,00%	Reformulasi Target mengacu SPM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase SD yang mengalami peningkatan nilai	75%	0,00%	75%	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RKPd 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RKPd 2023	Keterangan
		Assesment Nasional Berbasis Komputer				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase SMP yang mengalami peningkatan nilai Assesment Nasional Berbasis Komputer	75%	0,00%	75%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SD dan SMP yang memenuhi kualifikasi	99,09%	97,75%	99,09%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	52,26	52,67	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	92,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan bersalin	100%	92,20%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	93,50%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	93,30%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai dengan standar minimal 1 kali yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu satu tahun	100%	92,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Angka Kesakitan Menurut Penyakit	7,80%	25,78%	7,80%	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RKPd 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RKPd 2023	Keterangan
BIDANG KESEHATAN	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tertentu per 100 penduduk				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	82%	80,00%	82%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk kota tangerang selatan yang memiliki jaminan kesehatan	95%	94,60%	95%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah dengan ketersediaan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar	95%	99,10%	99,60%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah dengan ketersediaan sarana prasarana dan perbekalan kesehatan sesuai standar	90%	97,40%	98,37%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penguatan data dan informasi dalam sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah	38%	29,00%	38%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan pelayanan sesuai klasifikasi RS milik Pemerintah Daerah	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS milik Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	80%	80,00%	80%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan alat kesehatan RS milik Pemerintah Daerah	80%	80,00%	80%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana promosi RS milik Pemerintah Daerah	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pengelolaan sistem informasi RS milik Pemerintah Daerah	100%	100,00%	100%	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPKD 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RPKD 2023	Keterangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persenstase pemenuhan rujukan pada RS milik Pemerintah Daerah	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana keperawatan pada RS milik Pemerintah Daerah	90%	90,00%	90%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per 100.000 penduduk	149,9	142	149,9	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan terlatih pada Fasyankes Penda	32%	50,00%	50,50%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan pada RS milik Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	90%	90,00%	90,90%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan terlatih pada RS milik Pemerintah Daerah	60%	70,00%	70,70%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas kefarmasian dan alkes yang sesuai standar	12%	10,00%	12%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu yang sesuai standar	80%	0,00%	80%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas PIRT , TPM dan DAM sesuai standar	80,22%	26,00%	80,22%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pos pelayanan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	52,15	52,67	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	A	A	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PROGRAM PENGELOLAAN	Luas kawasan permukiman yang rawan banjir yang	184.772	176,90	184.772	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPKD 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RPKD 2023	Keterangan
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SUMBER DAYA AIR (SDA)	terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kab/kota				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	436.977	376.703	436.977	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	376.703	365.414	376.703	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat	595,52	519	595,52	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung daerah yang dibangun dan dimanfaatkan	50,40%	50,80%	51,31%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung yang memenuhi aturan perijinan dan laik fungsi	48,20%	54,29%	54,83%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio kawasan yang ditata sesuai dengan RTBL	50,30%	49,00%	50,30%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik	76,80%	80,08%	81,68%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan (termasuk simpang dan jembatan) yang dilebarkan	82,23%	52,04%	82,23%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/ana	24%	16,51%	24%	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPKD 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RPKD 2023	Keterangan
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		lisis yang memiliki sertifikat kompetensi				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	708,88	708,88	715,97	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	51,97	52,48	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota sesuai SPM	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	luas kawasan kumuh yang di tangani	16,82	11,15	16,82	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase jumlah unit RTLH yang ditangani	0,70%	0,75%	0,78%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar	73,90%	54,89%	73,90%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	51,22	51,73	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan kamtrantibum yang ditangani	100%	100,00%	100%	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RKPd 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RKPd 2023	Keterangan
UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kejadian sosial kemasyarakatan dan kebencanaan yang ditangani	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase SDM Satpol PP, Satlinmas, dan PPNS bersertifikasi sesuai tugas dan jabatannya	70%	60,00%	70%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	90,87%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	90,87%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penanganan kebakaran dengan tingkat waktu tanggap (respon time rate) 10 menit dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	55%	100%	100%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	52,15	52,67	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPKD 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RPKD 2023	Keterangan
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang ditangani	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS anak terlantar yang tertangani	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang terverifikasi dan tervalidasi	100%	20,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terkelola	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	48,66	49,14	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB (76,91)	BB	BB (76,91)	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	94,12%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	1.500	1.709	1.726	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terdaftar dan berizin	40%	83,12%	83,95%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	10%	33,87%	34,21%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Tenaga Kerja lokal yang ditempatkan	10%	11,58%	11,70%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang	13%	33,87%	34,21%	Reformulasi Target

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPKD 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RPKD 2023	Keterangan
		layak (PP/PKB, LK+S Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Penyelesaian Angka Perselisihan Hubungan Industrial melalui PB dan Anjuran	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	51,97	52,48	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	A	A	A	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	43,24%	56,76%	57,33%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan peningkatan kualitas keluarga	18%	25,00%	25%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Implementasi Sistem data gender dan anak	51,35%	54,05%	54,59%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga Perlindungan anak aktif	60%	100,00%	100%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100,00%	100%	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPKD 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RPKD 2023	Keterangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	44	47	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	A	BB	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	persentase ketersediaan pangan pokok ditingkat distributor	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	persentase ketersediaan cadangan pangan pokok daerah	41%	27,40%	41%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Kelurahan P2L	54%	37,74%	54%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan yang ditangani	50%	100,00%	100%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan	75%	98,33%	99,31%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	50,01	50,51	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	A	BB	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	pesentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk	40%	20,00%	40%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	50,01	50,51	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan K/R/P Strategis Kota yang terintegrasi dg	ada	ada	ada	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RKPD 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RKPD 2023	Keterangan
LINGKUNGAN HIDUP		RPPLH dan/ Atau KLHS				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air	47,2	66	66,66	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas udara	65,31	68,58	68,58	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) / Indeks Kualitas Lahan (IKL)	45,39	36,62	45,39	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pengurangan ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota.	12%	16%	12,00%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan lembaga masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	5	12	16	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penghargaan lingkungan hidup utk masyarakat	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sampai dinyatakan selesai	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan pengelolaan sampah di wilayah Kota Tangerang Selatan	93%	90,73%	93%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	55	49,98	55	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RKPd 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RKPd 2023	Keterangan
DAN PENCATATAN SIPIL						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	A (83,55)	A	A (83,55)	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk Memiliki KTP	93,16%	99,27%	100,00%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Anak Memiliki KIA	61,83%	41,89%	61,83%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran	57,18%	56,97%	57,18%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	60%	41%	60%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pelayanan adminduk dan capil di Kecamatan dan Kelurahan	54	54	54	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	1	1	1	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data profil kependudukan	100%	100%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	44	47	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Predikat SAKIP	A	A	A	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPKD 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RPKD 2023	Keterangan
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DAERAH KABUPATEN/KOTA					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	3	2	3	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	2	1	2	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio akseptor KB	75,90%	76,52%	77,29%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	6,10%	6,10%	6,10%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kenaikan Klasifikasi Kampung KB	3	4	4	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	60%	87,70%	87,70%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	51,27	51,78	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Trayek yang dilayani	71%	63,00%	71%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Pengurangan titik kemacetan	37	38	38	Reformulasi Target

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPKD 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RPKD 2023	Keterangan
	ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	56	52,26	56	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	51,26	51,77	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB 73%	BB	BB 73%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi simpan pinjam yang berizin	12%	13,58%	13,72%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang patuh terhadap aturan	85%	80,16%	85%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat	84%	94,25%	95,19%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus koperasi yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan jabatannya	30%	65,53%	66,19%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Persentase koperasi aktif	15%	60,48%	61,08%	Reformulasi Target

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPKD 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RPKD 2023	Keterangan
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PERLINDUNGAN KOPERASI					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMKM	14%	65%	66,30%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi usaha kecil	7%	5,00%	7%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang termasuk ekraf	7%	10,06%	11,07%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	56	53,91	56	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	A	A	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	1635	2083	2.093	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP	75%	62,20%	75%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal	40%	18,67%	40%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal	30%	18,18%	30%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	51,26	51,77	Reformulasi Target

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RKPD 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RKPD 2023	Keterangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina	0,18%	0,32%	0,33%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase OKP yang dibina	83,87%	78,13%	83,87%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabor olahraga tradisional/rekreasi yang dibina	100%	91,67%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabor dibina	82%	94,74%	95,69%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase anggota pramuka yang aktif	10%	9,86%	10%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	56	44	56	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	56	44	56	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPKD 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RPKD 2023	Keterangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	42%	76,28%	42%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	44	47	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase paguyuban warga etnis yang dibina	20%	15,00%	20%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase lembaga kesenian tradisional yang dibina	50%	37,88%	50%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	34%	32,00%	34%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	56	51,73	56	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	9%	7,76%	9%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan yang terakreditasi	4	4	4	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	56	44	56	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RKP 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RKP 2023	Keterangan
	DAERAH KABUPATEN/KOTA					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	52,50%	50,00%	52,50%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase alih media arsip	30,00%	20,00%	30,00%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase kesesuaian pemusnahan arsip dengan NSPK	100,00%	0,00%	100,00%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase kesesuaian autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	15,00%	0,00%	15,00%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kesesuaian penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	100,00%	100,00%	100,00%	Tetap
URUSAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	44	47	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	A	A	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan) yang status kelas kelompoknya naik	25%	14,71%	25%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)	15%	11,76%	15%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase unit pengolah hasil perikanan memenuhi standar mutu	48,72%	30,77%	48,72%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	46,80	47	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RKPd 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RKPd 2023	Keterangan
	DAERAH KABUPATEN/KOTA					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah wisatawan mancanegara	9.792	20.500	20.500	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah wisatawan nusantara	767.312	1.758.924	1.762.442	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	17,50%	20%	21,00%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase peningkatan pelaku usaha ekraf yng memiliki omset > 120jt per tahun	5	4,55	5	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata tersertifikasi	2,80%	0,91%	2,80%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tenaga Kerja ekonomi kreatif yang tersertifikasi	24%	17,96%	24%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	44	47	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	A	A	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penggunaan bibit/benih unggul	4,61%	41,46%	41,46%	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penerapan budidaya pertanian yang baik	27%	16,96%	27%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10%	13,00%	10%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang termasuk kelas Lanjut	10	5	10	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	56	52	56	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPKD 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RPKD 2023	Keterangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha perdagangan yang mendapatkan rekomendasi perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar dan sarana distribusi lainnya sesuai standar(SNI)	25%	25,00%	25%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase komoditas kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang stoknya terkendali	100%	100,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah peningkatan aktivitas produk ekspor unggulan IKM	30	93	94	Reformulasi Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang bertanda terasah yang berlaku	100%	116,00%	100%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk dalam negeri yang berhasil diperdagangkan di toko modern	30	30	30	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	56	42	56	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya jumlah komunitas IKM	20	20	20	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) IKM yang diawasi dan dipantau	55%	50,00%	55%	Tetap
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri	35%	30,00%	35%	Tetap
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Perangkat Daerah yang	100%	100,00%	100%	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPKD 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RPKD 2023	Keterangan
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	menyelenggarakan IKM				
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan data kinerja dalam LAKIP Kota	100%	100,00%	100%	Tetap
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perangkat daerah dengan nilai LKE PMPRB di atas 50	28%	24%	28%	Tetap
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	51,44	51,95	Reformulasi Target
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan KDH/WKDH	100%	100,00%	100%	Tetap
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Setda	BB	A	A	Reformulasi Target
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan rumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan serta pelaporan LPPD dan SPM	100%	100,00%	100%	Tetap
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	85%	80,00%	85%	Tetap
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100%	100,00%	100%	Tetap
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase fasilitasi hukum	100%	94,68%	100%	Tetap
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan perumusan kebijakan perekonomian daerah	100%	100,00%	100%	Tetap
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan perumusan kebijakan administrasi dan pengendalian program pembangunan daerah	100%	100,00%	100%	Tetap
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang dan jasa	100%	88,73%	100%	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RKPd 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RKPd 2023	Keterangan
	SEKRETARIAT DPRD					
SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	51,97	52,48	Reformulasi Target
SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	B	BB	BB	Reformulasi Target
SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kepuasan pelayanan sekretariat DPRD	88,31	74,14	88,31	Tetap
SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi Pembahasan RAPERDA/Non Perda	100%	83,33%	100%	Tetap
SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi pembahasan anggaran dan Pengawasan	100%	75,00%	100%	Tetap
PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Predikat SAKIP	A	A	A	Tetap
PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	56	52,15	56	Tetap
PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	Tetap
PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi penjabaran RPJMD kedalam RKPd	100%	100%	100%	Tetap
PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi penjabaran RKPd kedalam RENJA	70%	100%	100%	Reformulasi Target
PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perencanaan Perjanjian kinerja OPD yang berkualitas	100%	100%	100%	Tetap
KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	56	52,15	56	Tetap
KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RKPd 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RKPd 2023	Keterangan
KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen APBD	100%	100%	100%	Tetap
KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tersedianya laporan keuangan	100%	100%	100%	Tetap
KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengendalian penyerapan anggaran	98%	72%	98%	Tetap
KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pelaksanaan Manajemen Aset	100%	100%	100%	Tetap
KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Tanah yang dalam proses sertifikasi	21%	12,15%	21%	Tetap
KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pajak Daerah	10%	10%	10%	Tetap
KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	56	51,26	56	Tetap
KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap
KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Keterisian formasi CPNS dan calon PPPK dalam penerimaan CPNS dan Calon PPPK	100%	90%	100%	Tetap
KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase peningkatan ASN yang memperoleh rekomendasi tugas belajar/ijin belajar/Bea Siswa	20%	49,03%	49,52%	Reformulasi Target
KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penerapan regulasi daerah dalam penghargaan kinerja ASN (penyusunan, ujicoba, evaluasi dan implementasi)	75%	25%	75%	Tetap
KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Assesment pegawai	8,50%	2,7%	8,50%	Tetap
KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian jabatan PNS	100%	100%	100%	Tetap
KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN dengan dokumentasi data kepegawaian lengkap	60%	69,66%	70,36%	Reformulasi Target
KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	100%	100%	100%	Reformulasi Target
KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase OPD yang telah menyusun dokumen HCDP (AKD atau AKPK)	47%	1,4%	47%	Tetap
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	56	44	56	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPKD 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RPKD 2023	Keterangan
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Predikat SAKIP	BB	A	A	Reformulasi Target
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Persentase ASN yang menduduki jabatan telah memiliki Kompetensi Sesuai pemenuhan kompetensi dan kualifikasi jabatannya	33%	33,08%	33,41%	Reformulasi Target
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya	5%	4,98%	5%	Tetap
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Predikat SAKIP	A	A	A	Tetap
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	56	42	56	Tetap
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana Induk kelitbangan (RIK)	40%	67%	67,33%	Reformulasi Target
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase fasilitasi inovasi daerah.	80%	64,86%	80%	Tetap
INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	56	53,93	56	Tetap
INSPEKTORAT DAERAH		Predikat SAKIP	A	A	A	Tetap
INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	83%	67,35%	83%	Tetap
INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rasio jumlah temuan terhadap jumlah kegiatan Pemerintah Daerah	20%	20,00%	20%	Tetap
KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	44	47	Tetap
KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap
KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan sesuai SOP	100%	100,00%	100%	Tetap
KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase KK dalam DTKS yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	4,50%	24,40%	24,40%	Reformulasi Target
KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum dalam lingkup kecamatan yang di koordinasikan	100%	86,59%	100%	Tetap

Urusan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RKPd 2023	Realisasi s.d TW2 2023	Target P-RKPd 2023	Keterangan
KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelayanan sesuai pelimpahan wewenang kepada kecamatan dan kelurahan	100%	100,00%	100%	Tetap
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	47	52	52,52	Reformulasi Target
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	Tetap
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kelurahan yang masyarakatnya menerima penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	38,89%	60,00%	60,00%	Reformulasi Target
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Partai Politik yang melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat	100%	100,00%	100%	Tetap
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	68	64,43	68	Tetap
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	38,46%	37,04%	38,46%	Tetap
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang ditangani/ditindak lanjuti	100%	100,00%	100%	Tetap

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

Tabel 5.2. Pendanaan Rencana Kerja dalam Perubahan RKPd Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Perangkat Daerah

No	Urusan	PAGU INDIKATIF (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	649,312,272,999	808,094,554,303	824,678,875,876	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	491,882,484,514	709,007,798,493	806,583,366,538	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	360,207,900,110	434,916,805,970	465,893,740,777	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	366,362,646,822	492,637,902,786	481,797,710,985	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	270,992,712,231	353,667,722,825	365,673,845,045	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19,811,849,006	24,896,847,753	25,089,393,659	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	23,884,683,563	25,384,682,474	25,597,443,285	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14,068,309,938	14,422,236,277	14,190,135,745	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15,670,850,822	18,249,253,813	18,297,322,949	DINAS SOSIAL
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	12,965,530,672	14,016,280,591	13,868,426,900	DINAS TENAGA KERJA
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16,512,095,788	18,558,115,251	18,060,064,173	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Urusan	PAGU INDIKATIF (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	14,819,281,902	17,739,026,692	17,507,190,873	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	75,000,000	143,699,840	143,699,840	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	174,946,098,200	193,038,674,926	201,562,853,988	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19,622,590,169	22,322,590,169	22,955,181,970	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	546,555,100	12,332,317,000	12,332,317,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	92,936,302,290	112,411,157,366	125,901,751,766	DINAS PERHUBUNGAN
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	49,280,756,877	64,040,392,637	73,437,635,811	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15,678,595,560	17,369,562,914	15,821,378,876	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	31,144,601,688	30,738,620,750	31,326,123,815	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	35,260,677,529	35,926,818,935	42,116,818,672	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	548,222,000	418,359,790	401,199,790	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	638,865,000	582,813,000	565,653,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4,716,729,461	3,168,837,920	3,368,837,920	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	15,046,384,486	15,088,539,486	15,178,426,554	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No	Urusan	PAGU INDIKATIF (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
	PERPUSTAKAAN				
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	556,244,000	564,089,000	564,089,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,718,015,809	1,419,428,696	1,509,647,957	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	15,160,951,460	15,160,951,196	14,613,849,449	DINAS PARIWISATA
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3,436,455,601	3,081,022,739	3,047,272,099	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2,680,456,293	3,099,658,376	3,424,256,465	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	15,168,683,964	16,299,481,881	16,615,056,086	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
32	SEKRETARIAT DAERAH	135,723,020,089	169,494,353,918	181,897,429,970	SEKRETARIAT DAERAH
33	SEKRETARIAT DPRD	111,238,121,282	133,533,851,696	133,003,236,037	SEKRETARIAT DPRD
34	PERENCANAAN	29,518,621,637	31,614,576,437	31,468,116,514	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
35	KEUANGAN	80,697,570,480	82,134,398,003	69.630,610,036	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
36	KEUANGAN	58,847,735,081	70,847,735,081	75,243,949,267	BADAN PENDAPATAN DAERAH
37	KEPEGAWAIAN	22,289,268,045	27,786,190,345	31,307,479,635	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
38	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	7,006,181,623	6,509,259,260	6,509,259,260	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
39	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,423,284,000	1,429,484,200	1,217,592,970	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
40	INSPEKTORAT DAERAH	29,888,827,814	32,508,303,391	32,857,557,559	INSPEKTORAT
41	KECAMATAN	26,855,807,490	29,255,803,420	33,535,253,197	KECAMATAN CIPUTAT

No	Urusan	PAGU INDIKATIF (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
42	KECAMATAN	27,368,604,297	29,868,604,297	32,063,331,023	KECAMATAN CIPUTAT TIMUR
43	KECAMATAN	36,216,898,880	38,816,898,880	45,028,836,967	KECAMATAN PAMULANG
44	KECAMATAN	36,509,252,813	39,309,252,813	42,939,597,418	KECAMATAN SERPONG
45	KECAMATAN	27,936,075,806	30,336,075,806	33,763,749,631	KECAMATAN SERPONG UTARA
46	KECAMATAN	41,306,187,387	44,386,958,916	50,730,723,848	KECAMATAN PONDOK AREN
47	KECAMATAN	29,565,332,385	31,765,332,385	33,648,902,498	KECAMATAN SETU
48	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12,903,589,602	18,562,757,822	43,523,656,071	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sumber: SIPD Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

5.1.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar merumuskan rencana kerja dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 yang berkaitan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 5.3 Target Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan	Indikator	Target Tahun 2023	Program
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi)	100%	Program Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi)	100%	

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan	Indikator	Target Tahun 2023	Program
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan.	100%	
		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	
2	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Presentasi ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Presentasi ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentasi bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan	Indikator	Target Tahun 2023	Program
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Persentase Orang Terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan Daya Tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV Sesuai standar	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	100	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan	Indikator	Target Tahun 2023	Program
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Program Pengembangan Perumahan
5	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Program Rehabilitasi Sosial
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Program Rehabilitasi Sosial
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Program Rehabilitasi Sosial
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Program Rehabilitasi Sosial
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100%	Program Penanganan Bencana
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan penyelamatan kebakaran kebakaran dan non-kebakaran	100%	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non-Kebakaran
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Program Penanggulangan Bencana
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Program Penanggulangan Bencana

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan	Indikator	Target Tahun 2023	Program
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Program Penanggulangan Bencana
8	Satpol pp	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada.	100%	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

Tabel 5.4 Rencana Kerja dan Pendanaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Jenis Pelayanan SPM	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
Pelayanan Air Limbah	1.03.1.01.1.02.04.00 00 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.894.417.450
				1.03.05.2.01.04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	5.441.676.439
				1.03.05.2.01.11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	827.074.000
				1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	600.000.000
Pelayanan Air Minum	1.03.1.01.1.02.04.00 00 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.705.582.550
				1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	4.648.873.600
				1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.320.652.696

Jenis Pelayanan SPM	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
				1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.900.000.000
				1.03.03.2.01.14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	204.670.000
				1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	17.845.229
Pelayanan kesehatan balita	1.02.0.00.0.00.02.00 00 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	860.825.900
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1.02.0.00.0.00.02.00 00 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30.985.000
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1.02.0.00.0.00.02.00 00 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	28.355.000
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.02.0.00.0.00.02.00 00 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.995.212.929
Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1.02.0.00.0.00.02.00 00 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	52.779.000
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	1.02.0.00.0.00.02.00 00 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	745.825.000

Jenis Pelayanan SPM	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	1.02.0.00.0.00.02.00 00 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.542.377.500
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1.02.0.00.0.00.02.00 00 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	746.326.797
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1.02.0.00.0.00.02.00 00 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	446.320.000
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1.02.0.00.0.00.02.00 00 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	500.704.609
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	1.02.0.00.0.00.02.00 00 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.711.882.000
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	1.02.0.00.0.00.02.00 00 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	29.965.000
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.0.00.0.00.07.00 00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	277.424.000

Jenis Pelayanan SPM	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
				1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	105.100.000
				1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	13.457.000
				1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	294.678.000
				1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	416.458.000
				1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.700.000
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.05.0.00.0.00.08.00 00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	134.001.800
				1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	55.506.550
				1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	417.271.300
				1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	95.602.200
				1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi	

Jenis Pelayanan SPM	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
				1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	75.551.000
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	593.455.000
				1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	237.155.000
				1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	364.197.000
				1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	11.500.000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1.05.0.00.0.00.06.00 00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		913.690.000
			1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		980.560.000
			1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		125.500.000
Pendidikan Dasar	1.01.2.22.0.00.01.00 00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	207.323.500
				1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	500.000.000
				1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.772.121.386
				1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.200.000.000
				1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.751.875.000

Jenis Pelayanan SPM	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
				1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	10.233.496.000
				1.01.02.2.01.15 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	99.943.480
				1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	208.031.010
				1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	46.127.231
				1.01.02.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.343.125.000
				1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	23.355.600.000
				1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.779.197.650
				1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.082.819.375
				1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	30.000.000
				1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	30.000.000
				1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	453.906.000
				1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	114.441.648.808
				1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	184.541.000
				1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.178.310.000
				1.01.02.2.01.35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30.000.000

Jenis Pelayanan SPM	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
				1.01.02.2.01.38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8.760.000
				1.01.02.2.01.39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	30.000.000
				1.01.02.2.01.40 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30.000.000
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.457.009.374
				1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.192.183.600
				1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	3.037.500.000
				1.01.02.2.02.11 Pembangunan Kantin Sekolah	
				1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.524.005.210
				1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	1.199.914.085
				1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.008.839.200
				1.01.02.2.02.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	804.876.392
				1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	758.688.458
				1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	3.830.762.800
				1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	30.000.000
				1.01.02.2.02.30 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	967.031.170
				1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	11.800.320.000

Jenis Pelayanan SPM	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
				1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.620.545.400
				1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	10.188.718.023
				1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.000.000
				1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	421.296.300
				1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	82.281.000
				1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	59.906.037.698
				1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	63.453.000
				1.01.02.2.02.48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	15.000.000
				1.01.02.2.02.51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8.100.000
				1.01.02.2.02.52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	15.000.000
				1.01.02.2.02.53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30.000.000
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	17.680.000
				1.01.02.2.03.27 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	17.680.000

Jenis Pelayanan SPM	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
Pendidikan Kesetaraan	1.01.2.22.0.00.01.00 00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	200.000.000
				1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	200.000.000
				1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200.000.000
				1.01.02.2.04.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	60.266.568
				1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	345.000.000
				1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	642.850.000
				1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	429.990.050
				1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.469.339.458
				1.01.02.2.04.18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	40.430.042
Pendidikan PAUD	1.01.2.22.0.00.01.00 00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.452.586.000
				1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	50.000.000
				1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	50.000.000

Jenis Pelayanan SPM	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
				1.01.02.2.03.05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	244.570.000
				1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	346.248.000
				1.01.02.2.03.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	242.785.000
				1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	1.101.966.172
				1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	30.000.000
				1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	390.000.000
				1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	392.222.820
				1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	30.000.000
				1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	161.753.000
				1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	646.345.000
				1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	14.785.609.013
				1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	148.730.987
				1.01.02.2.03.25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8.760.000
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	1.04.2.10.0.00.05.00 00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	182.982.000
				1.04.02.2.01.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	141.227.800

Jenis Pelayanan SPM	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.04.2.10.0.00.05.00 00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	3.284.243.950
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	1.06.0.00.0.00.09.00 00 DINAS SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	747.020.000
				1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.553.618.120
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	1.06.0.00.0.00.09.00 00 DINAS SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	190.378.430
				1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	68.600.200
				1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	24.000.000
				1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	115.883.300
				1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	78.234.900
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Jenis Pelayanan SPM	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
TOTAL					361.574.379.509

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

5.1.3. Rencana Kerja Penanganan *Stunting* Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian target penurunan prevalensi *stunting* yang ditetapkan sebesar 8% pada perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, dirumuskan rencana kerja sebagaimana disajikan pada tabel 5.3, dengan lokasi fokus prioritas sesuai dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 050/Kep.174-Huk/2022 tentang Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Tahun 2023. Adapun lokasi fokus prioritas penanganan *stunting* terdiri dari 19 kelurahan, sebagai berikut:

1. Serpong;
2. Paku Alam;
3. Bakti Jaya;
4. Kademangan;
5. Pondok Benda;
6. Pamulang Timur;
7. Pondok Cabe Ilir;
8. Benda Baru;
9. Serua;
10. Jombang;
11. Pondok Ranji;
12. Cempaka Putih;
13. Rempoa;
14. Pisangan;
15. Pondok Kacang Timur;
16. Pondok Betung;
17. Pondok Karya;
18. Parigi Baru; dan
19. Pondok Aren

Tabel 5.5. Rencana Kerja dan Pendanaan Penanganan *Stunting* dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	161.753.000
			1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	646.345.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.995.212.929
			1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	28.355.000
			1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30.985.000
			1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	860.825.900
			1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	446.320.000
			1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	500.704.609
			1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.187.080.803
			1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.561.917.168
			1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.629.880.586
			1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	229.008.000
			1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.402.232.981
				1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.03.1.01.1.02.04.0000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	4.648.873.600

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.320.652.696
			1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.900.000.000
			1.03.03.2.01.14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	204.670.000
			1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	17.845.229
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	31.549.961.600
			1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	600.000.000
1.04.2.10.0.00.05.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	28.928.020.150
1.06.0.00.0.00.09.0000 DINAS SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	172.566.470
			1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	104.034.900
2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.415.000
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	130.774.000

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000
2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			91.000.000	
2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK			100.451.000	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	30.504.400
2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			360.000.000	
2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			98.366.600	
2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			6.570.900.000	

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	76.800.000
2.09.3.27.3.25.12.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	549.239.400
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	320.239.780
			3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	480.296.710
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	132.890.560
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.048.898.916
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	130.595.238
5.01.5.05.0.00.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	194.865.390
7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	345.042.850
7.01.0.00.0.00.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.096.570.094
7.01.0.00.0.00.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.230.205.366
7.01.0.00.0.00.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.351.629.127

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.305.144.514
7.01.0.00.0.00.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.856.192.065
7.01.0.00.0.00.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.842.064.500
2.16.2.20.2.21.15.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	308.580.000
2.16.2.20.2.21.15.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	398.743.800
Total				124.118.824.996

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

5.1.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023

Untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dirumuskan rencana kerja dan pendanaan dengan konsep mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dan meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat miskin. Selain itu upaya perbaikan data sasaran melalui verifikasi dan validasi data perlu dilakukan. Rencana kerja dan pendanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.6. Rencana Kerja dan Pendanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.082.819.375
		1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	10.188.718.023

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
		1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	273.355.851
1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	120.181.907.200
1.03.1.01.1.02.04.0000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	31.549.961.600
1.04.2.10.0.00.05.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	28.928.020.150
1.06.0.00.0.00.09.0000 DINAS SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300.580.000
			1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	201.227.200
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	190.378.430
			1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	68.600.200
			1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	24.000.000
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	172.566.470
			1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	104.034.900
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	747.020.000

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
2.07.0.00.0.00.10.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.257.646.518
2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	271.375.000
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	285.770.000
2.09.3.27.3.25.12.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	549.239.400
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	105.089.840
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	320.239.780
			3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	480.296.710
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.048.898.916
			3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	125.743.347
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	947.020.728

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	130.595.238
2.12.0.00.0.00.14.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	50.000.000
		2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	80.000.000
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	50.000.000
2.17.0.00.0.00.16.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 PEMBERDAYAAN dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.01 PEMBERDAYAAN Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	161.187.400
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	736.601.090
3.26.0.00.0.00.20.0000 DINAS PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	129.239.200
			3.26.02.2.03.06 PEMBERDAYAAN Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	65.503.120
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	147.997.560
		3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200.000.000
3.31.3.30.0.00.21.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	125.000.000
			3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	819.685.800

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.501.050.530
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	345.042.850
7.01.0.00.0.00.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.479.500.000
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.096.570.094
			7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	397.500.000
7.01.0.00.0.00.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.499.863.000
7.01.0.00.0.00.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.796.852.904
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.351.629.127
7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.659.999.693
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.305.144.514
7.01.0.00.0.00.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.831.312.900
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.856.192.065
			7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	379.900.275
7.01.0.00.0.00.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.433.550.680
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.842.064.500
			7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	408.713.900

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000
Total				238.335.206.078

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

5.1.5. Rencana Kerja dan Pendanaan Upaya Pengendalian Harga Tahun 2023

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga bahan pokok dan bahan penting lainnya, dirumuskan rencana kerja dan pendanaan yang disusun melalui program-program sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.7. Rencana Kerja dan Pendanaan Pengendalian Inflasi Daerah dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	114.441.648.808
			1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	184.541.000
		1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	10.188.718.023
			1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	59.906.037.698
			1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	63.453.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	120.181.907.200
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.751.170.065
1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	20.956.943.000

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	20.241.041.180
			1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	3.730.300.370
1.04.2.10.0.00.05.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	28.928.020.150
1.06.0.00.0.00.09.0000 DINAS SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	201.227.200
			1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.184.232.800
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	68.600.200
			1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	24.000.000
			1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	70.164.900
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	747.020.000
2.07.0.00.0.00.10.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.310.000

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	271.375.000
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.468.661.000
		2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.230.000
			2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.415.000
2.09.3.27.3.25.12.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	109.209.020
		2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	192.860.840
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	105.089.840
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	58.183.000
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	320.239.780

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	480.296.710
		3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	226.838.391
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	132.890.560
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	125.743.347
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	18.674.000
		3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	297.197.100
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	947.020.728
			3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	130.595.238
2.15.0.00.0.00.28.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	95.481.642
			2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
		2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	443.773.690

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
2.17.0.00.0.00.16.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	161.187.400
			2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	17.679.600		
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	736.601.090
2.19.0.00.0.00.18.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	50.000.000
			2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	1.773.492.710
		2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	35.000.000
			2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	227.229.000
3.26.0.00.0.00.20.0000 DINAS PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	931.600.000
		3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis	3.26.02.2.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	141.750.000

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
		Pariwisata Kabupaten/Kota		
			3.26.02.2.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	80.023.800
		3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	129.239.200
			3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	65.503.120
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	118.450.000
			3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	505.960.000
			3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	110.018.000
			3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	46.380.000
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	147.997.560
			3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	618.860.000
		3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200.000.000
			3.26.05.2.02.02 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	121.100.000
			3.26.05.2.02.03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	75.000.000
3.31.3.30.0.00.21.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	97.192.713

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	436.316.357
		3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.515.912.245
			3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.30.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	15.552.000
			3.30.04.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	14.833.000
			3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	29.230.000
		3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15.922.000
			3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	54.511.000
			3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	148.486.000
			3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	154.937.500

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	
			3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal	305.510.850	
			3.30.05.2.01.04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	42.582.000	
			3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor	14.927.500	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	126.700.000	
			3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	99.215.200	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
			3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	84.789.000	
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	125.000.000	
			3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	819.685.800	
	4.01.0.00.0.00.22.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	489.717.200
4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				320.770.200	
5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.196.956.069	
7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.501.050.530	
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	345.042.850
			7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	180.516.750	

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	27.242.530
7.01.0.00.0.00.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.479.500.000
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.096.570.094
			7.01.03.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000
			7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	397.500.000
			7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
7.01.0.00.0.00.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.499.863.000
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.230.205.366
			7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	804.717.370
			7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100.000.000
7.01.0.00.0.00.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.796.852.904
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.351.629.127
			7.01.03.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	729.460.080
			7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	428.750.500
			7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	66.000.000
7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.659.999.693
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.305.144.514

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
		Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
			7.01.03.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	335.354.517
			7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	219.940.260
			7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000
7.01.0.00.0.00.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.831.312.900
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.856.192.065
			7.01.03.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	314.124.500
			7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	379.900.275
			7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	37.832.000
7.01.0.00.0.00.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.433.550.680
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.842.064.500
			7.01.03.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	688.550.000
			7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	408.713.900
			7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000
Total				461.435.313.599

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

5.1.6. Rencana Kerja Penurunan Pengangguran Tahun 2023

Dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka, dirumuskan rencana kerja dan pendanaan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.8. Rencana Kerja dan Pendanaan Penurunan Pengangguran dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	288.450.000
			1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	120.620.000
1.04.2.10.0.00.05.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	28.928.020.150
1.06.0.00.0.00.09.0000 DINAS SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300.580.000
2.07.0.00.0.00.10.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	44.805.000
			2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.257.646.518
			2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	378.851.000
			2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
	2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	14.555.000	

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
		2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	17.912.480
		2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	51.620.000
		2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	27.074.600
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	80.000.000
			2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja	31.025.000
			2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	30.500.000
			2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	49.999.900
			2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja	80.000.000
		2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.02.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	38.701.000
			2.07.04.2.02.02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	25.996.000
		2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	26.750.000
			2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	50.000.000
			2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	64.834.000
		2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	35.055.000
			2.07.04.2.04.02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	24.216.000
			2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	60.712.600

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
		2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	96.780.130
2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	271.375.000
2.09.3.27.3.25.12.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	549.239.400
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	320.239.780
			3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	480.296.710
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	75.959.370
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.048.898.916
			3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	947.020.728	
2.17.0.00.0.00.16.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	398.296.640

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	161.187.400
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	736.601.090
2.19.0.00.0.00.18.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyebaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	1.773.492.710
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	49.388.680
3.26.0.00.0.00.20.0000 DINAS PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	931.600.000
		3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	141.750.000
			3.26.02.2.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	80.023.800
		3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	129.239.200
	3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		65.503.120	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	147.997.560
			3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	618.860.000
3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif			446.830.000	

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
		3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200.000.000
			3.26.05.2.02.03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	75.000.000
3.31.3.30.0.00.21.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	819.685.800
7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.501.050.530
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	180.516.750
			7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	27.242.530
7.01.0.00.0.00.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.479.500.000
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	397.500.000
			7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
7.01.0.00.0.00.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.499.863.000
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	804.717.370
			7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100.000.000
7.01.0.00.0.00.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.796.852.904
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	428.750.500
			7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	66.000.000
7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.659.999.693

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.04 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	219.940.260
			7.01.03.2.03.05 Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000
7.01.0.00.0.00.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.831.312.900
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.04 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	379.900.275
			7.01.03.2.03.05 Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	37.832.000
7.01.0.00.0.00.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.433.550.680
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.04 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	408.713.900
			7.01.03.2.03.05 Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000
Total				72.072.176.921

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

5.1.7. Rencana Kerja Pengurangan Kesenjangan Tahun 2023

Dalam rangka pengurangan kesenjangan, dirumuskan rencana kerja dan pendanaan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.9. Rencana Kerja dan Pendanaan Pengurangan Kesenjangan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	288.450.000
			1.03.11.2.01.06 Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	120.620.000

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.2.10.0.00.05.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.02.03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	160.107.900	
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	28.928.020.150	
1.06.0.00.0.00.09.0000 DINAS SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300.580.000	
			1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	201.227.200	
2.07.0.00.0.00.10.0000 DINAS TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.257.646.518	
			2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.074.600	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja	31.025.000	
			2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	30.500.000	
			2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	49.999.900	
			2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja	80.000.000	
			2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	50.000.000
				2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	64.834.000
			2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	35.055.000

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			2.07.04.2.04.02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	24.216.000
			2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	60.712.600
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	184.208.000
2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	271.375.000
2.09.3.27.3.25.12.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	88.983.580
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	320.239.780
			3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	480.296.710
			3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	226.838.391
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	75.959.370
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.048.898.916
		3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	125.743.347

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	947.020.728
			3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	130.595.238
2.17.0.00.0.00.16.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	398.296.640
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	161.187.400
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	17.679.600
			2.17.07.2.01.06 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	184.685.000
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	736.601.090
2.19.0.00.0.00.18.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	50.000.000
			2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	1.773.492.710

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	35.000.000
		2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	35.000.000
			2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	227.229.000
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	49.388.680
3.26.0.00.0.00.20.0000 DINAS PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	931.600.000
		3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	141.750.000
			3.26.02.2.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	80.023.800
			3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
			3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	65.503.120
		3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	101.530.000
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	46.380.000
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	3.26.04.2.01.01 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	87.364.330
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	147.997.560

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	
			3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	618.860.000	
			3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	446.830.000	
			3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200.000.000
				3.26.05.2.02.02 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	121.100.000
				3.26.05.2.02.03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	75.000.000
3.31.3.30.0.00.21.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	84.789.000	
			3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	819.685.800	
7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.136.213.600	
		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.350.329.600	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.501.050.530	
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	345.042.850
				7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	180.516.750
				7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	27.242.530

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.0.00.0.00.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.844.399.400	
		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.946.341.390	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	240.500.000
			7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.479.500.000
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.096.570.094
			7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	397.500.000
			7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
	7.01.0.00.0.00.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.239.509.830
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.121.863.050	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.499.863.000
			7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.230.205.366
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	804.717.370
			7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100.000.000
7.01.0.00.0.00.34.0000 KECAMATAN SERPONG		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.937.256.368
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.125.089.200

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.796.852.904	
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.351.629.127	
			7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	428.750.500	
			7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	66.000.000	
7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.382.303.200	
		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.261.473.823	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.659.999.693	
			7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.305.144.514	
			7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	219.940.260	
			7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000	
	7.01.0.00.0.00.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.023.023.200
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.815.709.600
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.831.312.900	
			7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.856.192.065	
			7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	379.900.275	

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			7.01.03.2.03.05 Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	37.832.000
7.01.0.00.0.00.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.962.147.850
		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.787.450.000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.433.550.680
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.842.064.500
			7.01.03.2.03.04 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	408.713.900
			7.01.03.2.03.05 Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000
	Total			

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

5.1.8. Rencana Kerja Pengendalian Banjir Tahun 2023

Dalam rangka Pengendalian Banjir, dirumuskan rencana kerja dan pendanaan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.10. Rencana Kerja dan Pendanaan Pengendalian Banjir dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2.620.361.790
			1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai	91.977.773.281
			1.03.02.2.01.13 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	1.599.758.270
			1.03.02.2.01.14 Pembangunan Polder/Kolam Retensi	30.068.688.150

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			1.03.02.2.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	15.050.495.700
			1.03.02.2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1.644.301.664
			1.03.02.2.01.56 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	7.022.911.063
			1.03.02.2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	459.892.760
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.985.805.200
			1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	2.199.271.000
			1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	56.106.689.910
			1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	11.417.106.000
			1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	4.931.675.210
			1.03.06.2.01.10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	-
			1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
			1.03.06.2.01.14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	-
			1.03.06.2.01.16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	-
1.03.1.01.1.02.04.0000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1.617.677.740

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	475.500.000
			1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	212.230.000
			1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	274.600.000
		1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	304.333.800
		1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	832.721.500
		1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	360.845.760
1.04.2.10.0.00.05.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	182.982.000
			1.04.02.2.01.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	141.227.800
			1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3.992.932.720
			1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	254.590.062.636
1.05.0.00.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	451.191.700
		1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	134.001.800

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
		Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
			1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	55.506.550
			1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	297.740.775
			1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	417.271.300
			1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	95.602.200
			1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi	
			1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	75.551.000
		1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	593.455.000
			1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	237.155.000
			1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	364.197.000
			1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	11.500.000
		1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	214.835.780
			1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	15.925.000
			1.05.03.2.04.03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	26.445.000
			1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	39.181.190

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	24.925.000
			1.05.03.2.04.06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	114.443.280
1.06.0.00.0.00.09.0000 DINAS SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	747.020.000
			1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.553.618.120
2.11.0.00.0.00.13.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	25.996.267.990
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	527.488.000
			2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	71.929.127.175
			2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6.666.113.147
			2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	17.787.703.098
5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.196.956.069
Total				633.927.309.078

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

5.1.9. Rencana Kerja Pengurangan Kemacetan Tahun 2023

Dalam rangka Pengurangan Kemacetan, dirumuskan rencana kerja dan pendanaan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.11. Rencana Kerja dan Pendanaan Pengurangan Kemacetan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1.03.0.00.0.00.03.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.985.805.200
			1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	2.199.271.000
			1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	56.106.689.910
			1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	11.417.106.000
			1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	4.931.675.210
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.953.528.840
			1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	25.085.998.000
			1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	960.221.850
			1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	122.299.637.434
			1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	20.956.943.000
			1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	20.241.041.180
			1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	3.730.300.370
			1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4.470.007.906

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1.03.1.01.1.02.04.0000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1.617.677.740
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	475.500.000
			1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	212.230.000
		1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	304.333.800
		1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	832.721.500
		1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	360.845.760
1.04.2.10.0.00.05.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3.992.932.720
			1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	254.590.062.636
1.05.0.00.0.00.07.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	102.360.000
			1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	145.870.000

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
2.11.0.00.0.00.13.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	71.929.127.175
2.15.0.00.0.00.28.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	615.152.120
			2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	574.547.400
		2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.615.902.936
			2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	6.927.490.140
			2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.666.195.000
		2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	185.381.653
			2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	365.910.457
			2.15.02.2.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	29.414.000
		2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.15.02.2.04.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	740.766.586
			2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	116.600.000
		2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.273.457.242
			2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	250.000.000

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	750.000.000
			2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	184.987.000
			2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000
		2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	322.086.880
			2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.119.792.324
			2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	594.245.800
			2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	727.078.150
			2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	130.453.510
		2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	33.529.910
			2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	32.929.910
		2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	95.481.642
		2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	443.773.690

Perangkat Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
		2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	17.800.100
			2.15.02.2.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	82.806.120
Total				630.897.669.801

Sumber: Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, Diolah Tahun 2023

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap dinamika penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun 2023. Dokumen Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 dan telah diselaraskan dengan RKP dan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 selain memuat penyesuaian kerangka kebijakan keuangan daerah, juga memuat penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselaraskan dengan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2023 dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya yang terkait, seperti evaluasi akuntabilitas daerah dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 selanjutnya akan menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023. Selain ini, Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023.

Tangerang Selatan, 9 Agustus 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE